



**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
(KLHS)
RPJMD KOTA GORONTALO 2019-2024**

**KELOMPOK KERJA KLHS
BAPPEDA KOTA GORONTALO**

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Gorontalo, September 2019

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2019 - 2024



Disusun oleh:
KELOMPOK KERJA KLHS
SK Walikota No. 225/2/VI/2019

Ir. Hj. Laida M. Ali, M.Si
Ketua

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat ijin dan Ridho-Nya, maka Laporan Akhir KLHS RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 bisa diselesaikan. Tujuan dari KLHS ini adalah untuk diperolehnya hasil kajian yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kota Gorontalo. Penyusunan KLHS ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

KLHS ini dilakukan pada tahap awal penyusunan RPJMD Kota Gorontalo 2019-2024, sehingga dapat dihasilkan suatu kebijakan, rencana dan program yang telah terintegrasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan laporan ini baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada Tim Pokja KLHS RPJMD Kota Gorontalo 2019-2024, Tim penyusun RPJMD dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Gorontalo, September 2019

Walikota Gorontalo

.....

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan KLHS RPJMD Kota Gorontalo 2019 – 2024...2	
1.3 Tujuan dan Manfaat KLHS	5
1.4 Proses dan Metodologis Penyusunan KLHS	5
BAB II. PROFIL KOTA GORONTALO	9
2.1 Karakteristik Geografis.....	9
2.1.1 Letak dan Kondisi Geografis	9
2.1.2 Topografi.....	10
2.1.3 Geologi	12
2.1.4 Tanah.....	13
2.1.5 Hidrologi	14
2.1.6 Iklim.....	17
2.1.7 Penggunaan Lahan	17
2.2 Kondisi Demografi	18
2.2.1 Kependudukan.....	18
2.2.2 Ketenagakerjaan	23
2.2.3 Pendidikan.....	25
2.2.4 Kesehatan	29
2.3 Kondisi Perekonomian.....	33
2.4 Kondisi Lingkungan Hidup	38
2.4.1 Deskripsi Daya Dukung dan Daya Tampung (D3TLH) Jasa Ekosistem 38	
2.4.2 Rawan Bencana	59
2.4.3 Pencemaran.....	61
2.4.4 Persampahan.....	63
2.4.5 Pengolahan Limbah.....	67
2.4.6 Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota.....	68
2.4.7 Perubahan Iklim.....	71

BAB III. ANALISIS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	78
3.1 Kondisi Umum Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kota Gorontalo	79
3.2 Capaian Target TPB Pilar Sosial	82
3.3 Capaian Target TPB Pilar Ekonomi.....	86
3.4 Capaian Target TPB Pilar Lingkungan Hidup	89
3.5 Capaian Target TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan	91
3.6 Peran Para Pihak Dalam Pencapaian TPB	93
BAB IV. RUMUSAN ISU STRATEGIS	97
4.1 Proses Identifikasi dan Perumusan Isu Strategis	97
4.2 Analisis Gap Kebijakan RPJMD Terhadap Pencapaian TPB.....	108
4.2.1 Gap Pencapaian TPB dalam Pilar Sosial	108
4.2.2 Gap Pencapaian TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup	110
4.2.3 Gap Pencapaian TPB dalam Pilar Ekonomi.....	112
4.2.4 Gap Pencapaian TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan.....	114
4.3 Isu Strategis dan Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan	114
BAB V. SKENARIO KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	117
5.1 Skenario Kondisi Lingkungan Hidup.....	117
5.1.1 Skenario Pencapaian Ketersediaan Air Bersih.....	117
5.1.2 Skenario Pencapaian Pengelolaan Sampah dan Limbah Cair	118
5.1.3 Skenario Pencapaian Hunian Layak	123
5.1.4 Skenario Pencapaian Ketersediaan Pangan	129
5.2 Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	131
BAB VI. ALTERNATIF REKOMENDASI KLHS UNTUK RPJMD KOTA GORONTALO.....	136
6.1 Arah Kebijakan Kota Gorontalo	136
6.1.1 Proses Penyusunan RPJMD Kota Gorontalo.....	136
6.1.2 Visi, Misi Pembangunan Kota Gorontalo.....	140
6.2 Rumusan Alternatif Berdasarkan Visi dan Misi RPJMD Kota Gorontalo 2019 – 2024.....	143
6.3 Integrasi Rekomendasi KLHS ke dalam RPJMD Kota Gorontalo 2019 – 2024	151
BAB VII. PENUTUP	166
DAFTAR PUSTAKA.....	168

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sebaran Kelas Lereng Berdasarkan Luas Masing-masing Kecamatan di Kota Gorontalo	11
Tabel 2. Sebaran Jenis Tanah Berdasarkan Luas Masing-masing Kecamatan Di Kota Gorontalo	13
Tabel 3. Kawasan Hidrogeologi Berdasarkan Luas Masing-masing Kecamatan Di Kota Gorontalo	15
Tabel 4. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Gorontalo Tahun 2014 – 2018	18
Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Gorontalo dirinci per Kecamatan Tahun 2018	19
Tabel 6. Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kota Gorontalo 2014 s/d 2018	19
Tabel 7. Rasio Ketergantungan (Dependency Raio) Usia Produktif dan Tidak Produktif Kota Gorontalo Tahun 2018.....	20
Tabel 8. Jumlah Penduduk dan Jumlah KK Tahun 2018	20
Tabel 9. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Gorontalo Tahun 1990, 2000, dan 2010-2018.....	21
Tabel 10. Pertumbuhan Penduduk dirinci per Kecamatan Tahun 2010 – 2017	22
Tabel 11. Kepadatan Penduduk Kota Gorontalo, 2010 – 2018.....	22
Tabel 12. Kondisi Ketenagakerjaan Kota Gorontalo Tahun 2014 – 2018	23
Tabel 13. Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kota Gorontalo Tahun 2014 – 2017	24
Tabel 14. Kondisi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2018	30
Tabel 15. Indikator Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Kota Gorontalo Tahun 2018	31
Tabel 16. Ketersediaan Tenaga Dokter di Kota Gorontalo Tahun 2014-2018	31
Tabel 17. Pola Penyakit di Kota Gorontalo Tahun 2018.....	32
Tabel 18. Pola Penyakit di Kota Gorontalo Tahun 2018.....	32
Tabel 19. Kunjungan Pasien Selang Tahun 2014 – 2018.....	33
Tabel 20. Data Kemiskinan Kota Gorontalo Tahun 2014-2018.....	38
Tabel 21. Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Kota Gorontalo	39

Tabel 22. Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Air Kota Gorontalo	42
Tabel 23. Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara Kota Gorontalo	44
Tabel 24. Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Perlindungan Bencana Banjir Kota Gorontalo	48
Tabel 25. Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Perlindungan Bencana Longsor Kota Gorontalo	49
Tabel 26. Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Perlindungan Bencana Kebakaran Kota Gorontalo	49
Tabel 27. Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Air Kota Gorontalo	53
Tabel 28. Rekapitulasi Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem Kota Gorontalo	55
Tabel 29. Nilai Optimal Daya Dukung Jasa Ekosistem Kota Gorontalo	57
Tabel 30. Status Mutu Air Sungai Bone	63
Tabel 31. Timbulan Sampah Per Kecamatan Tahun 2016-2018	64
Tabel 32. Jalur Layanan Persampahan Kota Gorontalo Tahun 2014 – 2019	65
Tabel 33. Volume Sampah Yang Terangkut Ke TPA Tahun 2014 – 2018....	65
Tabel 34. Data Jumlah Sampah yang berkurang melalui TPS 3R Tahun 2015 – 2018.....	66
Tabel 35. Data Cakupan area pelayanan sampah Kota Gorontalo Tahun 2015 – 2018.....	67
Tabel 36. Data Jumlah Sampah yang Tertangani di Kota Gorontalo Tahun 2015 – 2018.....	67
Tabel 37. Rekapitan Tinja Per Kecamatan Tahun 2018.....	67
Tabel 38. Data Penyedotan Tinja Kota Gorontalo Selang tahun 2014-2018.	68
Tabel 39. Kondisi Eksisting RTH Kota Gorontalo	69
Tabel 40. Indikator yang tidak sesuai dengan kondisi Kota Gorontalo	79
Tabel 41. Indikator dalam pilar sosial yang telah mencapai target nasional..	83
Tabel 42. Indikator dalam pilar ekonomi yang telah mencapai target nasional	87
Tabel 43. Indikator dalam pilar lingkungan hidup yang telah mencapai target nasional	90
Tabel 44. Indikator dalam pilar hukum dan tata kelola pemerintahan yang telah mencapai target nasional	92
Tabel 45. Pembagian peran para pihak dalam pencapaian TPB	93
Tabel 46. Isu pembangunan berkelanjutan di Kota Gorontalo	97

Tabel 47. Hasil analisis Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kota Gorontalo	100
Tabel 48. Indikator dalam pilar sosial yang belum mencapai target nasional	108
Tabel 49. Indikator dalam pilar lingkungan hidup yang belum mencapai target nasional.....	111
Tabel 50. Indikator dalam pilar ekonomi yang belum mencapai target nasional	112
Tabel 51. Indikator dalam pilar hukum dan tata kelola pemerintahan yang belum mencapai target nasional	114
Tabel 52. Arah program dalam mewujudkan pencapaian tujuan tersedianya air.....	118
Tabel 53. Arah program dalam mewujudkan pencapaian tentang pengelolaan sampah dan limbah cair	121
Tabel 54. Kondisi Daya Dukung Lahan Pemukiman di Kota Gorontalo Tahun 2010 - 2030.....	124
Tabel 55. Arah program dalam pencapaian tentang hunian layak.....	128
Tabel 56. Arah program dalam mewujudkan pencapaian ketahanan pangan.....	130
Tabel 57. Skenario pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan muatan daya dukung air, hunian layak, masalah persampahan dan pangan	132
Tabel 58. Perwujudan Visi RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2019-2024.....	141
Tabel 59. Rumusan alternatif rekomendasi berdasarkan visi dan misi RPJMD 2019-2024	145
Tabel 60. Matriks penelaahan integrasi KLHS dalam RPJMD.....	153

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kota Gorontalo.....	10
Gambar 2. Peta Topografi Kota Gorontalo.....	11
Gambar 3. Peta Geologi Kota Gorontalo.....	13
Gambar 4. Peta Jenis Tanah Kota Gorontalo.....	14
Gambar 5. Peta Hidrologi Kota Gorontalo.....	16
Gambar 6. Peta penggunaan lahan Kota Gorontalo	18
Gambar 7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2014–2018	24
Gambar 8. Grafik rata-rata lama sekolah Kota Gorontalo Tahun 2015 – 2017	26
Gambar 9. Grafik Angka Partisipasi Sekolah menurut tingkat pendidikan di Kota Gorontalo Tahun 2015 – Tahun 2018	27
Gambar 10. Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) menurut tingkat pendidikan di Kota Gorontalo Tahun 2015 – Tahun 2018.....	28
Gambar 11. Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut tingkat pendidikan di Kota Gorontalo Tahun 2015 – Tahun 2018.....	29
Gambar 12. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 – 2017	34
Gambar 13. Pertumbuhan PDRB Kota Gorontalo	35
Gambar 14. Laju Inflasi Kota Gorontalo Tahun 2014 - 2018	35
Gambar 15. Grafik Koefisien Gini Kota Gorontalo Tahun 2014 – 2018.....	36
Gambar 16. Pertumbuhan Ekonomi Kota Gorontalo 2013-2017 (persen)....	37
Gambar 17. Peta Layanan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kota Gorontalo	41
Gambar 18. Peta Layanan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Kota Gorontalo	43
Gambar 19. Peta Layanan Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara Kota Gorontalo	47
Gambar 20. Peta Layanan Jasa Ekosistem Pengaturan Perlindungan Bencana Banjir	50
Gambar 21. Peta Layanan Jasa Ekosistem Pengaturan Perlindungan Bencana Longsor Kota Goronta	51
Gambar 22. Peta Layanan Jasa Ekosistem Pengaturan Perlindungan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Gorontalo	52

Gambar 23. Peta Layanan Jasa Ekosistem Pengaturan Air Kota Gorontalo	54
Gambar 24. Grafik Persentase Kondisi Daya Dukung Berbasis Jasa Ekosistem Kota Gorontalo	58
Gambar 25. Peta Rawan Banjir Kota Gorontalo	59
Gambar 26. Peta Rawan Tanah Longsor Kota Gorontalo	60
Gambar 27. Peta Rawan Tsunami Kota Gorontalo	60
Gambar 28. Peta Rawan Gempa Bumi Kota Gorontalo	61
Gambar 29. Peta Jalur Layanan Sampah Kota Gorontalo	66
Gambar 30. Peta Ruang Terbuka Hijau Kota Gorontalo	70
Gambar 31. Peta Distribusi Suhu Berdasarkan Kecamatan di Kota Gorontalo Tahun 1990.....	73
Gambar 32. Peta Distribusi Suhu Berdasarkan Kecamatan di Kota Gorontalo Tahun 2003.....	74
Gambar 33. Peta Distribusi Suhu Berdasarkan Kecamatan di Kota Gorontalo Tahun 2017.....	75
Gambar 34. Kaitan antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan dengan pencapaian TPB (Sumber: Folke, dkk., 2016)	79
Gambar 35. Hasil evaluasi pencapaian TPB di Kota Gorontalo	81
Gambar 36. Persentase ketercapaian TPB.....	82
Gambar 37. Capaian TPB Pilar Sosial di Kota Gorontalo	83
Gambar 38. Capaian TPB untuk pilar ekonomi di Kota Gorontalo.....	86
Gambar 39. Capaian TPB untuk pilar lingkungan hidup di Kota Gorontalo	89
Gambar 40. Capaian TPB untuk pilar hukum dan tata kelola pemerintahan di Kota Gorontalo.....	92
Gambar 41. Prediksi daya dukung air bersih di Kota Gorontalo Tahun 2010 - 2030	117
Gambar 42. Grafik perbandingan timbulan sampah dan sampah yang dikelola di Kota Gorontalo, Tahun 2010 - 2030	119
Gambar 43. Grafik Skenario pengelolaan sampah melalui peningkatan kemampuasn 3R dan Bank Sampah	119
Gambar 44. Grafik perbandingan produksi limbah domestik dan limbah yang terkelola di Kota Gorontalo Tahun 2010 – 2030	120
Gambar 45. Skenario penerapan kebijakan peningkatan kapasitas IPAL Komunal 50% dan IPLT 50%	121
Gambar 46. Grafik hubungan antara pertumbuhan penduduk dan kebutuhan rumah di Kota Gorontalo Tahun 2010 - 2030	124

Gambar 47. Grafik daya dukung lahan pemukiman di Kota Gorontalo Tahun 2010 – 2030.....	125
Gambar 48. Grafik daya dukung lahan pemukiman dan kebutuhan rumah di Kecamatan Kota Barat Tahun 2010 – 2030.....	125
Gambar 49. Grafik daya dukung lahan pemukiman dan kebutuhan rumah di Kecamatan Duingi Tahun 2010 – 2030.....	126
Gambar 50. Grafik daya dukung lahan pemukiman dan kebutuhan rumah di Kecamatan Kota Selatan Tahun 2010 – 2030.....	126
Gambar 51. Grafik daya dukung lahan pemukiman dan kebutuhan rumah di Kecamatan Kota Timur Tahun 2010 – 2030	126
Gambar 52. Grafik daya dukung lahan pemukiman dan kebutuhan rumah di Kecamatan Hulonthalangi Tahun 2010 – 2030	127
Gambar 53. Grafik daya dukung lahan pemukiman dan kebutuhan rumah di Kecamatan Dumbo Raya Tahun 2010 – 2030.....	127
Gambar 54. Grafik daya dukung lahan pemukiman dan kebutuhan rumah di Kecamatan Kota Utara Tahun 2010 – 2030	127
Gambar 55. Grafik daya dukung lahan pemukiman dan kebutuhan rumah di Kecamatan Kota Tengah Tahun 2010 – 2030	128
Gambar 56. Grafik daya dukung lahan pemukiman dan kebutuhan rumah di Kecamatan Sipatana Tahun 2010 – 2030	128
Gambar 57. Skenario daya dukung pangan di Kota Gorontalo Tahun 2010 – 2030	130
Gambar 58. Proses penyusunan RPJMD Kota Gorontalo	140

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 mengamanahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai salah satu instrumen dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. KLHS merupakan kajian yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif dan bertujuan untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan, strategi dan program pembangunan. Pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, salah satunya dengan melihat keberlangsungan ekosistem dan lingkungan. Keberlangsungan ekosistem dan lingkungan berperan sebagai pengendali pembangunan untuk memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan wilayah dan antar wilayah dalam suatu daerah mampu mencukupi untuk mencapai tujuan pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD) Kota Gorontalo 2019 – 2024 mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dalam proses penyusunannya, diperlukan masukan yang berasal dari hasil kajian dan analisis yang mendalam tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Oleh sebab itu, dilakukan kajian lingkungan hidup strategis terhadap RPJMD Kota Gorontalo 2019-2024. Proses KLHS ini mengacu pada PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan KLHS RPJMD Kota Gorontalo 2019 – 2024

Selain diamanatkan oleh UUPPLH Nomor 32/2009, isu lingkungan hidup juga dijadikan dasar pertimbangan utama dalam perencanaan program pembangunan daerah sehingga diperlukan adanya KLHS. Berikut ini merupakan dasar hukum yang mengatur tentang penyusunan KLHS

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaksanaan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Gorontalo Tahun 2010-2030.

1.3 Tujuan dan Manfaat KLHS

Tujuan dari pelaksanaan KLHS adalah:

1. Diperolehnya hasil kajian yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan pada kegiatan perencanaan RPJMD Kota Gorontalo 2019 - 2024
2. Menyusun rumusan alternatif rekomendasi dalam penyusunan RPJMD Kota Gorontalo 2019 -2024 yang telah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Manfaat dari penyusunan KLHS adalah:

1. Menjamin terwujudnya pembangunan yang produktif dan berwawasan lingkungan hidup dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.
2. Memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan pada RPJMD Kota Gorontalo 2019 -2024 telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah Kota Gorontalo melalui kebijakan, rencana, dan/atau program.
3. Menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD dan Rencana Aksi Daerah dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kota Gorontalo

1.4 Proses dan Metodologis Penyusunan KLHS

Tata cara penyusunan dan pelaksanaan KLHS RPJMD Kota Gorontalo mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Secara umum, tahapan yang dilalui, antara lain pembuatan dan pelaksanaan, penjaminan kualitas dan pendokumentasian, dan validasi KLHS. Penyusunan KLHS Kota Gorontalo dimulai secara resmi sejak ditetapkannya Surat Keputusan Walikota Gorontalo No. 225/2/VI/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun KLHS RPJMD Kota Gorontalo. Tahapan yang dilalui dalam penyusunan meliputi:

1. Pembentukan kelompok kerja KLHS Kelompok kerja KLHS (Pokja KLHS) yang dibentuk terdiri dari anggota yang memenuhi standar kompetensi berupa kriteria ketepatan keahlian pada isu yang dikaji dan pengalaman di bidang pembuatan dan pelaksanaan KLHS atau kajian Lingkungan Hidup yang sejenis. Pokja KLHS RPJMD Kota Gorontalo diketuai oleh Kepala Bappeda. (lihat Lampiran 1).
2. Penyusunan kerangka acuan kerja KLHS Kerangka acuan kerja disusun oleh Pokja KLHS dengan memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran, lingkup kegiatan, hasil yang diharapkan, tahapan pengkajian yang telah disepakati dan pelaporan, rencana kerja yang mencakup jadwal kerja, kebutuhan tenaga ahli yang diperlukan, serta pembiayaan (Lampiran 2).
3. Pelaksanaan konsultasi/uji publik
Uji publik dilaksanakan guna memperoleh aspirasi dari masyarakat terkait isu-isu riil yang terjadi. Isu tersebut kemudian diidentifikasi dan dirumuskan menjadi isu pembangunan berkelanjutan yang strategis dan prioritas dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan. Uji Publik I (20 Agustus 2019) dilaksanakan untuk menyepakati isu utama berdasarkan pilar lingkungan, sosial, ekonomi, dan hukum dan tata kelola; tantangan; dan kondisi pencapaian TPB dalam penyusunan KLHS RPJMD (Lampiran 5).
4. Identifikasi Muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP)
Muatan KRP disandingkan dengan isu strategis hasil uji publik untuk diidentifikasi pengaruhnya terhadap lingkungan hidup dan diberi muatan pertimbangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaksanaan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Isu hasil uji publik disandingkan dengan isu-isu strategis yang tercantum pada dokumen teknokratik RPJMD dan isu-isu strategis berdasarkan visi misi kepala daerah terpilih. Selanjutnya, dilakukan sinkronisasi isu terhadap isu TPB yang kemudian diurutkan berdasarkan ranking melalui analisis kesenjangan antara data eksisting dengan target yang telah ditetapkan.

5. Perumusan Alternatif dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) Tujuan perumusan alternatif penyempurnaan adalah mengembangkan berbagai alternatif perbaikan muatan yang sedang dalam proses penyusunan dan menjamin pembangunan berkelanjutan, melalui identifikasi muatan RPJMD yang potensial memberikan dampak negatif pada pembangunan berkelanjutan. Setelah itu, rekomendasi memberikan usulan perbaikan muatan RPJMD berdasarkan hasil perumusan alternatif penyempurnaan. Rekomendasi berupa materi perbaikan RPJMD maupun informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup beserta tindak lanjut/skenario pencapaian target. Penyepakatan rekomendasi dan skenario pencapaian dilakukan pada Uji Publik II Penyusunan KLHS RPJMD Kota Gorontalo 2019-2024 (27 September 2019)

BAB II

PROFIL KOTA GORONTALO

BAB II. PROFIL KOTA GORONTALO

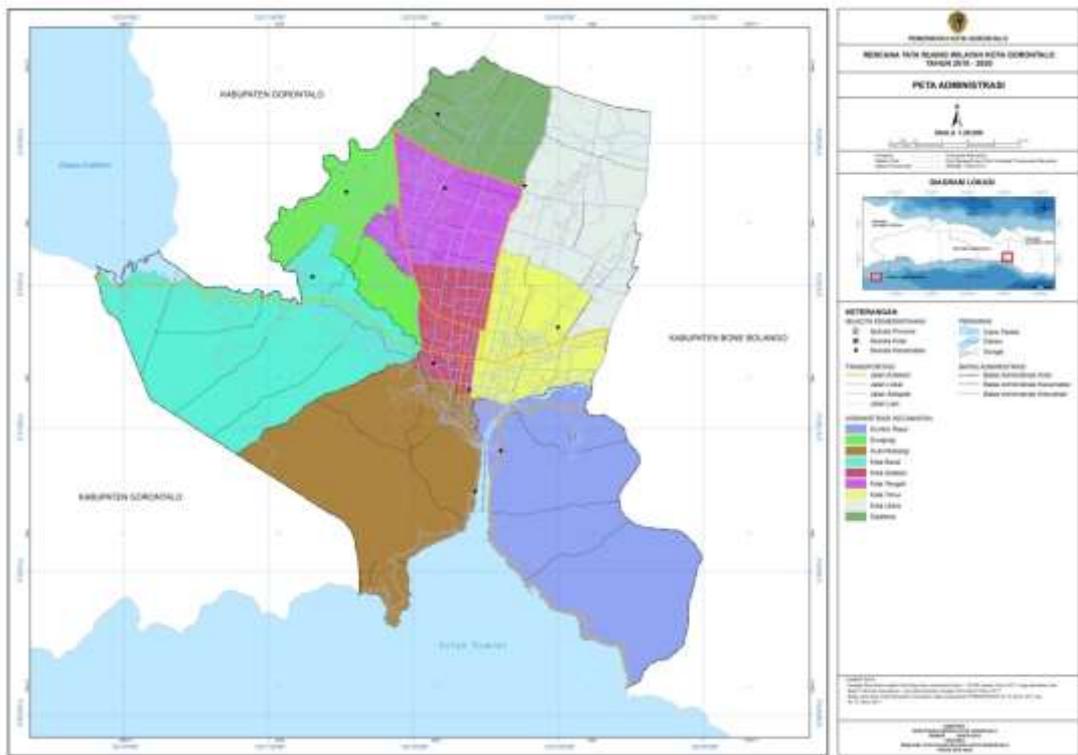
2.1 Karakteristik Geografis

2.1.1 Letak dan Kondisi Geografis

Kota Gorontalo terletak di Provinsi Gorontalo, terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan dengan luas keseluruhan wilayah Kota Gorontalo adalah 79,59 km² dan terbagi dalam 50 kelurahan dengan luasan masing-masing kecamatan yaitu:

- Kecamatan Kota Barat dengan wilayah seluas 20,08 km² atau 25,41%
- Kecamatan Duingi dengan luas wilayah sebesar 4,67 km² atau 5,91%
- Kecamatan Kota Selatan dengan luas wilayah 2,81 km² atau 3,56%
- Kecamatan Kota Timur dengan luas wilayah 5,32 km² atau 6,73%
- Kecamatan Kota Utara dengan luas wilayah 8,02 km² atau 10,15%
- Kecamatan Kota Tengah, dengan luas wilayah 4,81 km² atau 6,09%
- Kecamatan Hulontalo dengan luas Wilayah sebesar 14,23 km² atau 18,01%
- Kecamatan Dumbo Raya, dengan luas Wilayah sebesar 14,04 km² atau 17,77%
- Kecamatan Sibatana dengan luas wilayah 5,05 km² atau 6,39%

Secara astronomis, Kota Gorontalo terletak antara 00°28'17" - 00°35'56" Lintang Utara dan 122°59'44" - 123°05'59" Bujur Timur. Berdasarkan letak geografis, batas administratif Kota Gorontalo sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Sebelah Timur dengan Kecamatan Kabila dan Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, sebelah Barat dengan Kecamatan Telaga, Kecamatan Batudaa, dan Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo sedangkan sebelah Selatan dengan Teluk Tomini (**Gambar 1**).



Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kota Gorontalo
(Sumber : RTRW Kota Gorontalo Tahun 2019 - 2038)

2.1.2 Topografi

Topografi Kota Gorontalo umumnya berupa dataran rendah. Kondisi topografi dapat mempercepat atau memperlambat kegiatan iklim. Pada tanah datar kecepatan pengaliran air lebih kecil daripada tanah yang berbukit.

Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, wilayah Kota Gorontalo dapat dikelompokkan ke dalam 5 kelompok yaitu Wilayah dengan kemiringan lereng 0–8% (datar), tersebar diseluruh kecamatan, khususnya di Kecamatan Kota Utara. Sedangkan wilayah dengan kemiringan lereng 8 – 15% (landai), 15 – 25% (bergelombang/ berbukit), 25 – 40% (berbukit), >40% tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Dumbo Raya, Hulonthalangi dan Kota Barat.

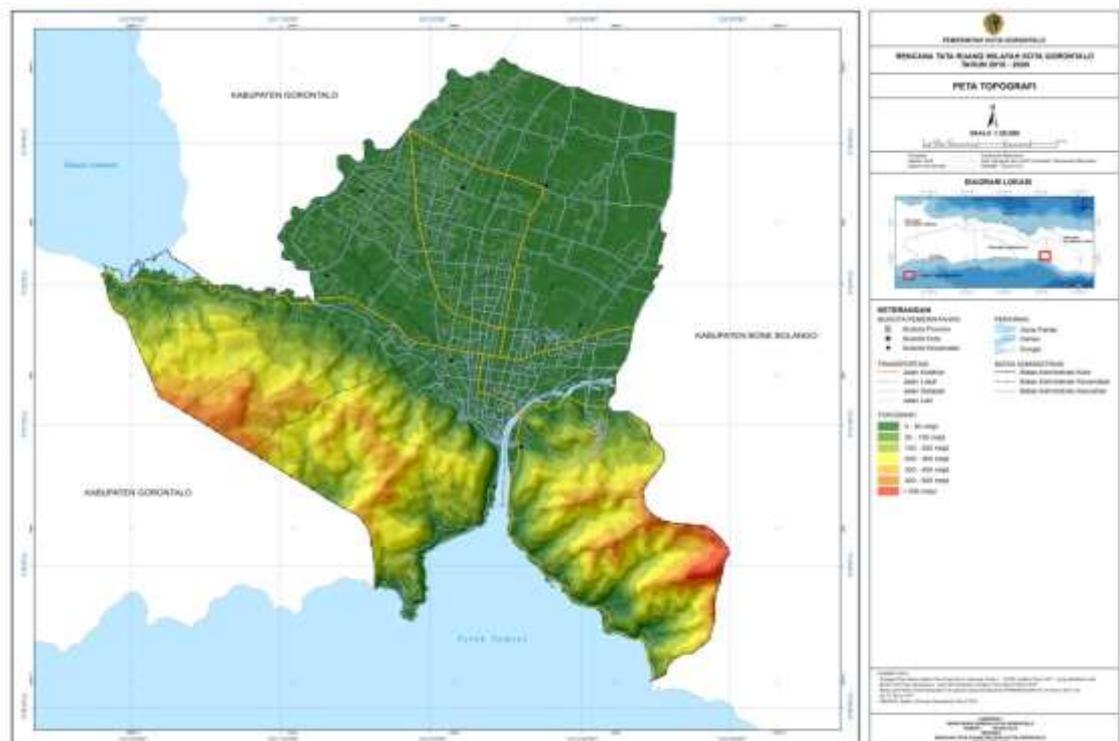
Topografi Kota Gorontalo meliputi daerah perbukitan sampai bergunung di bagian selatan dan pendataran (pantai) di bagian selatan yang berbatasan dengan teluk tomini. Pada bagian utara merupakan daerah

perkotaan. Topografi, Kota Gorontalo yang datar antara 0-8%, di kecamatan Kota Utara. Gambaran mengenai kondisi topografi di Kota Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 2 berikut ini

Tabel 1. Sebaran Kelas Lereng Berdasarkan Luas Masing-masing Kecamatan di Kota Gorontalo

KECAMATAN	KELAS LERENG (km ²)					Total
	0 – 8%	8 – 15%	15 - 25%	25 – 40%	> 40 %	
Dumbo Raya	1,67	1,11	1,88	7,21	2,04	13,91
Dungingi	4,67	-	-	-	-	4,67
Hulonthalangi	0,29	1,39	1,94	10,03	0,01	13,67
Kota Barat	3,40	1,88	2,41	8,55	3,84	20,08
Kota Selatan	3,37	-	-	-	-	3,38
Kota Tengah	4,81	-	-	-	-	4,81
Kota Timur	5,44	-	-	-	-	5,44
Kota Utara	8,35	-	-	-	-	8,35
Sipatana	4,72	-	-	-	-	4,72
Jumlah (km²)	36,73	4,38	6,23	25,79	5,89	79,03
Pesentase (%)	46,48	5,54	7,89	32,64	7,46	100,00

Sumber : BAPPEDA Kota Gorontalo, (2012)



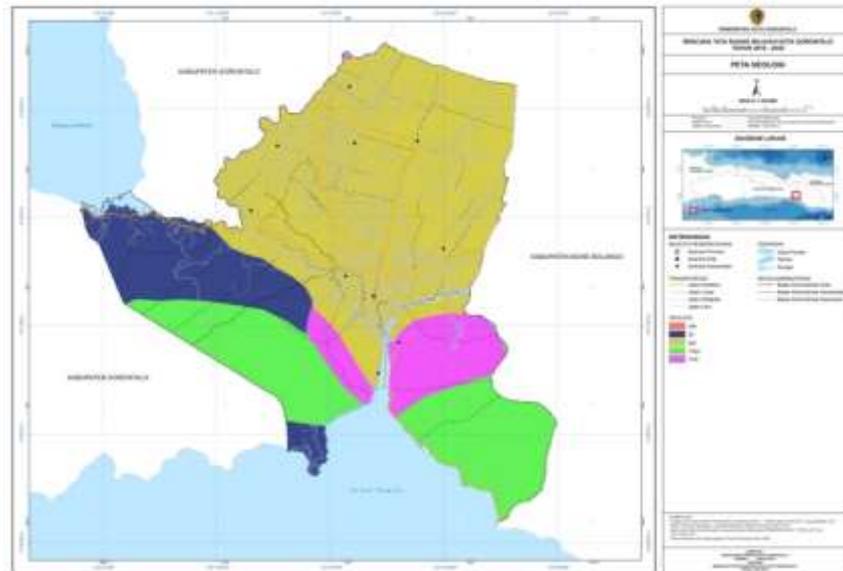
Gambar 2. Peta Topografi Kota Gorontalo
(Sumber : RTRW Kota Gorontalo Tahun 2019 - 2038)

2.1.3 Geologi

Berdasarkan urutan satuan batuan yang menyusun daerah Gorontalo dan sekitarnya, mulai dari yang tertua sampai termuda (Apandi dan Bahtiar, 1997) adalah sebagai berikut:

1. Batuan Tersier (sedimen dan vulkanik). Batuan berumur Tersier ini menempati bagian utara dan membentuk morfologi perbukitan. Batuan ini terkompaksi baik, keras, padu dan stabil. Sebagian telah mengalami pelapukan sehingga berpotensi terjadi gerakan tanah jika mengalami guncangan kuat.
2. Batuan Terobosan Granit Tersier. Batuan ini membentuk morfologi perbukitan sangat terjal G. Ailumolinggu dan G. Pombulu di bagian barat laut. Batuan ini bersifat sangat keras dan sangat stabil namun sebagian telah mengalami pelapukan sehingga berpotensi terjadi gerakan tanah jika mengalami guncangan kuat.
3. Batuan Kuartar (vulkanik dan sedimen). Batuan Kuartar menyusun morfologi perbukitan, terutama di sebelah selatan. Batuan ini bersifat kurang padu dan mudah longsor.
4. Aluvium dan endapan danau. Aluvium terutama menempati daerah pantai selatan dan sedikit di pantai utara, serta di sepanjang aliran sungai besar. Endapan danau diendapkan di bagian tengah, menempati daerah yang sangat luas memanjang dari sebelah barat mulai dari Sungai Bulta sampai Dutohu di sebelah timur. Kota Gorontalo, ibukota Provinsi Gorontalo merupakan daerah yang dilalui oleh S. Bone dan S. Bolango, disusun oleh aluvium. Satuan aluvium dan endapan anau menempati daerah dataran. Aluvium dan endapan danau tersusun atas material klastika halus hingga kasar yang bersifat lunak dan urai. Struktur geologi yang berkembang di daerah ini terutama sesar mendatar yang berarah utara-selatan, baratdaya-timurlaut dan barat laut-tenggara. Arah sesar-sesar mendatar tersebut mencerminkan arah gaya utama pembentuk sesar yaitu relatif utara-selatan. Gaya berarah utara-selatan ini searah dengan arah penunjaman Sulawesi Utara yang berlokasi di sebelah utara Pulau Sulawesi,

memanjang dari barat (sebelah utara Sulawesi Tengah) sampai ke timur (sebelah utara Sulawesi Utara).



Gambar 3. Peta Geologi Kota Gorontalo
(Sumber : RTRW Kota Gorontalo 2019-2038)

2.1.4 Tanah

Tanah diartikan adalah lapisan atas bumi yang merupakan campuran dari pelapukan batuan dan jasad makhluk hidup yang telah mati dan membusuk. Jenis tanah yang terdapat di Kota Gorontalo adalah Ordo Inceptisol. Tanah ini terbentuk pada daerah curah hujan sedang sampai tinggi dan bisa juga di jumpai pada sepanjang aliran sungai. Kedalaman efektif tanah ini mencapai 150 cm. Kedalaman efektif adalah suatu keadaan dimana akar bisa masuk sampai kedalaman tertentu untuk menyerap unsur hara sedangkan horison A (*top soil*) mempunyai kedalaman 0-35 cm. Tabel berikut menggambarkan informasi keadaan jenis tanah di Kota Gorontalo berdasarkan luasan.

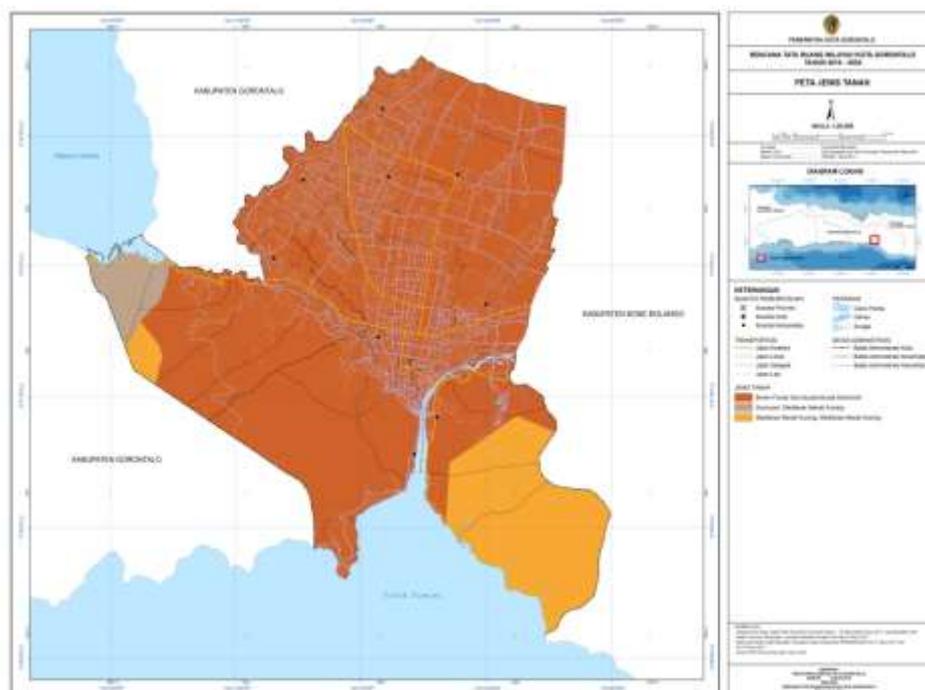
Tabel 2. Sebaran Jenis Tanah Berdasarkan Luas masing-masing Kecamatan Di Kota Gorontalo

NO.	KECAMATAN	JENIS TANAH LUAS (km ²)			Total
		ALUVIAL	LATOSOL	PODSOLIK	
1.	Dumbo Raya	1,40	0,25	12,26	13,91
2.	Dungingi	4,56	0,10	-	4,67

NO.	KECAMATAN	JENIS TANAH LUAS (km ²)			
		ALUVIAL	LATOSOL	PODSOLIK	Total
3.	Hulonthalangi	-	13,67	-	13,67
4.	Kota Barat	3,83	16,25	-	20,08
5.	Kota Selatan	2,09	1,29	-	3,38
6.	Kota Tengah	4,81	0,00	-	4,81
7.	Kota Timur	5,35	0,10	-	5,44
8.	Kota Utara	8,35	-	-	8,35
9.	Sipatana	4,72	-	-	4,72
	Jumlah (km2)	35,11	31,66	12,26	79,03
	Persentase (%)	44,43	40,06	15,51	100,00

Sumber : BAPPEDA Kota Gorontalo, (2012)

Dari tabel 2, jenis tanah di kota Gorontalo didominasi oleh jenis alluvial tersebar merata di setiap kecamatan, sebesar 44,43%. Jenis tanah ini merupakan tanah hasil erosi yang diendapkan di dataran rendah. Berikut ini gambar peta sebaran jenis tanah di Kota Gorontalo



Gambar 4. Peta Jenis Tanah Kota Gorontalo

Sumber : RTRW Kota Gorontalo 2019-2038

2.1.5 Hidrologi

Keadaan hidrologi Kota Gorontalo disajikan dalam bentuk gambar dan tabel, yang berisi informasi atau fakta mengenai fenomena hidrologi (*hydrologic phenomena*). Data hidrologi merupakan bahan informasi yang sangat penting

dalam pelaksanaan inventarisasi potensi sumber-sumber air, pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber air yang tepat dan rehabilitasi sumber-sumber alam seperti air, tanah dan hutan yang telah rusak.

Fenomena hidrologi seperti besarnya: curah hujan, temperatur, penguapan, lama penyinaran matahari, kecepatan angin, debit sungai, tinggi muka air sungai, kecepatan aliran dan konsentrasi sedimen sungai akan selalu berubah menurut waktu. Berdasarkan peta hidrogeologi daerah Kota Gorontalo dari BPDAS Provinsi Gorontalo kondisi air tanah dan struktur geologi Kota Gorontalo dapat diuraikan sebagai berikut : Terdapatnya air tanah dan produktivitas akuifer (*occurrence of groundwater and productivity of aquifers*).

Tabel 3. Kawasan Hidrogeologi Berdasarkan Luas Masing-masing Kecamatan di Kota Gorontalo

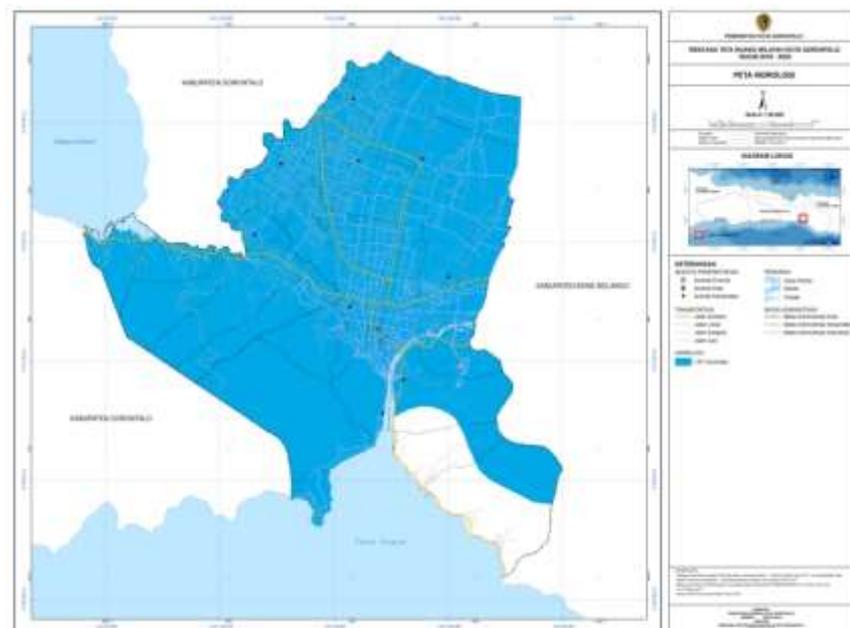
KECAMATAN	KONDISI HIDROGEOLOGI (km ²)						TOTAL (km ²)
	Akuifer produktif	Akuifer produktif kecil	Akuifer produktif sedang	Daerah Air Tanah Langka	Akuifer produktif	Akuifer produktif Sedang	
Dumbo Raya	-	12,56	-	1,35	-	-	13,91
Dungingi	3,78	-	0,33	-	0,57	-	4,67
Hulonthalangi	-	0,84	-	-	12,83	-	13,67
Kota Barat	0,41	0,38	-	-	19,29	-	20,08
Kota Selatan	1,80	0,50	-	-	1,08	-	3,38
Kota Tengah	3,05	-	1,76	-	-	-	4,81
Kota Timur	3,58	1,85	-	-	0,01	-	5,44
Kota Utara	2,83	-	5,52	-	-	-	8,35
Sipatana	-	-	4,34	-	-	0,39	4,72
Jumlah (km²)	15,45	16,13	11,95	1,35	33,77	0,39	79,03
Pesentase (%)	19,55	20,40	15,12	1,71	42,73	0,49	100

Sumber : BAPPEDA Kota Gorontalo, (2012)

Tabel di atas memberikan informasi bahwa kawasan kota Gorontalo memiliki tipe hidrogeologi akuifer yang artinya aliran melalui ruang antar butir (*aquifers in which flow is intergranular*). Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Akuifer produktif dengan penyebaran luas, berarti :

- 1) Akuifer dengan keterusan sedang : muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau bawah muka tanah; debit sumur umumnya 5 sampai 10 ltr/dtk;
 - 2) Akuifer dengan produktivitas sedang, dan penyebaran luas berarti : akuifer dengan keterusan sedang sampai rendah; muka air tanah beragam dari atas atau dekat muka tanah sampai lebih dalam dari 10 m di bawah tanah, debit sumur umumnya kurang dari 5 ltr/dtk;
 - 3) Setempat akuifer dengan produktivitas sedang berarti : akuifer tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah, debit sumur umumnya kurang dari 5 ltr/dtk.
- b. Akuifer (bercelah atau sarang) dengan produktivitas rendah dan daerah air tanah langka (*aquifers (fissured or product) of poor productivity and regions without exploitabels groundwater*).
- 1) Akuifer dengan produktivitas rendah setempat berarti : umumnya keterusan sangat rendah, setempat air tanah dangkal dalam jumlah terbatas dapat diperoleh dilembah-lembah atau pada zona pelapukan;
 - 2) Daerah air tanah langka



Gambar 5. Peta Hidrologi Kota Gorontalo
Sumber : RTRW Kota Gorontalo 2019-2038

2.1.6 Iklim

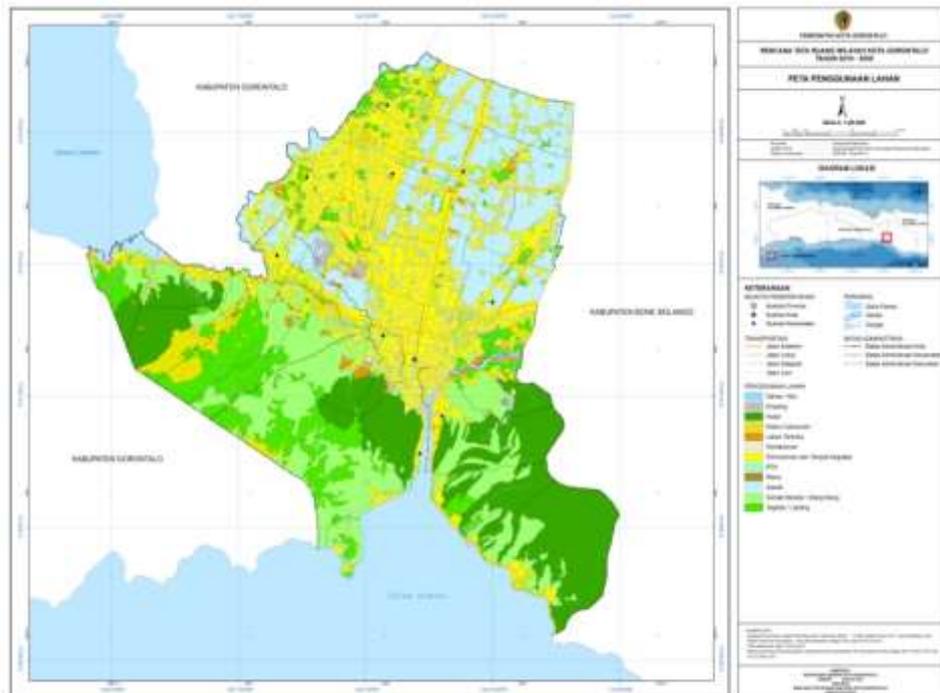
Secara umum iklim di kepulauan Indonesia adalah iklim tropik basah yang dicirikan oleh suhu dan kelembaban yang tinggi sepanjang Tahun. Sumber data iklim kota Gorontalo diperoleh dari stasiun klimatologi Bandara Jalaludin. Dari sekian banyak unsur iklim, yang paling banyak berpengaruh pada produktivitas lahan pertanian khususnya daerah tropika adalah curah hujan, suhu dan kelembaban udara.

Kota Gorontalo termasuk ke dalam daerah dengan tipe hujan kelas A dimana 11 hingga 12 bulan dalam setahun curah hujan rata-rata adalah > 100 mm per bulan dan hanya satu bulan yang memiliki curah hujan rata-rata < 60 mm. Curah hujan Tahunan menunjukkan rata-rata 1.345 mm/thn, curah hujan tertinggi pada bulan Maret dan terendah pada bulan September.

2.1.7 Penggunaan Lahan

Kewenangan dan tanggung jawab penatagunaan lahan di Kota Gorontalo dilaksanakan sesuai arahan pola ruang wilayah yang direncanakan pengembangannya sesuai dalam dokumen RTRW Kota Gorontalo.

Penggunaan lahan atau tutupan lahan di Kota Gorontalo terdiri dari lahan basah dan lahan kering. Lahan basah terdiri dari danau/situ dengan luasan 24263,55 Ha, empang seluas 314365,55 Ha, Hutan 13048686,07 Ha, Rawa 352967,36 Ha, Semak belukar/alang-alang 13967810,67 Ha, dan sungai dengan luasan 708958,48. Lahan kering terdiri dari Lahan terbuka dengan luasan 618863,63 Ha, Kebun campuran seluas 1742261,41 Ha, jembatan 1341,45 Ha, Pemakaman 180736,41 Ha, permukiman dan tempat kegiatan seluas 20804223,99 Ha serta tegalan/ladang dengan luasan 8115326,93 Ha.



Gambar 6. Peta penggunaan lahan Kota Gorontalo
Sumber : RTRW Kota Gorontalo 2019-2039

2.2 Kondisi Demografi

2.2.1 Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Gorontalo mengalami peningkatan dari Tahun 2014 yaitu sebesar 192.031 jiwa menjadi 199.676 jiwa pada tahun 2018. Secara rinci kondisi kependudukan Kota Gorontalo terlihat pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Gorontalo Tahun 2014 – 2018

Tahun	Jenis kelamin		Jumlah	Pertumbuhan penduduk (%)
	Laki-laki	Perempuan		
2014	95.523	96.508	192.031	2,27
2015	96.404	97.494	193.898	1,05
2016	94.848	95.644	195.468	0.81
2017	98.367	99.246	197.613	1.10
2018	99.315	100.452	199.767	1.09

Sumber : Badan Pusat Statistik, (2019)

Penduduk Menurut jenis Kelamin

Kondisi jumlah penduduk Kota Gorontalo berdasarkan jenis kelamin Tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Gorontalo per Kecamatan Tahun 2018

Kecamatan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
Kota Barat	11.862	11.867	23.729
Kota Selatan	10.248	10.586	20.834
Kota Utara	9.854	9.842	19.696
Dungingi	12.545	12.675	25.220
Kota Timur	13.497	13.795	27.292
Kota Tengah	13.546	13.923	27.469
Sipatana	9.633	9.719	19.352
Dumbo Raya	9.706	9.572	19.278
Hulonthalangi	8.424	8.473	16.897
JumlahTotal	99.315	100.452	199.767

Sumber : Badan Pusat Statistik, (2019)

Kecamatan Kota Tengah merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi, diikuti dengan Kecamatan Kota Timur. Sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Hulonthalangi dan Kecamatan Dumbo Raya.

Penduduk Menurut Kelompok Umur

Pembagian penduduk berdasarkan usia sangat penting diketahui untuk memprediksikan jumlah kondisi regenerasi, angka ketergantungan (*dependency ratio*) karena bentuk struktur penduduk berdasarkan usia dapat diketahui jumlah penduduk yang paling banyak dalam kelompok usia tertentu. Kondisi penduduk berdasarkan kelompok usia yang dibedakan secara rinci antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kota Gorontalo 2014 s/d 2018

Kel umur	2014	2015	2016	2017	2018
0 – 4	14.131	18.387	14.468	14.489	14.073
5 – 9	18.089	17.704	17.708	17.667	17.651
10 – 14	18.682	16.225	19.185	19.289	18.821
15 – 19	16.516	19.797	17.421	17.960	19.040
20 – 24	17.167	23.415	17.265	17.075	17.198
25 – 29	15.812	17.761	16.129	16.702	17.056

Kel umur	2014	2015	2016	2017	2018
30 – 34	16.781	15.234	16.736	15.741	15.000
35 – 39	15.418	15.212	14.953	15.601	15.091
40 – 44	14.227	14.986	15.123	15.160	14.982
45 – 49	12.747	12.743	13.003	13.386	13.675
50 – 54	10.103	10.467	10.739	10.918	11.193
55 – 59	8.109	7.647	8.192	8.548	8.905
60 – 64	5.821	5.676	6.143	6.235	6.596
65 – 69	4.066	3.771	3.791	4.120	4.421
70 – 74	2.313	2.404	2.536	2.909	3.108
75 +	2.049	2.025	2.081	1.813	2.147
Jumlah	192.031	193.898	195.468	197.613	199.767

Sumber : Badan Pusat Statistik, (, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Berdasarkan kelompok usia, maka angka tertinggi ada pada kelompok usia 15 – 19 tahun, diikuti kelompok umur 10 – 14 tahun dan kelompok usia 5 – 9 tahun. Angka tersebut mengindikasikan bahwa kelompok usia terbesar merupakan kelompok usia sekolah dan mahasiswa. Kondisi ini merupakan potensi angkatan kerja yang cukup besar di Kota Gorontalo, kebutuhan fasilitas pendidikan, kesehatan serta tingkat ketergantungan (*dependency ratio*).

Tabel 7. Rasio Ketergantungan (Dependency Raio) Usia Produktif dan Tidak Produktif Kota Gorontalo Tahun 2018

No	Kecamatan	Kelompok Usia			Rasio Ketergantungan			Jumlah Penduduk
		0 -14	15 - 64	65 keatas	Muda	Tua	Total	
1	Dumbo Raya	5,005	13,324	949	37.56%	7.12%	44.69%	19,278
2	Dungingi	6,558	17,805	857	36.83%	4.81%	41.65%	25,220
3	Hulondalangi	4,392	11,670	835	37.63%	7.16%	44.79%	16,897
4	Kota Barat	5,967	16,575	1,187	36.00%	7.16%	43.16%	23,729
5	Kota Selatan	5,084	14,440	1,310	35.21%	9.07%	44.28%	20,834
6	Kota Tengah	6,718	19,524	1,227	34.41%	6.28%	40.69%	27,469
7	Kota Timur	6,731	19,059	1,502	35.32%	7.88%	43.20%	27,292
8	Kota Utara	5,190	13,544	962	38.32%	7.10%	45.42%	19,696
9	Sifatana	4,900	13,605	847	36.02%	6.23%	42.24%	19,352
	T o t a l	50,545	139,546	9,676	36.22%	6.93%	43.15%	199,767

Sumber : Disdukcapil Kota Gorontalo, 2019

Penduduk Menurut Kepala Keluarga

Hasil pendataan penduduk pada Tahun 2018 menurut jumlah kepala keluarga ditunjukkan pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Jumlah Penduduk dan Jumlah KK Tahun 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK
1	Kota Barat	23.729	6.889
2	Kota Selatan	20.834	6.621
3	Kota Utara	19.696	5.678

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK
4	Dungingi	25.220	7.285
5	Kota Timur	27.292	8.290
6	Kota Tengah	27.469	8.553
7	Sipatana	19.352	5.823
8	Dumbo Raya	19.278	5.873
9	Hulonthalangi	16.897	5.091
	KOTA GORONTALO	199.767	60.103

Sumber Data : Disdukcapil Kota Gorontalo, 2019

Kecamatan Kota Tengah memiliki jumlah Penduduk terbesar yakni sejumlah 27.562 jiwa dengan memiliki jumlah Kepala Keluarga sebanyak 8.553 KK, diikuti kecamatan Kota Timur dan Dungingi. Sedangkan jumlah KK terkecil adalah kecamatan Hulonthalangi dengan jumlah 5091 KK.

Dilihat perkembangan jumlah KK dari Tahun sebelumnya terjadi kenaikan jumlah KK, sedangkan rata-rata jumlah anggota keluarga tidak mengalami perubahan, kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat tingkat kesadaran masyarakat atas program keluarga berencana dengan jumlah anggota keluarga yang kecil yang berarti menuju keluarga bahagia sejahtera.

Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kota Gorontalo dari Tahun 1990, 2000 dan 2010-2018 mengalami peningkatan yang signifikan, sebagaimana terlihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Gorontalo Tahun 1990, 2000, dan 2010-2018

Tahun	Jumlah penduduk	Pertumbuhan penduduk
1990	120.313	1,19
2000	134.631	3,35
2010	170.127	2,65
2016	192.031	0,81
2017	193.898	1,10
2018	199.767	1,09

Sumber Data : BPS Kota Gorontalo, 2019

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Gorontalo mengalami peningkatan yang signifikan, terlihat pada Tahun 1990 sebesar 1.91 naik menjadi 3,35 pada tahun 2000, dan tahun 2010 2,65 dan tahun 2016 sampai tahun 2018 kenaikannya

sekitar 0,28. Secara rinci laju pertumbuhan penduduk per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 10 berikut :

Tabel 10. Pertumbuhan Penduduk dirinci per Kecamatan Tahun 2010 – 2017

Kecamatan Subdistrict		Jumlah Penduduk (orang) <i>Population (people)</i>			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun <i>Annual Population Growth Rate (%)</i>	
		2010	2016	2017	2010-2017	2016-2017
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kota Barat	10.220	22.722	23.304	128.02	2.34
2	Dungingi	21.568	23.996	24.616	14.13	2.58
3	Kota Selatan	20.647	20.663	20.756	0.53	0.45
4	Kota Timur	25.195	27.041	27.089	7.52	0.18
5	Hulonthalangi	15.341	16.647	16.685	8.76	0.23
6	Dumbo Raya	16.960	19.176	19.230	13.38	0.28
7	Kota Utara	16.326	18.805	19.258	17.96	2.41
8	Kota Tengah	27.047	27.480	27.562	1.90	0.30
9	Sipatana	16.823	18.888	19.113	13.61	1.19
Kota Gorontalo Gorontalo Municipality		170.127	195.468	197.613	16.16	1.10

Sumber Data : BPS Kota Gorontalo, 2018

Kepadatan Penduduk

Kondisi laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan peningkatan angka kepadatan penduduk. Tahun 2008 sampai Tahun 2018 terjadi pertumbuhan kepadatan penduduk wajar, dengan rata-rata per Tahun pertumbuhan kepadatan penduduk sebesar 100%, sebagaimana terlihat pada Tabel 11 berikut .

Tabel 11. Kepadatan Penduduk Kota Gorontalo, 2010 – 2018

No	T a h u n	Luas wilayah (Km2)	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk (jiwa/Km2)
1	2010	64,79	180.127	2.780
2	2011	64,79	184.062	2.329
3	2012	64,79	188.761	2.388
4	2013	64,79	190.492	2,410
5	2014	64,79	192.031	2,430
6	2015	64,79	193.898	2,453
7	2016	64,79	195.468	3.017
8	2017	64,79	197.613	3.050
9	2018	79,03	199.767	2.528

Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2019

2.2.2 Ketenagakerjaan

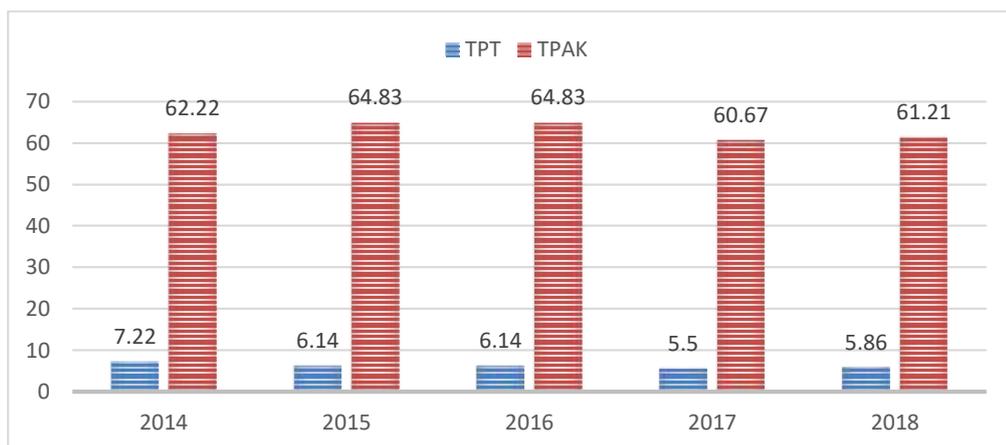
Kondisi ketenagakerjaan Kota Gorontalo dari tahun ke tahun cenderung berfluktuasi, dimana angkatan kerja yang bekerja tertinggi menurut BPS pada Tahun 2015 sebanyak 92.164 orang. Sementara, dalam kurun waktu Tahun 2013-2017 jumlah pengangguran di Kota Gorontalo mengalami penurunan, dimana Tahun 2013 angka pengangguran sebesar 7,37 persen menjadi 7,22 persen di Tahun 2014 dan pada Tahun 2015 – 2016 masih stabil di 6,14 persen. Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 5.5 persen.

Tabel 12. Kondisi Ketenagakerjaan Kota Gorontalo Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Status	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angkatan Kerja	Bekerja	85.215	92.164	92.164	91.182	
		Pengangguran	6.634	6.031	6.031	5.305	
		Total	91.849	98.195	98.195	96.487	
2	Bukan Angkatan Kerja	Sekolah	22.779	20.826	20.826	17.424	
		Mengurus URT	27.068	28.129	28.129	41.461	
		Lainnya	5.923	4.306	4.306	3.676	
		Total	55.77	53.261	53.261	62.561	
Jumlah Total			129.360	147.619	147.619	151.456	

Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2018

Lapangan kerja dan kapasitas tenaga kerja bergantung pada TPAK dan perkembangan investasi yang terjadi di Kota Gorontalo. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Gorontalo pada Tahun 2018 mencapai 61,21 persen, hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk usia kerja tergolong ke dalam angkatan kerja. Angkatan Kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. TPAK pada Tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2017 yakni sebesar 0,54 persen. TPT adalah persentase pengangguran terhadap angkatan kerja. Jika dibandingkan dengan Tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan dimana Tahun 2018 TPT sebesar 5,86 persen. TPT yang mengalami kenaikan menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang menganggur bertambah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Gambar 7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2014–2018
(Sumber: BPS Kota Gorontalo, 2019)

Kinerja urusan ketenagakerjaan yang telah dicapai di Kota Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 13 berikut :

Tabel 13. Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kota Gorontalo Tahun 2014 – 2017

No	Kinerja Yang Telah Dicapai	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar	orang	9,861	10,128	10,640	11,717	12.324
2	Jumlah tenaga kerja produktif	orang	1,217	216	428	430	607
3	Jumlah perusahaan yang terdaftar	buah	419	440	721	721	801
4	Jumlah perusahaan yang menerapkan UMP dan jamsostek						
	- Norma kerja	buah	306	367	820	820	Prov
	- Jamsostek	buah	703	737	820	820	811
5	Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma kerja dan K3						
	- Norma kerja	buah	210	327	352	352	Prov
	- K3	buah	198	219	234	234	Prov
6	Jumlah kasus kecelakaan kerja, PAK dan objek pengawasan K3						
	- Kasus kecelakaan	orang	1	2	-	-	Prov
	- Objek pengawasan K3	perusahaan	240	261	321	321	Prov
7	Jumlah sarana hubungan industrial						
	- PP	perusahaan	39	47	56	56	61
	- PKB	perusahaan	3	3	3	3	3

No	Kinerja Yang Telah Dicapai	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
-	LKS - Tripartit	perusahaan	1	4	4	4	1

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM, 2018

Jumlah perusahaan yang terdaftar setiap Tahun cenderung meningkat, diikuti dengan jumlah tenaga kerja yang terdaftar. Pada Tahun 2017 jumlah tenaga kerja yang terdaftar sebanyak 11.717 orang tenaga kerja yang bekerja di 721 perusahaan dan tahun 2018 meningkat menjadi 12.324 orang tenaga kerja yang bekerja di 801 perusahaan.

Perusahaan yang terdaftar sebagian besar menerapkan norma kerja dan K3 serta menggaji karyawan sesuai UMP dan juga melaksanakan jamsostek. Pada 2 (dua) Tahun terakhir, tidak ada kasus kecelakaan kerja.

2.2.3 Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan sangat strategis dalam keberhasilan pembangunan. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa regulasi dan peraturan diterapkan untuk memajukan dunia pendidikan. Wajib belajar 9 tahun menjadi program wajib yang perlu dukungan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa setiap negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Untuk melaksanakan program wajib belajar ini, diperlukan dukungan dari berbagai kalangan agar dapat berjalan dengan lancar. Sarana dan prasana yang memadai dan terjangkau menjadi hal yang wajib ditingkatkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Tenaga pendidik juga perlu mendapat perhatian, karena kualitas tenaga pendidik akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 25 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

Rata-rata lama sekolah dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Secara umum, pada tahun 2017 rata-rata lama sekolah di Kota Gorontalo sebesar 10,32 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Kota Gorontalo hanya bersekolah hingga kelas X SMA. Selama periode tahun 2011-2017, rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Gorontalo mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah mencapai 9,77 kemudian meningkat menjadi 10,32 pada tahun 2017. Rata-rata lama sekolah di Kota Gorontalo sejak Tahun 2015 s/d 2017 dibandingkan dengan target nasional TPB ditunjukkan pada Gambar 9.



Gambar 8. Grafik rata-rata lama sekolah Kota Gorontalo Tahun 2015 – 2017
(Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2017 dan Perpres No. 59/2017)

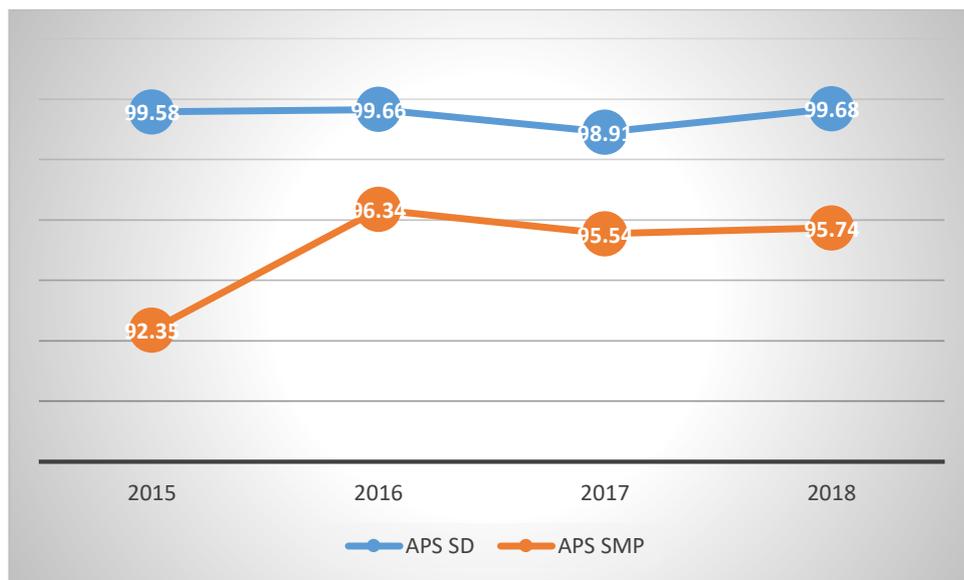
Data pada Tabel 9 menunjukkan bahwa kondisi rata-rata lama sekolah di Kota Gorontalo telah mencapai target nasional Tahun 2019 yaitu 8,8 tahun.

Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan. APS menggambarkan proporsi penduduk yang masih sekolah dengan kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur

yang sesuai. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah oleh penduduk umur tertentu.

Program wajib belajar 9 tahun di Kota Gorontalo belum sepenuhnya berhasil. Tercatat bahwa Angka partisipasi sekolah (APS) pada penduduk kelompok umur 13-15 tahun sebesar 95,54 persen. Dengan kata lain, masih terdapat 4,46 persen penduduk usia 13-15 tahun yang seharusnya sekolah ternyata tidak/belum pernah sekolah atau tidak bersekolah lagi. Pada penduduk kelompok umur 7-12 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan SD sederajat, APS menunjukkan angka yang meningkat dari tahun ke tahun.

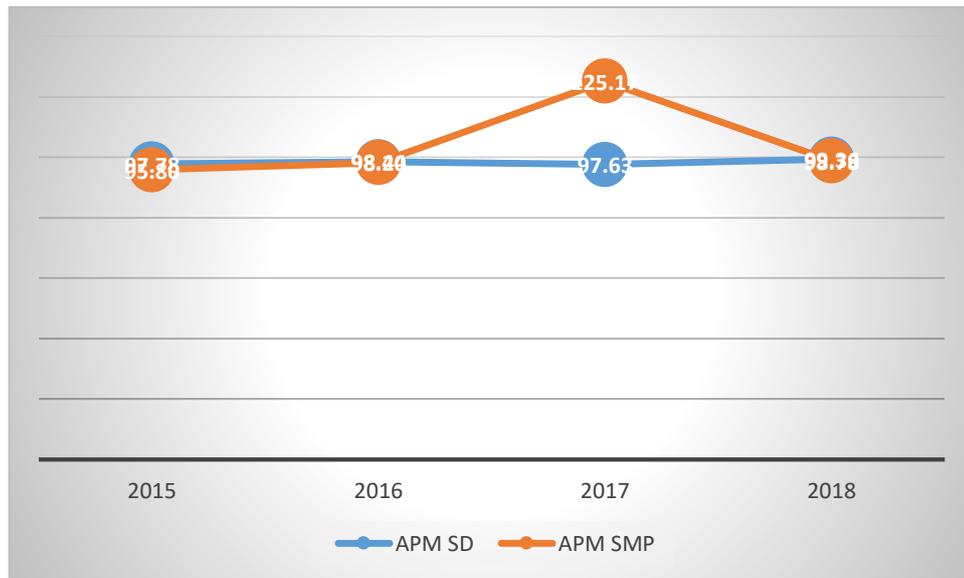


Gambar 9. Grafik Angka Partisipasi Sekolah menurut tingkat pendidikan di Kota Gorontalo Tahun 2015 – Tahun 2018
(Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 - 2018)

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah bersangkutan. indikator APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu (usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya). APM akan mencapai nilai 100, jika seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu sesuai dengan jenjang

pendidikannya. Kondisi APM di Kota Gorontalo ditunjukkan pada Gambar 11.

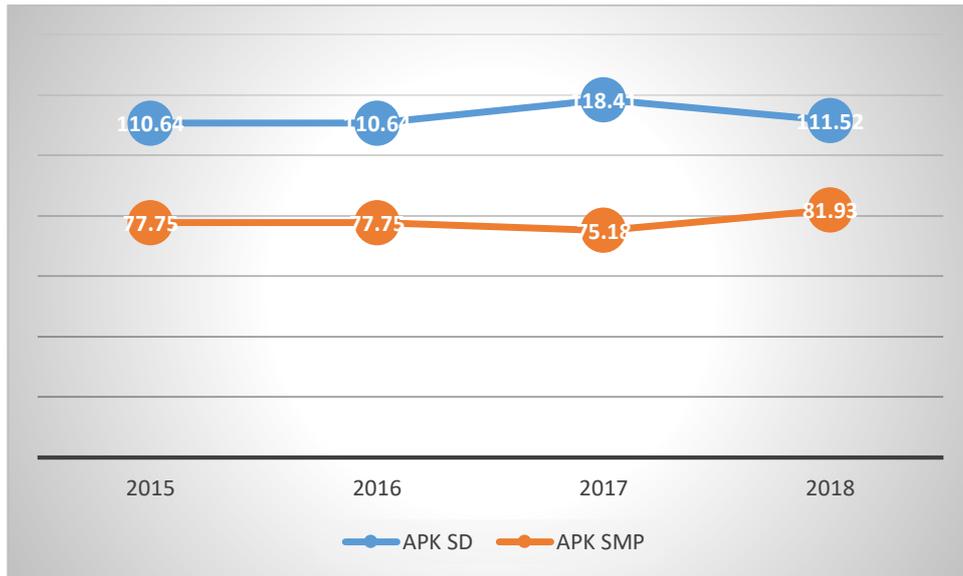


Gambar 10. Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) menurut tingkat pendidikan di Kota Gorontalo Tahun 2015 – Tahun 2018
(Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 - 2018)

Gambar 11 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan angka partisipasi murni pada anak usia 7 – 12 Tahun (SD/MI sederajat). Demikian pula dengan APM anak usia 13 – 15 tahun (SMP/MTs sederajat). Akan tetapi pada Tahun 2018 mengalami penurunan.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Indikator lain yang biasa digunakan untuk mengukur partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK menggambarkan proporsi penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK bisa bernilai lebih dari 100 persen karena ada penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu ada yang di luar kelompok usia yang seharusnya. APK dapat mencerminkan penduduk pada kelompok umur tertentu yang masuk sekolah tidak tepat sesuai dengan umurnya



Gambar 11. Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut tingkat pendidikan di Kota Gorontalo Tahun 2015 – Tahun 2018
(Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2015 - 2018)

2.2.4 Kesehatan

Berbagai Program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mutu pelayanan prima kesehatan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo antara lain dengan meningkatkan sarana dan fasilitas kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat seperti Rumah sakit, Puskesmas dan dokter praktek. Perkembangan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan selama 4 (empat) Tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup mampu menggambarkan upaya pemenuhan pelayanan kesehatan secara merata yaitu pada jumlah puskesmas pembantu, puskesmas yang terakreditasi dan rumah sakit.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan di Kota Gorontalo masih perlu terus diupayakan agar semua masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang prima, yang sesuai dengan standar operasional prosedur. Peningkatan sarana dan prasarana ini tentu akan dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang ditandai dengan diupayakannya akreditasi puskesmas

di Kota Gorontalo. Selain itu sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan dasar untuk Tahun 2017 berupa prasarana listrik untuk puskesmas (generator set/energi terbarukan), Kendaraan Khusus Roda 2 Untuk program kesehatan di puskesmas, Pengadaan prangkat komputer di puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk SIKNAS/SIKDA. Juga pengadaan Alat Kesehatan seperti Set minor surgery, Set laboratorium, Set kesehatan gigi dan mulut, Pengadaan alat-alat medik pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Food Contamination kit, Pengadaan mesin fogging, Posbindu kit, Pengadaan Alat Laboratorium Smokerlyzer, Pengadaan Alat Pemeriksaan Umum. Pengadaan sarana prasarana, pemenuhan obat yang pembiayaannya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang pelayanan dasar dan kefarmasian.

Tabel 14. Kondisi Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2018

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Posyandu	128
2	Pustu	31
3	Puskesmas	10
4	Puskesmas Keliling	13
5	Polindes	19
6	Poskesdes	11
7	Rumah Sakit	6
8	Apotek	83
9	Toko Obat	17
10	Praktek Dokter	221

Sumber: Dinas Kesehatan, 2019

Ketersediaan Fasilitas Rumah Sakit

Peningkatan pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat Kota Gorontalo tidak lepas dari ketersediaan sarana dan fasilitas Rumah Sakit.

Salah satu indikator pelayanan rumah sakit adalah *Bed Occupancy Ratio (BOR)*. BOR berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh Rumah Sakit digunakan oleh masyarakat dan seberapa jauh masyarakat menggunakan pelayanan rawat inap. Berikut adalah tabel indikator kinerja pelayanan Rumah Sakit Kota Gorontalo.

Tabel 15. Indikator Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Kota Gorontalo Tahun 2018

No	Nama Rumah Sakit	Jumlah Tempat Tidur	Pasien Keluar (Hidup+Mati)	Jumlah hari perawatan	Jumlah lama dirawat	BOR (%)	BTO (kali)	TOI (hari)	ALOS (hari)
1	BLUD Aloe Saboe	350	19.955	107.689	95.559	84,3	57	1	5
2	RSU Otanaha	87	9.024	15.454	15.454	48,7	104	2	2
3	RSU Islam	59	2.666	10.764	8.917	50,0	45	4	3
4	RSU Bunda	131	6.091	30.734	24.643	64,3	46	3	4
5.	RSIA Siti Khadijah	63	3.386	8.710	8.699	37,9	54	4	3
6.	RSU Multazam	91	5.287	1.494	1.170	4,5	58	6	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, 2019

Dari data angka BOR sesuai table diatas, untuk perawatan rawat inap, masyarakat lebih banyak menggunakan BLUD Aloe Saboe, dengan persentase sebesar 81,75%, diikuti RSU Bunda sebesar 61.03%, RSIA Sitti Khadijah sebesar 50,22%, RSU Islam 43,18%, RSU Multazam sebesar 39,25%.

a. Ketersediaan Tenaga Dokter

Ketersediaan tenaga medis/paramedis pada pelayanan kesehatan pada masyarakat perlu ditingkatkan melalui pemenuhan kebutuhan dan pemerataan tenaga medis/paramedis. Tabel berikut menunjukkan data ketersediaan dokter di Kota Gorontalo Tahun 2014–2018.

Tabel 16. Ketersediaan Tenaga Dokter di Kota Gorontalo Tahun 2014-2018

Jumlah Dokter	2014	2015	2016	2017	2018
Dokter Spesialis	31	34	39	45	48
Dokter Umum	27	22	33	30	20
Dokter Gigi	2	2	2	3	3
Total Jumlah Dokter	60	58	74	78	71

Sumber : RSUD Aloe Saboe Kota Gorontalo, 2019

Jumlah tenaga dokter di Kota Gorontalo terus mengalami peningkatan, khususnya untuk tenaga dokter spesialis dimana untuk Tahun 2017 dengan jumlah 45 orang bertambah menjadi 48 orang pada Tahun 2018.

b. Pola Penyakit

Beberapa jenis penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Kota Gorontalo berdasarkan data dari Dinas Kesehatan adalah Diare, TBC,

DBD, dan Kusta. Data yang ada dilapangan menunjukkan bahwa diare merupakan penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat Kota Gorontalo, dimana untuk Tahun 2018 terdapat sebanyak 6.682 kasus, TB sebanyak 570 kasus, DBD 123 kasus, diare 5.808 kasus, kusta 24 kasus, stunting 139 kasus, dan campak sebanyak 18 kasus. Jumlah kasus-kasus penyakit ini tersebar di 9 (Sembilan) Kecamatan di Kota Gorontalo.

Tabel 17. Pola Penyakit di Kota Gorontalo Tahun 2018

No.	Kecamatan	TB	DBD	Diare	Kusta	Stunting	Campak
1	Kota Barat	60	24	821	1	13	0
2	Dungingi	60	24	394	6	7	9
3	Kota Selatan	47	14	534	3	12	1
4	Kota Timur	78	35	400	3	27	0
5	Hulondhalangi	34	2	78	2	13	0
6	Dumbo Raya	95	1	295	2	18	0
7	Kota Utara	54	11	418	2	12	0
8	Kota Tengah	84	11	515	3	24	3
9	Sipatana	58	1	186	2	13	5
	JUMLAH	570	123	5.808	24	139	18

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, 2019

Beberapa penyakit yang menjadi perhatian global antara lain : TBC, HIV AIDS, Diare dan DBD juga menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Gorontalo.

HIV AIDS

Jumlah kasus penderita HIV/AIDS diklasifikasikan berdasarkan umur, bisa dilihat dari data sebagai berikut :

Tabel 18. Pola Penyakit di Kota Gorontalo Tahun 2018

No.	Kel. Umur (Tahun)	HIV			Proporsi Kel. Umur
		L	P	L+P	
1	4 tahun	0	0	0	0
2	5-14	0	0	0	0
3	15-19	0	0	0	0
4	20-24	3	1	4	33,3
5	25-49	6	2	8	66,7
6	50	0	0	0	0
Jumlah		9	3	12	
Proporsi Jenis Kelamin		75	25		
Jumlah estimasi orang dengan resiko terinfeksi HIV					5.462
Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan sesuai standar					4.775

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	87,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

c. Jumlah kunjungan pasien di sarana kesehatan

Sarana pelayanan kesehatan khususnya BLUD Aloe Saboe sebagai salah satu rumah sakit pemerintah terbesar di Kota Gorontalo melayani kunjungan pasien yang jumlahnya meningkat setiap Tahunnya. Dari data table dibawah, terlihat pasien yang berkunjung didominasi oleh pasien rawat jalan yang terus meningkat, dimana Tahun 2014 sebanyak 36.029 pasien, naik pada Tahun 2015 menjadi 36.776 pasien, Tahun 2016 meningkat menjadi 48.586 pasien dan terus meningkat Tahun 2017 sebanyak 52.917 pasien dan 2018 sebanyak 53.278 pasien. Untuk rawat inap jumlahnya berfluktuasi dimana Tahun 2014 sebanyak 18.666 pasien, naik pada Tahun 2015 menjadi sebanyak 17.706 pasien, pada Tahun 2016 naik menjadi 20.181 pasien, dan turun pada Tahun 2017 menjadi 18.724 pasien dan 2018 sebanyak 19.956 pasien.

Tabel 19. Kunjungan Pasien Selang Tahun 2014 – 2018

No.	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rawat Inap	18.666	17.076	20.181	18.724	19.956
2	Rawat Jalan	36.029	36.776	48.586	52.917	53.278
T o t a l		64.283	65.526	68.767	71.641	73.234

Sumber : RSUD Aloe Saboe Kota Gorontalo, 2019

2.3 Kondisi Perekonomian

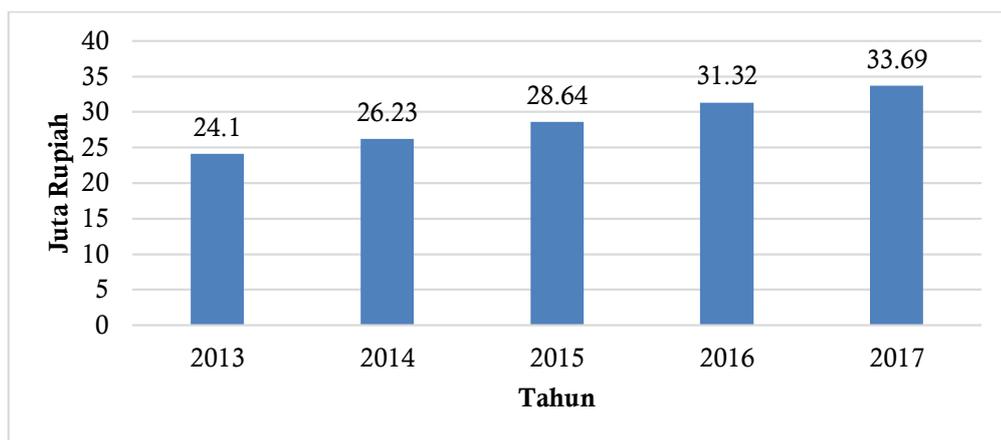
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk dapat mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah

tersebut. PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Gorontalo atas dasar harga berlaku sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar 24,10 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2017 mencapai 33,69 juta rupiah.

Gambaran tentang perkembangan tingkat PDRB per kapita selama 5 (lima) Tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 12. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 – 2017
Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2018

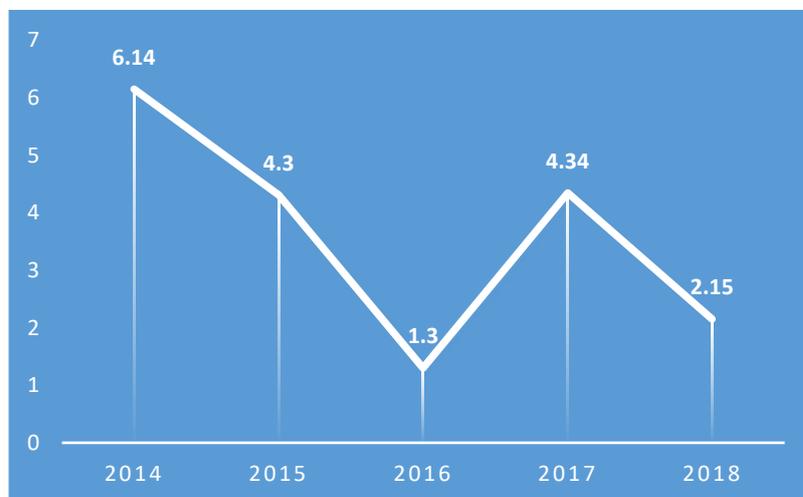
Pertumbuhan PDRB per kapita selama 5 (lima) Tahun terakhir sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 mengalami fluktuasi yaitu sebesar 7,90 persen pada Tahun 2013, meningkat menjadi 7,93 persen di Tahun 2014. Pada Tahun 2015 mengalami penurunan drastis menjadi 7,23 persen, dan meningkat kembali menjadi 7,41 persen di Tahun 2016 dan Tahun 2017 menjadi 7,43 persen.



Gambar 13. Pertumbuhan PDRB Kota Gorontalo

Laju Inflasi

Perkembangan perekonomian global dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi di Kota Gorontalo. Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Inflasi di Kota Gorontalo pada Tahun 2013 sebesar 5,84% dan Tahun 2014 inflasi naik menjadi 6,14%, pada Tahun 2015 turun kembali sebesar 4,30%. Pada Tahun 2016 menurun menjadi 1,30%. Pada Tahun 2017 meningkat kembali menjadi sebesar 4,34% dan turun menjadi 2,15 pada tahun 2018.



Gambar 14. Laju Inflasi Kota Gorontalo Tahun 2014 - 2018

Koefisien Gini

Koefisien Gini atau indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisien gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.



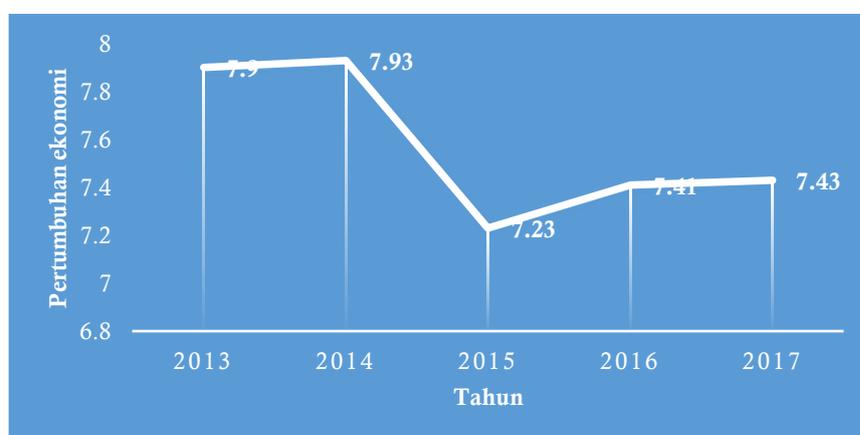
Gambar 15. Grafik Koefisien Gini Kota Gorontalo Tahun 2014 – 2018
(Sumber: BPS Kota Gorontalo, 2019)

Data pada Gambar 16 menunjukkan bahwa koefisien gini di Kota Gorontalo menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara tingkat pendapatan juga semakin menurun. Koefisien Gini pada Tahun 2016 sebesar 0.43 menurun menjadi 0,38 pada Tahun 2018

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo cenderung stabil, terlihat selama 5 (lima) Tahun terakhir pertumbuhan ekonomi sebesar 7,90 persen pada Tahun 2013, meningkat menjadi 7,93 persen di Tahun 2014. Lalu pada Tahun

2015 turun menjadi 7,23 persen dan meningkat kembali menjadi 7,41 persen di Tahun 2016 dan Tahun 2017 cenderung naik menjadi 7,43 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo didominasi oleh sektor perdagangan sebesar 14,59 persen dan disusul sektor konstruksi sebesar 14,08 persen. Peranan yang besar dari kedua sektor tersebut sejalan dengan kedudukan Kota Gorontalo sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan di wilayah Provinsi Gorontalo dan sekitarnya, dimana dapat dilihat bahwa sedang terjadi pembangunan pusat-pusat perdagangan baru dan infrastruktur yang terus dibenahi. Relatif stabilnya pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo antara lain juga karena didukung oleh iklim investasi di berbagai sektor yang kondusif, sehingga banyak pihak swasta yang menanamkan modalnya baik dalam skala kecil, menengah maupun besar, antara lain dibidang perdagangan, perumahan, perhotelan, dan lain-lain.



Gambar 16. Pertumbuhan Ekonomi Kota Gorontalo 2013-2017 (persen)
Sumber: BPS Kota Gorontalo, 2018

Kemiskinan

Kondisi kemiskinan Kota Gorontalo dari Tahun ke Tahun sangat berfluktuatif. Jika dilihat dari data BPS Kota Gorontalo, angka kemiskinan Kota Gorontalo pada Tahun 2013 berada pada angka 5.99%, kemudian di Tahun 2014 turun menjadi 5,85% hingga pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 bertahan pada angka 6.05%. Pada Tahun 2017 turun menjadi 5.7% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan 5.57%. Untuk jumlah penduduk miskin Kota

Gorontalo mengalami lonjakan pada Tahun 2015 yaitu sebesar 12.180 jiwa, hal ini bila dibandingkan dengan jumlah pada Tahun 2013 sebesar 11.670 jiwa serta Tahun 2014 sebesar 11.640 jiwa penduduk miskin. Pada Tahun 2016 dan Tahun 2015 meski angka kemiskinan berada pada 6.05% tapi jumlah penduduk miskin pada Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 12.430 jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin terjadi pada Tahun 2017 menjadi sebesar 11.950 jiwa dan pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 11.910 jiwa.

Begitu juga dengan kedalaman kemiskinan berfluktuatif. Di Tahun 2013 indeks kedalaman kemiskinan Kota Gorontalo sebesar 0,56 dan Tahun 2014 naik menjadi 0,76, untuk Tahun 2015 terjadi penurunan tipis menjadi 0,72 dan tahun berikutnya yakni Tahun 2016 indeks ini naik drastis menjadi 1,08. Pada Tahun 2017 turun menjadi sebesar 0,6 dan pada tahun 2018 naik menjadi 0.83.

Hal yang sama juga terjadi pada indeks keparahan kemiskinan, dimana pada Tahun 2013 sebesar 0.08, Tahun 2014 naik menjadi 0.19, terjadi penurunan tipis di Tahun berikutnya yakni Tahun 2015 menjadi 0.15. Indeks ini mengalami kenaikan drastis pada Tahun 2016 sebesar 0.28, kemudian pada Tahun 2017 turun lagi menjadi 0.14. Pada Tahun 2018 mengalami kenaikan tipis sebesar 0.19%.

Data diatas mengartikan bahwa jika kondisi kemiskinan Kota Gorontalo ini tidak segera diantisipasi maka akan menimbulkan dampak yang kurang bagus bagi perkembangan Kota Gorontalo.

Tabel 20. Data Kemiskinan Kota Gorontalo Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah penduduk miskin	11.64	12.18	12.43	11.95	11.91
Persentase Penduduk Miskin	5.85%	6.05%	6.05%	5.7%	5.57%
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	0,76	0,72	1,08	0,6	0,83
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,19	0,15	0,28	0,14	0,19

Sumber : BPS Kota Gorontalo

2.4 Kondisi Lingkungan Hidup

2.4.1 Deskripsi Daya Dukung dan Daya Tampung (D3TLH) Jasa Ekosistem

Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan

Ekosistem menyediakan kondisi untuk penyediaan pangan baik melalui penanaman, pengumpulan, perburuan maupun pengumpulan makanan. Pangan yang dimaksud dalam jasa ekosistem ini meliputi hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian & perkebunan untuk pangan, dan hasil peternakan.

Pangan merupakan kebutuhan primer bagi manusia sehingga penyediaan pangan sangat penting diperhatikan oleh setiap daerah. Fungsi penyediaan pangan oleh ekosistem di suatu wilayah harus dijaga dan diperhatikan kelestariannya untuk menjamin ketersediaan pangan bagi penduduk di wilayah tersebut. Jenis produksi bahan pangan yang tersedia di Kota Gorontalo meliputi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, sayuran (cabe, kentang, tomat, kubis, dan petsai), buah-buahan (manga, jeruk, pisang, papaya, nanas, dan nangka), produk peternakan (sapi, kerbau, kambing, dan kuda), produk unggas (ayam, itik, telur), dan produksi perikanan (BPS Kota Gorontalo, 2018).

Hasil analisis jasa lingkungan pada fungsi penyediaan pangan disajikan pada **Tabel 21** dan **Gambar 18** Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa 23.03% wilayah Kota Gorontalo memiliki fungsi penyediaan pangan sangat rendah, 7.54% rendah, 26.85% sedang, 41.77% tinggi dan 0.80% sangat tinggi. Jasa penyediaan pangan yang tinggi seluas 2,952.39 Ha sedangkan yang memiliki nilai sangat tinggi seluas 56.76 Ha.

Tabel 21. Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Kota Gorontalo

DISTRIBUSI LUAS JASA LINGKUNGAN PENYEDIAAN FUNGSI EKOSISTEM PENYEDIAAN PANGAN KOTA GORONTALO BERDASARKAN ADMINISTRASI													
NO	KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		TOTAL	
		(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%
1	Dumbo Raya	28.27	0.40%	109.61	1.55%	588.60	8.33%	684.15	9.68%	5.27	0.07%	1,415.90	20.03%
2	Dungingi	261.92	3.71%	1.56	0.02%	50.46	0.71%	141.46	2.00%	10.68	0.15%	466.07	6.59%
3	Hulonthalangi	-	0.00%	139.65	1.98%	552.63	7.82%	511.04	7.23%	13.57	0.19%	1,216.90	17.22%
4	Kota Barat	68.45	0.97%	166.31	2.35%	470.93	6.66%	660.70	9.35%	16.50	0.23%	1,382.88	19.57%
5	Kota Selatan	199.31	2.82%	60.58	0.86%	15.19	0.21%	5.83	0.08%	2.20	0.03%	283.11	4.01%
6	Kota Tengah	345.05	4.88%	-	0.00%	43.74	0.62%	92.45	1.31%	-	0.00%	481.23	6.81%
7	Kota Timur	251.10	3.55%	39.02	0.55%	53.52	0.76%	170.00	2.41%	-	0.00%	513.63	7.27%
8	Kota Utara	249.28	3.53%	3.48	0.05%	61.00	0.86%	517.56	7.32%	4.64	0.07%	835.97	11.83%
9	Sipatana	224.05	3.17%	12.89	0.18%	61.89	0.88%	169.20	2.39%	3.89	0.06%	471.92	6.68%
TOTAL		1,627.42	23.03%	533.10	7.54%	1,897.95	26.85%	2,952.39	41.77%	56.76	0.80%	7,067.61	100%

Jasa Lingkungan Penyediaan Air

Air memiliki fungsi yang sangat vital bagi semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Tanpa air maka semua makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Ekosistem memberikan jasa lingkungan penyediaan air tanah baik berupa penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya) maupun penyediaan air dari sumber permukaan.

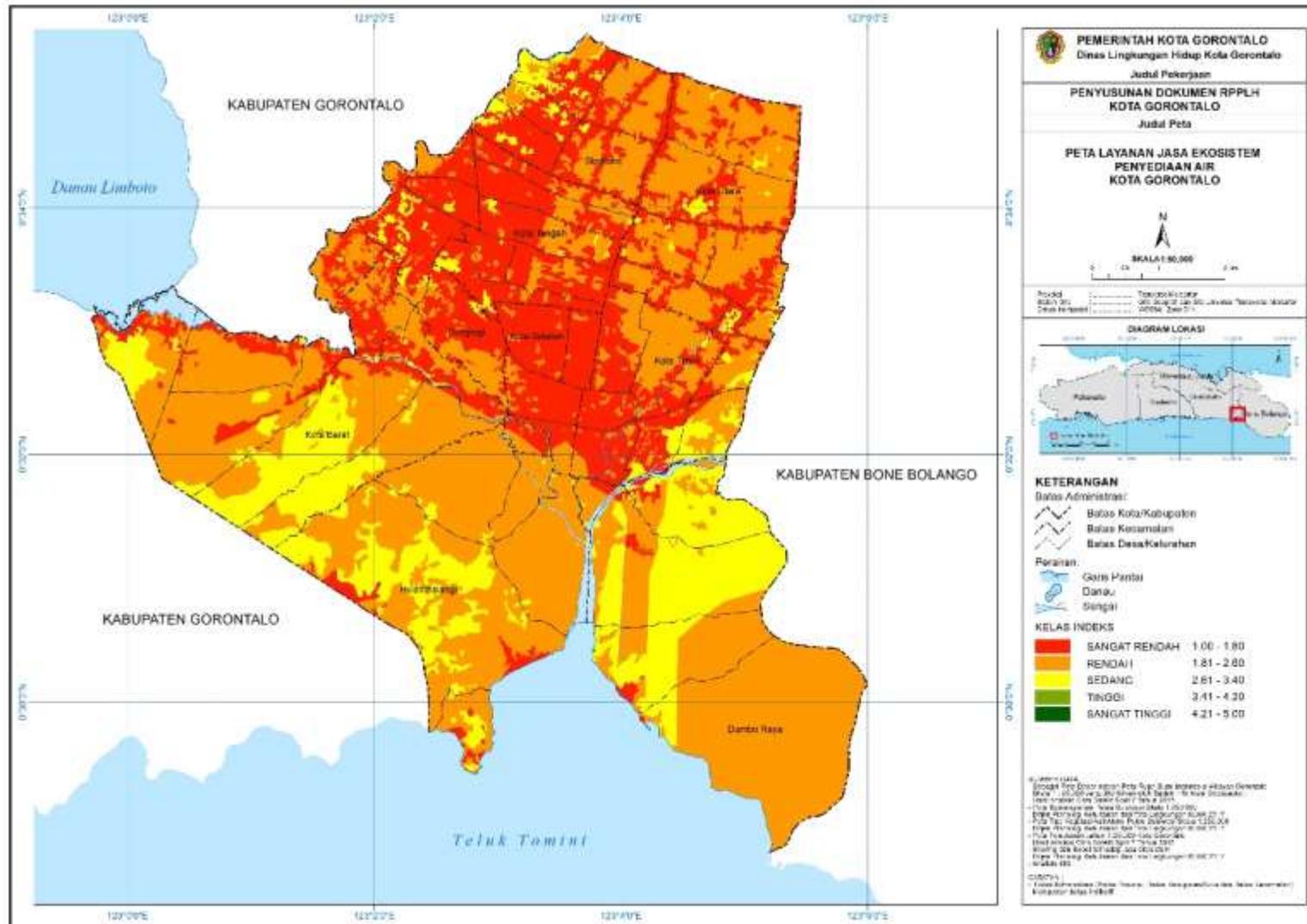
Secara umum sumberdaya air dibedakan menjadi dua yaitu air tanah dan air permukaan. Air tanah merupakan air yang berada di bawah permukaan tanah yang tersimpan dalam lapisan tanah/batuan. Sedangkan air permukaan merupakan air yang berada di permukaan bumi yang tidak mengalami infiltrasi ke bawah tanah meliputi sungai, danau, waduk, rawa dan badan air lain.

Bagi manusia, sumberdaya air bukan hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan domestic rumah tangga, namun juga dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi lainnya. Kegiatan ekonomi tersebut diantaranya pertanian, perkebunan, perikanan, industri, jasa, pariwisata, dan sebagainya. Mengingat pentingnya air bagi kehidupan manusia maka sumberdaya air perlu dijaga untuk menjamin kelestariannya.

Fungsi penyediaan air di Kota Gorontalo disajikan pada Tabel 22 dan Gambar 19. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa 26.74% wilayah Kota Gorontalo memiliki fungsi penyediaan air sangat rendah, 54.06% rendah, 17.67% sedang, 0,58% tinggi dan 0.95% sangat tinggi. Jasa penyediaan air yang tinggi seluas 41.21 Ha sedangkan yang memiliki nilai sangat tinggi seluas 67.41 Ha.

Tabel 22. Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Air Kota Gorontalo

DISTRIBUSI LUAS JASA LINGKUNGAN PENYEDIAAN FUNGSI EKOSISTEM PENYEDIAAN AIR KOTA GORONTALO BERDASARKAN ADMINISTRASI													
NO	KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		TOTAL	
		(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%
1	Dumbo Raya	28.27	0.40%	885.05	12.52%	476.71	6.75%	6.44	0.09%	19.44	0.28%	1,415.90	20.03%
2	Dungingi	293.96	4.16%	141.35	2.00%	27.12	0.38%	3.64	0.05%	-	0.00%	466.07	6.59%
3	Hulonthalangi	37.62	0.53%	907.40	12.84%	252.14	3.57%	0.06	0.00%	19.68	0.28%	1,216.90	17.22%
4	Kota Barat	209.71	2.97%	784.67	11.10%	342.80	4.85%	22.50	0.32%	23.19	0.33%	1,382.88	19.57%
5	Kota Selatan	238.82	3.38%	42.15	0.60%	0.00	0.00%	1.44	0.02%	0.70	0.01%	283.11	4.01%
6	Kota Tengah	348.81	4.94%	116.06	1.64%	16.36	0.23%	-	0.00%	-	0.00%	481.23	6.81%
7	Kota Timur	251.10	3.55%	210.96	2.98%	43.54	0.62%	5.20	0.07%	2.83	0.04%	513.63	7.27%
8	Kota Utara	252.77	3.58%	551.81	7.81%	31.00	0.44%	0.39	0.01%	-	0.00%	835.97	11.83%
9	Sipatana	228.76	3.24%	181.03	2.56%	59.02	0.84%	1.55	0.02%	1.56	0.02%	471.92	6.68%
TOTAL		1,889.82	26.74%	3,820.48	54.06%	1,248.70	17.67%	41.21	0.58%	67.41	0.95%	7,067.61	100%



Gambar 18. Peta Layanan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Kota Gorontalo

Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara

Kualitas udara merupakan faktor lingkungan yang sangat penting sehingga dimasukkan sebagai salah satu komponen dalam penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Kualitas udara menunjukkan kondisi eksisting pengelolaan pencemaran udara di suatu wilayah. Kualitas udara dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat dan tingkat kenyamanan hidup. Kualitas udara ditentukan oleh banyak hal diantaranya jenis penggunaan lahan, jumlah kendaraan bermotor, bentuk pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara.

Ekosistem memiliki mekanisme dalam pengaturan kualitas udara dan kapasitas kimia udara yang memberikan manfaat bagi manusia. Kualitas udara dipengaruhi pemanfaatan lahan oleh manusia, serta jumlah polutan yang diemisikan ke udara oleh sumber pencemar yang ada. Dalam analisis jasa lingkungan, faktor yang mendominasi pengaruh kualitas udara adalah penutup lahan, diikuti dengan tipe vegetasi alami, dan jenis bentang lahan.

Fungsi pengaturan kualitas udara di Kota Gorontalo disajikan pada Tabel 23 dan Gambar 20. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa tingkat pengaturan kualitas udara oleh ekosistem di Gorontalo berkisar pada kategori sangat rendah hingga tinggi yaitu 0.91% wilayah Kota Gorontalo memiliki fungsi pengaturan kualitas udara sangat rendah, 65.11% rendah, 14.48% sedang, 19.50 % tinggi. Berdasarkan peta pengaturan kualitas udara jasa pengaturan didominasi oleh tingkat rendah, jasa pengaturan yang tinggi terdapat di Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Hulonthalangi dan Kecamatan Dumbo Raya yang mempunyai penutup lahan berupa hutan.

Tabel 23. Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara Kota Gorontalo

DISTRIBUSI LUAS KINERJA JASA LINGKUNGAN PENGATURAN FUNGSI EKOSISTEM PENGATURAN KUALITAS UDARA KOTA GORONTALO BERDASARKAN ADMINISTRASI													
NO	KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		TOTAL	
		(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%
1	Dumbo Raya	2.25	0.03%	518.28	7.33%	54.79	0.78%	840.58	11.89%	-	0.00%	1,415.90	20.03%
2	Dungingi	35.88	0.51%	398.28	5.64%	28.28	0.40%	3.64	0.05%	-	0.00%	466.07	6.59%
3	Hulonthalangi	-	0.00%	667.55	9.45%	267.37	3.78%	281.98	3.99%	-	0.00%	1,216.90	17.22%
4	Kota Barat	7.07	0.10%	630.79	8.93%	506.70	7.17%	238.32	3.37%	-	0.00%	1,382.88	19.57%
5	Kota Selatan	0.74	0.01%	280.22	3.96%	0.01	0.00%	2.14	0.03%	-	0.00%	283.11	4.01%
6	Kota Tengah	2.87	0.04%	458.24	6.48%	20.13	0.28%	-	0.00%	-	0.00%	481.23	6.81%
7	Kota Timur	4.84	0.07%	445.55	6.30%	55.21	0.78%	8.03	0.11%	-	0.00%	513.63	7.27%
8	Kota Utara	10.65	0.15%	795.08	11.25%	29.85	0.42%	0.39	0.01%	-	0.00%	835.97	11.83%
9	Sipatana	0.17	0.00%	407.67	5.77%	60.97	0.86%	3.11	0.04%	-	0.00%	471.92	6.68%
	TOTAL	64.47	0.91%	4,601.65	65.11%	1,023.30	14.48%	1,378.19	19.50%	-	0.00%	7,067.61	100%

Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Alam Banjir

Jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana yang disediakan oleh ekosistem yaitu infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari bencana banjir, tanah longsor dan kebakaran. Hasil perhitungan jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana banjir, tanah longsor dan kebakaran disajikan pada Tabel 24, Tabel 25 dan Tabel 26.

Berdasarkan Tabel 24, jasa lingkungan pengaturan perlindungan bencana banjir Kota Gorontalo didominasi oleh tingkat sangat rendah dan rendah yaitu 43.86% dan 34.49%. Wilayah yang memiliki jasa lingkungan rendah pada umumnya memiliki penutup lahan berupa pemukiman dan tempat kegiatan, lahan terbuka, pemakaman, sawah, semak belukar, tegalan, empang dan jembatan. Sedangkan wilayah yang memiliki jasa lingkungan tinggi yaitu danau/situ, hutan dan sungai.

Tabel 24. Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Perlindungan Bencana Banjir Kota Gorontalo

DISTRIBUSI LUAS KINERJA JASA LINGKUNGAN PENGATURAN FUNGSI EKOSISTEM PENGATURAN PERLINDUNGAN BENCANA BANJIR KOTA GORONTALO BERDASARKAN ADMINISTRASI													
NO	KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		TOTAL	
		(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%
1	Dumbo Raya	127.93	1.81%	444.05	6.28%	3.35	0.05%	311.70	4.41%	528.88	7.48%	1,415.90	20.03%
2	Dungingi	449.02	6.35%	13.42	0.19%	-	0.00%	3.64	0.05%	-	0.00%	466.07	6.59%
3	Hulonthalangi	-	0.00%	917.97	12.99%	16.95	0.24%	64.79	0.92%	217.20	3.07%	1,216.90	17.22%
4	Kota Barat	155.10	2.19%	858.54	12.15%	130.92	1.85%	225.52	3.19%	12.80	0.18%	1,382.88	19.57%
5	Kota Selatan	215.08	3.04%	65.88	0.93%	0.01	0.00%	1.54	0.02%	0.61	0.01%	283.11	4.01%
6	Kota Tengah	477.47	6.76%	3.76	0.05%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	481.23	6.81%
7	Kota Timur	423.57	5.99%	80.93	1.15%	1.10	0.02%	8.03	0.11%	-	0.00%	513.63	7.27%
8	Kota Utara	823.96	11.66%	11.62	0.16%	-	0.00%	0.39	0.01%	-	0.00%	835.97	11.83%
9	Sipatana	427.42	6.05%	41.39	0.59%	-	0.00%	3.11	0.04%	-	0.00%	471.92	6.68%
TOTAL		3,099.54	43.86%	2,437.56	34.49%	152.32	2.16%	618.71	8.75%	759.48	10.75%	7,067.61	100%

Tabel 24 menunjukkan jasa lingkungan pengaturan perlindungan bencana longsor Kota Gorontalo. Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kota Gorontalo didominasi jasa lingkungan pengaturan perlindungan banjir rendah yaitu 51.24%. Wilayah yang memiliki jasa lingkungan rendah merupakan wilayah dengan penutup lahan berupa pemukiman dan tempat kegiatan, lahan terbuka, kebun campuran, pemakaman, sawah, semak belukar, dan tegalan. Sedangkan wilayah yang memiliki jasa lingkungan sangat tinggi yaitu danau/situ dan sungai.

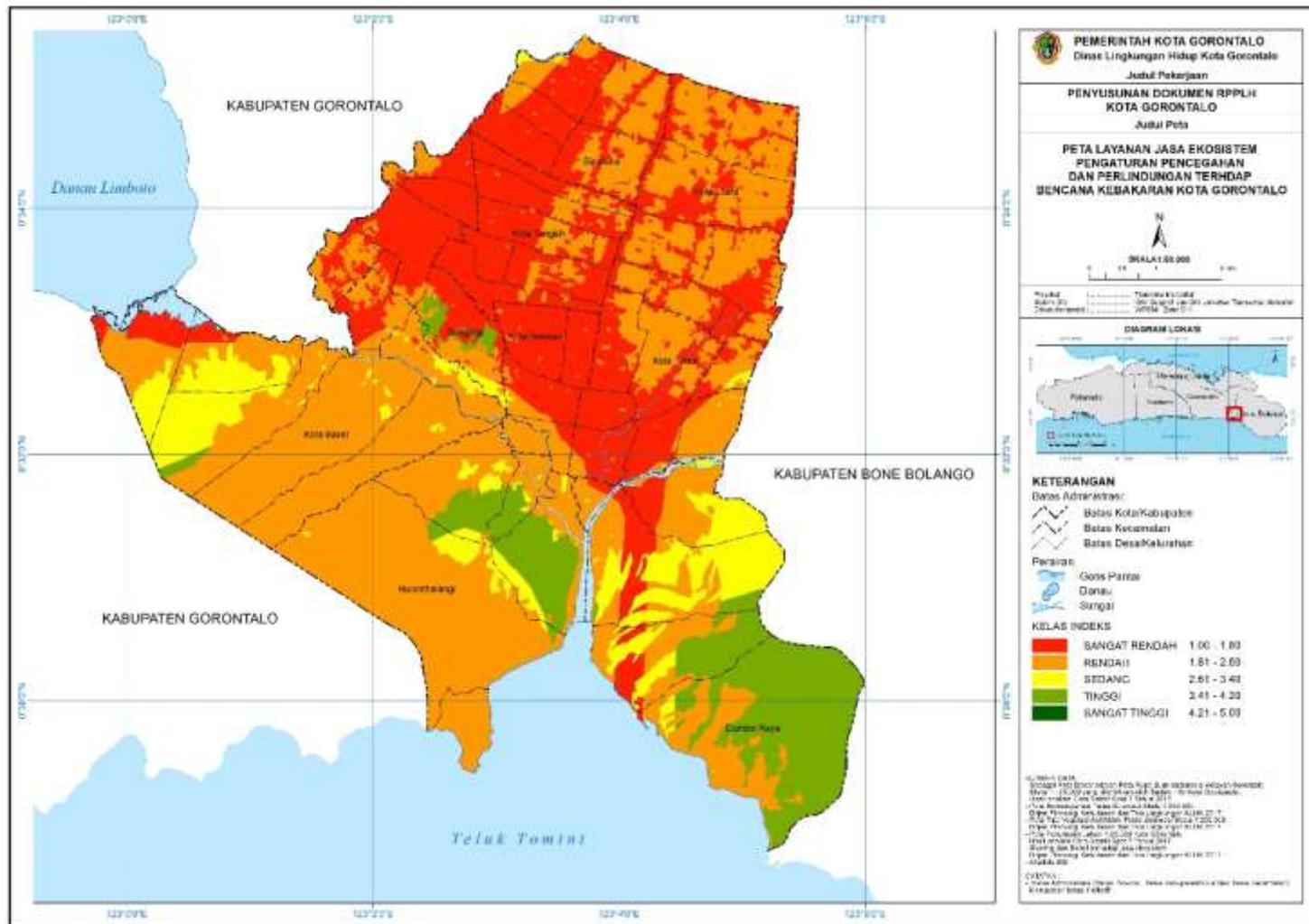
Tabel 25. Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Perlindungan Bencana Longsor Kota Gorontalo

DISTRIBUSI LUAS KINERJA JASA LINGKUNGAN PENGATURAN FUNGSI EKOSISTEM PENGATURAN PERLINDUNGAN BENCANA LONGSOR KOTA GORONTALO BERDASARKAN ADMINISTRASI													
NO	KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		TOTAL	
		(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%
1	Dumbo Raya	-	0.00%	237.44	3.36%	1,152.59	16.31%	-	0.00%	25.87	0.37%	1,415.90	20.03%
2	Dungingi	-	0.00%	422.40	5.98%	40.03	0.57%	-	0.00%	3.64	0.05%	466.07	6.59%
3	Hulonthalangi	-	0.00%	139.65	1.98%	1,057.51	14.96%	-	0.00%	19.74	0.28%	1,216.90	17.22%
4	Kota Barat	-	0.00%	326.39	4.62%	1,010.79	14.30%	36.90	0.52%	8.79	0.12%	1,382.88	19.57%
5	Kota Selatan	-	0.00%	275.66	3.90%	5.31	0.08%	-	0.00%	2.14	0.03%	283.11	4.01%
6	Kota Tengah	-	0.00%	481.23	6.81%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	481.23	6.81%
7	Kota Timur	-	0.00%	462.58	6.55%	43.02	0.61%	-	0.00%	8.03	0.11%	513.63	7.27%
8	Kota Utara	-	0.00%	830.94	11.76%	4.64	0.07%	-	0.00%	0.39	0.01%	835.97	11.83%
9	Sipatana	-	0.00%	445.02	6.30%	23.79	0.34%	-	0.00%	3.11	0.04%	471.92	6.68%
	TOTAL	-	0.00%	3,621.31	51.24%	3,337.68	47.22%	36.90	0.52%	71.72	1.01%	7,067.61	100%

Berdasarkan Tabel 25, jasa lingkungan pengaturan perlindungan bencana kebakaran Kota Gorontalo didominasi oleh tingkat rendah yaitu 50.00%.

Tabel 26. Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Perlindungan Bencana Kebakaran Kota Gorontalo

DISTRIBUSI LUAS KINERJA JASA LINGKUNGAN PENGATURAN FUNGSI EKOSISTEM PENGATURAN PERLINDUNGAN BENCANA KEBAKARAN KOTA GORONTALO BERDASARKAN ADMINISTRASI													
NO	KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		TOTAL	
		(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%
1	Dumbo Raya	125.67	1.78%	444.13	6.28%	296.61	4.20%	530.05	7.50%	19.44	0.28%	1,415.90	20.03%
2	Dungingi	304.92	4.31%	117.50	1.66%	10.69	0.15%	32.96	0.47%	-	0.00%	466.07	6.59%
3	Hulonthalangi	-	0.00%	911.91	12.90%	81.60	1.15%	203.65	2.88%	19.74	0.28%	1,216.90	17.22%
4	Kota Barat	108.84	1.54%	969.76	13.72%	280.22	3.96%	15.66	0.22%	8.41	0.12%	1,382.88	19.57%
5	Kota Selatan	209.61	2.97%	69.65	0.99%	1.71	0.02%	-	0.00%	2.14	0.03%	283.11	4.01%
6	Kota Tengah	384.63	5.44%	96.61	1.37%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	481.23	6.81%
7	Kota Timur	293.78	4.16%	210.47	2.98%	1.35	0.02%	5.20	0.07%	2.83	0.04%	513.63	7.27%
8	Kota Utara	298.90	4.23%	532.03	7.53%	4.64	0.07%	0.39	0.01%	-	0.00%	835.97	11.83%
9	Sipatana	282.58	4.00%	181.87	2.57%	4.36	0.06%	1.55	0.02%	1.56	0.02%	471.92	6.68%
	TOTAL	2,008.93	28.42%	3,533.93	50.00%	681.17	9.64%	789.46	11.17%	54.12	0.77%	7,067.61	100%



Gambar 22. Peta Layanan Jasa Ekosistem Pengaturan Perlindungan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Gorontalo

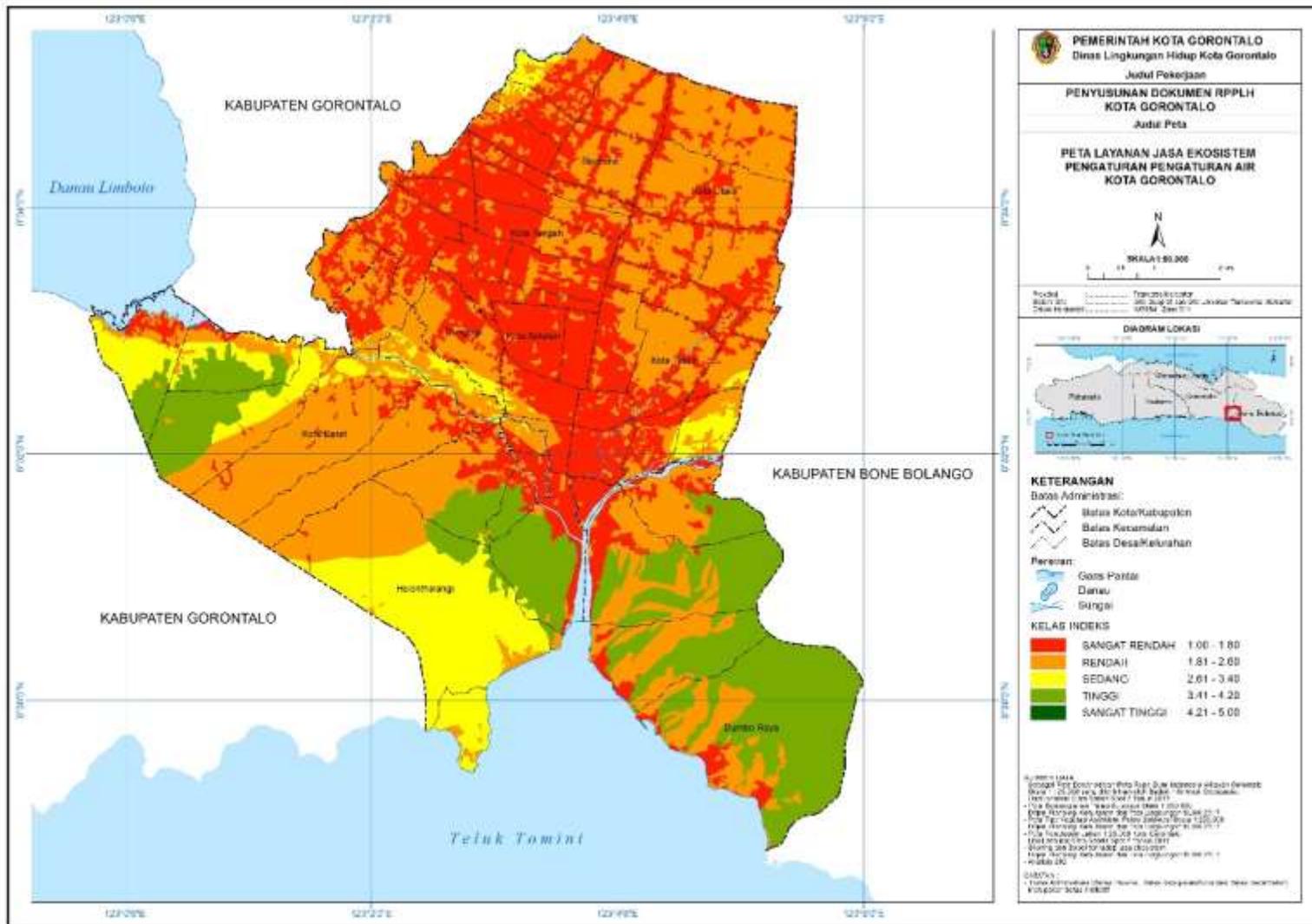
Jasa Lingkungan Pengaturan Air

Ekosistem menyediakan jasa lingkungan pengaturan air melalui mekanisme siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air. Berdasarkan terminology tersebut diketahui bahwa ekosistem memberikan manfaat berupa pengendalian banjir dan penyimpanan air. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang berasal dari permukaan bumi kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi melalui proses presipitasi yang berlangsung secara terus menerus. Tahapan siklus hidrologi meliputi evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, sublimasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, run off, dan infiltrasi.

Berdasarkan Tabel 27, jasa lingkungan pengaturan air Kota Gorontalo didominasi oleh tingkat rendah yaitu 41.27%. Wilayah yang memiliki jasa lingkungan rendah pada umumnya memiliki penutup lahan berupa pemukiman dan tempat kegiatan, lahan terbuka, pemakaman, sawah, semak belukar, tegalan, empang dan jembatan. Sedangkan wilayah yang memiliki jasa lingkungan tinggi yaitu danau/situ, hutan dan sungai.

Tabel 27. Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Air Kota Gorontalo

DISTRIBUSI LUAS KINERJA JASA LINGKUNGAN PENGATURAN FUNGSI EKOSISTEM PENGATURAN AIR KOTA GORONTALO BERDASARKAN ADMINISTRASI													
NO	KECAMATAN	SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		TOTAL	
		(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%	(Ha)	%
1	Dumbo Raya	137.88	1.95%	437.44	6.19%	-	0.00%	840.58	11.89%	-	0.00%	1,415.90	20.03%
2	Dungingi	261.92	3.71%	189.81	2.69%	10.70	0.15%	3.64	0.05%	-	0.00%	466.07	6.59%
3	Hulonthalangi	117.11	1.66%	327.21	4.63%	490.59	6.94%	281.93	3.99%	0.06	0.00%	1,216.90	17.22%
4	Kota Barat	118.38	1.67%	760.23	10.76%	245.61	3.48%	250.68	3.55%	7.99	0.11%	1,382.88	19.57%
5	Kota Selatan	220.38	3.12%	56.11	0.79%	4.48	0.06%	0.70	0.01%	1.44	0.02%	283.11	4.01%
6	Kota Tengah	345.05	4.88%	136.18	1.93%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	481.23	6.81%
7	Kota Timur	259.71	3.67%	207.48	2.94%	38.41	0.54%	7.86	0.11%	0.18	0.00%	513.63	7.27%
8	Kota Utara	249.28	3.53%	581.66	8.23%	4.64	0.07%	0.39	0.01%	-	0.00%	835.97	11.83%
9	Sipatana	224.05	3.17%	220.97	3.13%	23.79	0.34%	1.55	0.02%	1.56	0.02%	471.92	6.68%
TOTAL		1,933.76	27.36%	2,917.10	41.27%	818.22	11.58%	1,387.32	19.63%	11.22	0.16%	7,067.61	100%



Gambar 23. Peta Layanan Jasa Ekosistem Pengaturan Air Kota Gorontalo

Rekapitulasi Daya Dukung Jasa Ekosistem Kota Gorontalo

Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada kegiatan ini ditentukan dengan pendekatan jasa ekosistem. Semakin tinggi nilai jasa ekosistem, maka semakin tinggi pula kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Berdasarkan P3E Sumatera (2011), penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan pendekatan konsep jasa ekosistem, dengan pengembangan asumsi dasar:

- Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya (lihat jasa penyediaan, Jasa budaya, dan pendukung)
- Semakin tinggi jasa ekosistem suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (lihat jasa pengaturan)

Hasil perhitungan jasa ekosistem berupa nilai indeks yang merupakan representasi dari tinggi rendahnya nilai jasa ekosistem pada suatu wilayah. Nilai indeks jasa ekosistem berkisar antara 0 (sangat rendah) dan 1 (sangat tinggi), yang ditampilkan menurut administrasi dan ekoregion. Berdasarkan nilai indeks tersebut, kondisi jasa ekosistem dibagi dalam 5 (lima) kriteria berikut; Sangat Rendah (SR), Rendah (R), Sedang (S), Tinggi (T) dan Sangat Tinggi (ST). Hasil rekapitulasi perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk Jasa Ekosistem Kota Gorontalo ditunjukkan pada Tabel 28.

Tabel 28. Rekapitulasi Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem Kota Gorontalo

No	JASA EKOSISTEM	LUAS DAYA DUKUNG JASA EKOSISTEM										TOTAL
		SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	
1	Penyediaan pangan	1627.42	23.03	533.10	7.54	1897.9	26.85	2952.4	41.77	56.76	0.80%	7067.6
2	Penyediaan air bersih	1889.82	26.74	3820.5	54.06	1248.7	17.67	41.21	0.58	67.41	0.95%	7067.6
3	Penyediaan serat	2718.05	38.46	2879.4	40.74	201.22	2.85	1268.9	17.95	0.00	0.00%	7067.6
4	Pengaturan kualitas udara	64.47	0.91	4601.6	65.11	1023.3	14.48	1378.2	19.50	0.00	0.00%	7067.6
5	Pengaturan iklim	1656.75	23.44	1604.0	22.70	2462.1	34.84	1344.7	19.03	0.00	0.00%	7067.6

No	JASA EKOSISTEM	LUAS DAYA DUKUNG JASA EKOSISTEM										TOTAL
		SANGAT RENDAH		RENDAH		SEDANG		TINGGI		SANGAT TINGGI		
		(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	
6	Pengaturan mitigasi bencana longsor	0.00	0.00%	3621.31	51.24%	3337.68	47.22%	36.90	0.52%	71.72	1.01%	7067.61
7	Pengaturan mitigasi bencana banjir	3099.54	43.86%	2437.56	34.49%	152.32	2.16%	618.71	8.75%	759.48	10.75%	7067.61
8	Pengaturan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan	2008.93	28.42%	3533.93	50.00%	681.17	9.64%	789.46	11.17%	54.12	0.77%	7067.61
9	Pengaturan air	1933.76	27.36%	2917.10	41.27%	818.22	11.58%	1387.32	19.63%	11.22	0.16%	7067.61
10	Pengaturan pemurnian air	3893.20	55.09%	919.39	13.01%	2209.69	31.27%	45.33	0.64%	0.00	0.00%	7067.61
11	Pengaturan penyerbukan alami	3226.37	45.65%	2458.80	34.79%	77.58	1.10%	1304.87	18.46%	0.00	0.00%	7067.61
12	Pengaturan pengendalian hama	0.00	0.00%	4330.67	61.27%	1432.08	20.26%	1304.87	18.46%	0.00	0.00%	7067.61
13	Pendukung habitat dan keanekaragaman hayati	101.70	1.44%	4453.09	63.01%	1134.64	16.05%	1307.42	18.50%	70.77	1.00%	7067.61
14	Pendukung pembentukan dan regenerasi tanah	3112.41	44.04%	2104.34	29.77%	837.22	11.85%	1013.6	14.34%	0.00	0.00%	7067.61

Sumber : Data Daya Dukung Daya Tampung LH Kota Gorontalo, 2018

Tabel 28 menunjukkan bahwa daya dukung jasa ekosistem pada kelas sangat tinggi memiliki luasan yang sangat rendah, pada umumnya seluas $\leq 1\%$ dari luas wilayah Kota Gorontalo. Luasan tertinggi pada kelas sangat tinggi yaitu jasa ekosistem pengaturan mitigasi bencana banjir yaitu sebesar 10.75% dari wilayah Kota Gorontalo. Daya dukung jasa ekosistem Kota Gorontalo pada kelas tinggi memiliki luas yang bervariasi namun pada umumnya seluas $<20\%$ dari luas wilayah Kota Gorontalo. Namun ada yang menarik pada kelas tinggi karena jasa ekosistem penyediaan pangan menempati area seluas 2952.39 Ha atau 41.77% dari total keseluruhan wilayah Kota Gorontalo. Hal demikian karena pada penghitungan jasa ekosistem penyediaan pangan bobot tertinggi ada pada penutup lahan yaitu 0,6 diikuti bentang lahan dengan bobot 0,28 dan tipe vegetasi dengan bobot 0.12. Area yang memiliki daya dukung jasa ekosistem pangan tinggi merupakan wilayah dengan penutup lahan berupa sawah, hutan dan rawa.

Kelas daya dukung sangat rendah, rendah dan sedang terdapat beberapa jasa ekosistem yang memiliki luasan $>40\%$ dan $>50\%$ dari keseluruhan wilayah. Jasa ekosistem pemurnian air kelas sangat rendah memiliki area 55.09% wilayah, jasa ekosistem pengaturan mitigasi bencana

kebakaran hutan lahan pada kelas rendah seluas 50% wilayah, jasa ekosistem pengaturan kualitas udara pada kelas rendah seluas 65.11% wilayah, dan jasa ekosistem pengaturan pengendalian hama pada kelas rendah seluas 61.27%. Jasa ekosistem pengaturan mitigasi bencana longsor pada kelas rendah seluas 51.24% dan kelas sedang seluas 47.22%.

Analisis Nilai Optimal Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem

Analisis nilai optimal dilaksanakan untuk mengetahui kondisi daya dukung lingkungan hidup Kota Gorontalo berbasis jasa ekosistem. Hasil analisis nilai optimal daya dukung lingkungan hidup Kota Gorontalo disajikan pada Tabel 29, sedangkan grafik persentase kondisi daya dukung lingkungan hidup Kota Gorontalo disajikan pada Gambar 25.

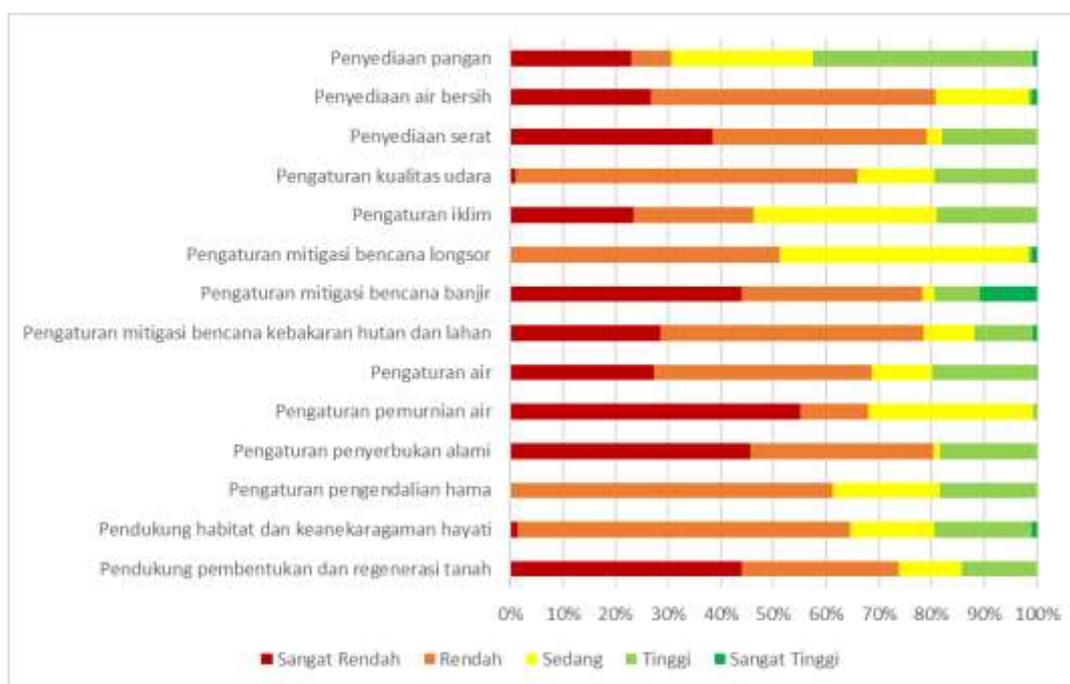
Tabel 29. Nilai Optimal Daya Dukung Jasa Ekosistem Kota Gorontalo

No	JASA EKOSISTEM	Luas Daya Dukung Jasa Ekosistem (%)					Nilai Optimal	Kondisi
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi		
1	Penyediaan pangan	23.03%	7.54%	26.85%	41.77%	0.80%	56.00%	Baik
2	Penyediaan air bersih	26.74%	54.06%	17.67%	0.58%	0.95%	10.37%	Tidak Baik
3	Penyediaan serat	38.46%	40.74%	2.85%	17.95%	0.00%	19.38%	Tidak Baik
4	Pengaturan kualitas udara	0.91%	65.11%	14.48%	19.50%	0.00%	26.74%	Tidak Baik
5	Pengaturan iklim	23.44%	22.70%	34.84%	19.03%	0.00%	36.44%	Tidak Baik
6	Pengaturan mitigasi bencana longsor	0.00%	51.24%	47.22%	0.52%	1.01%	25.15%	Tidak Baik
7	Pengaturan mitigasi bencana banjir	43.86%	34.49%	2.16%	8.75%	10.75%	20.58%	Tidak Baik
8	Pengaturan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan	28.42%	50.00%	9.64%	11.17%	0.77%	16.75%	Tidak Baik
9	Pengaturan air	27.36%	41.27%	11.58%	19.63%	0.16%	25.58%	Tidak Baik
10	Pengaturan pemurnian air	55.09%	13.01%	31.27%	0.64%	0.00%	16.27%	Tidak Baik
11	Pengaturan penyerbukan alami	45.65%	34.79%	1.10%	18.46%	0.00%	19.01%	Tidak Baik
12	Pengaturan pengendalian hama	0.00%	61.27%	20.26%	18.46%	0.00%	28.59%	Tidak Baik
13	Pendukung habitat dan keanekaragaman hayati	1.44%	63.01%	16.05%	18.50%	1.00%	27.53%	Tidak Baik
14	Pendukung pembentukan dan regenerasi tanah	44.04%	29.77%	11.85%	14.34%	0.00%	20.27%	Tidak Baik

Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kota Gorontalo, 2019

Tabel 29 menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan hidup Kota Gorontalo yang memiliki kondisi baik hanya pada jasa ekosistem penyediaan pangan dengan nilai

optimal sebesar 56%. Kondisi-kondisi tersebut disebabkan karakteristik Kota Gorontalo sebagai ibukota Provinsi Gorontalo sehingga menjadi pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, pusat perdagangan, pusat pendidikan dan pusat populasi penduduk. Karakteristik kota tersebut menjadikan bentuk penggunaan lahan di Kota Gorontalo didominasi oleh lahan terbangun sehingga skor untuk penghitungan daya dukung jasa ekosistem bernilai rendah.



Gambar 24. Grafik Persentase Kondisi Daya Dukung Berbasis Jasa Ekosistem Kota Gorontalo

(Sumber : Analisis Tim KLHS RPJMD Kota Gorontalo, 2019)

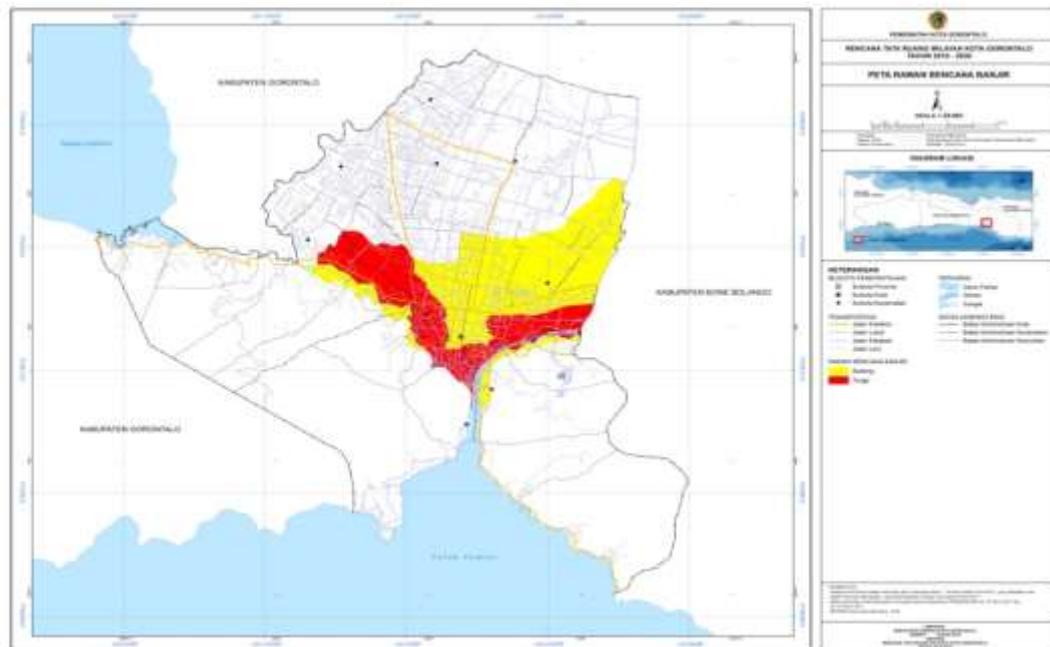
Gambar 25 menunjukkan proporsi daya dukung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem Kota Gorontalo pada kelas sangat rendah, kelas rendah, kelas sedang, kelas tinggi dan kelas sangat tinggi. Berdasarkan Gambar 15, daya dukung lingkungan Kota Gorontalo didominasi pada kelas rendah dan sangat rendah, diikuti kelas sedang, kelas tinggi dan kelas sangat tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kecermatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar daya dukung yang bernilai optimal tinggi dapat dipertahankan dan kondisi daya dukung lingkungan yang tidak baik dapat dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak terhadap lingkungan di kemudian hari.

2.4.2 Rawan Bencana

Kota Gorontalo termasuk dalam wilayah rawan bencana, dimana bencana yang sering melanda Kota Gorontalo adalah banjir, tanah longsor, gelombang pasang/tsunami dan gempa bumi.

Kawasan Rawan Banjir

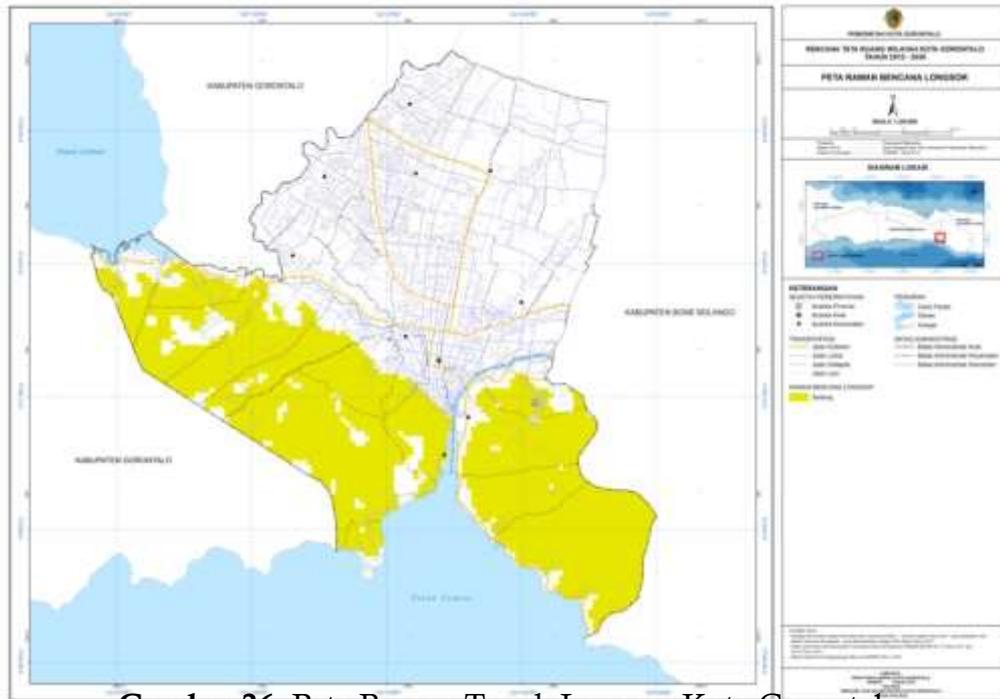
Kota Gorontalo termasuk wilayah rawan banjir karena bentuk topografi lahannya seperti mangkuk. Kawasan rawan banjir terletak di bagian tengah wilayah Kota Gorontalo, yaitu di Kecamatan Kota Timur, Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Barat, Dungingi, Kecamatan Kota Tengah, dan Kecamatan Dumbo Raya.



Gambar 25. Peta Rawan Banjir Kota Gorontalo

Kawasan rawan longsor

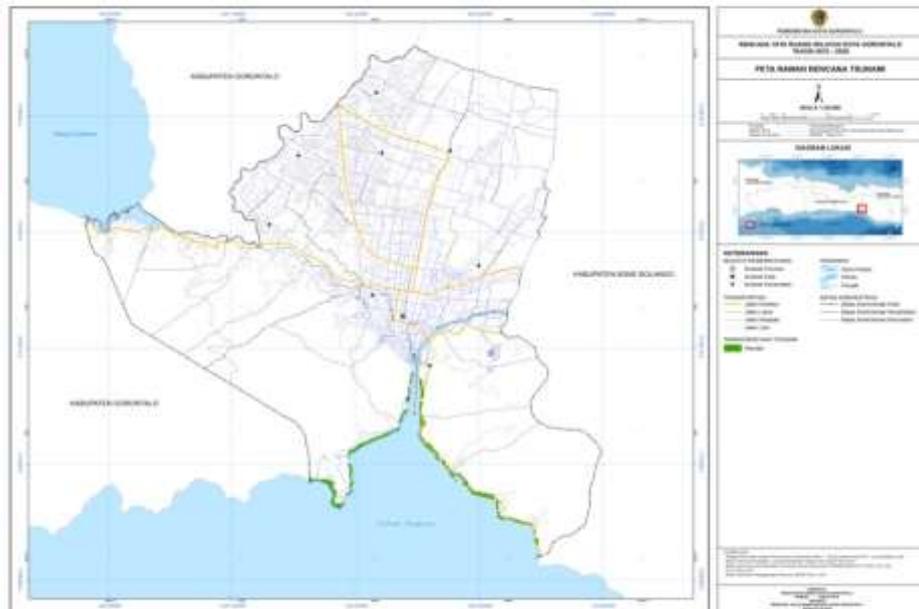
Kawasan rawan longsor terletak di Kecamatan Hulonthalangi, Kecamatan Dumbo Raya dan Kecamatan Kota Barat.



Gambar 26. Peta Rawan Tanah Longsor Kota Gorontalo

Kawasan rawan gelombang pasang/tsunami:

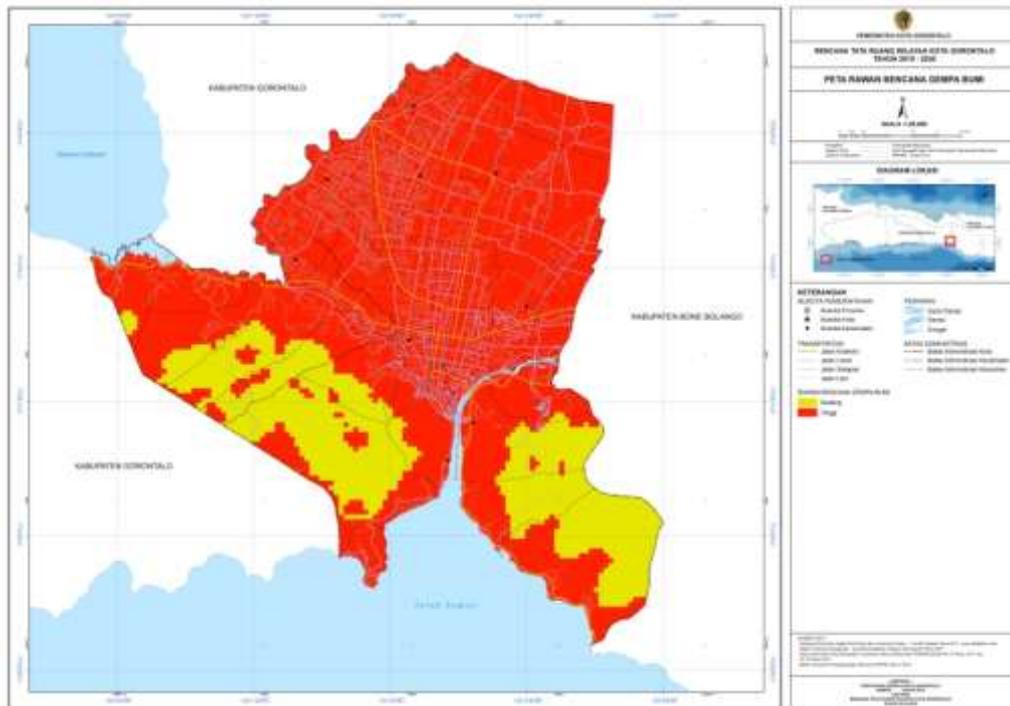
Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami terletak di kecamatan yang wilayah pesisirnya berelevasi rendah, yakni meliputi kecamatan Hulonthalangi dan Kecamatan Dumbo Raya.



Gambar 27. Peta Rawan Tsunami Kota Gorontalo

Kawasan Rawan Gempa Bumi

Kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Gorontalo dengan kategori gempa skala lebih dari VII MMI dan daerah patah sesar meliputi sebagian sebagian Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Hulonthalangi dan wilayah pesisir di Kecamatan Dumbo Raya



Gambar 28. Peta Rawan Gempa Bumi Kota Gorontalo

2.4.3 Pencemaran

Sungai Bone Sungai Bone melintasi wilayah Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo mempunyai panjang 119,13 km yang. Sungai ini termasuk tipe subsekuen-permanen dengan bentuk linier dan termasuk dalam kawasan DAS Limboto Bolango Bone. Kondisi sempadan Sungai Bone bervariasi, Pada Bagian hulu sempadan sungai dalam kondisi sehat, arus air cukup deras dan berpotensi terjadinya infiltrasi dan ruang gerak air secara lateral. Sebaliknya, pada bagian Tengah dan Hilir kondisi sempadan sungai tidak sehat, tebing sungai rapuh, kondisi penampang sungai melebar, erosi relatif horisontal dan sering terjadinya Chanel bar yang cukup luas sehingga berpotensi terjadinya

banjir. Kondisi biofisik Sungai Bone Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kedalaman pada bagian hulu mencapai 50 cm dan bagian hilir cm, lebar sungai bagian hulu 100 m dan bagian hilir 100-200 m. Kecepatan arus 1,44 m/detik bagian hulu dan 0,95 m/detik bagian hilir. Kualitas Air Sungai Bone Berdasarkan analisis hasil pemantauan tahun 2015 Status mutu air Sungai Bone Bagian Hulu sudah masuk kategori cemar sedang untuk baku mutu air Kelas I. Sedangkan untuk baku mutu air Kelas II masuk kategori cemar sedang. Beberapa parameter yang dianalisa sudah melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Untuk mutu air kelas 2, Sungai Bone bagian hulu memiliki kadar fecal coli 24.200 MPN/100 mL melebihi baku mutu 1000 MPN/100 mL, kadar Total coli >24.200 MPN/100 mL melebihi baku mutu 5000 MPN/100 mL.

Beberapa parameter lainnya masih dibawah baku mutu. Untuk air kelas II, air sungai Bone bagian hulu memiliki Oksigen terlarut, DO 8.0 mg/L, masih memenuhi syarat yakni minimal 4 mg/L. BOD <2 mg/L dengan baku mutu 3 mg/L dan COD <10 mg/L dengan baku mutu 25 mg/L. Kadar merkuri, Hg <0.00005 mg/L, masih dibawah baku mutu 0,002 mg/L. Kadar ammonia 0.02 mg/L. Kadar nitrat 0,196 mg/L masih dibawah baku mutu 10 mg/L. Kadar nitrit 0,004 dibawah baku mutu 0.06 mg/L. Kadar timbal, Pb 0,001 dibawah baku mutu 0,03 mg/L. Kadar sianida 0.01 mg/L masih dibawah baku mutu 0.02 mg/L. Berdasarkan analisis hasil pemantauan tahun 2015 Status mutu air Sungai Bone bagian tengah sudah masuk kategori cemar sedang untuk baku mutu air Kelas I maupun baku mutu air Kelas II. Beberapa parameter yang dianalisa sudah melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Untuk mutu air kelas 2, Sungai Bone bagian tengah memiliki kadar fecal coli 24.200 MPN/100 mL melebihi baku mutu 1000 MPN/100 mL, kadar Total coli >24.200 MPN/100 mL melebihi baku mutu 5000 MPN/100 mL.

Beberapa parameter lainnya masih dibawah baku mutu. Untuk air kelas II, air sungai Bone bagian tengah memiliki oksigen terlarut, DO 6.0 mg/L, masih memenuhi syarat yakni minimal 4 mg/L. BOD <2 mg/L dengan baku mutu 3 mg/L dan COD <10 mg/L dengan baku mutu 25 mg/L. Kadar merkuri, Hg

<0.00005 mg/L, masih dibawah baku mutu 0,002 mg/L. Kadar ammonia 0.02 mg/L. Kadar nitrat 0,169 mg/L masih dibawah baku mutu 10 mg/L. Kadar nitrit 0,009 dibawah baku mutu 0.06 mg/L. Kadar timbal, Pb 0,001 dibawah baku mutu 0,03 mg/L. Kadar sianida 0.005 mg/L masih dibawah baku mutu 0.02 mg/L. Berdasarkan analisis hasil pemantauan tahun 2015 Status mutu air Sungai Bone bagian hilir sudah masuk kategori cemar sedang untuk baku mutu air Kelas I maupun baku mutu air Kelas II. Beberapa parameter yang dianalisa sudah melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Untuk mutu air kelas 2, Sungai Bone bagian hilir memiliki kadar fecal coli 24.200 MPN/100 mL melebihi baku mutu 1000 MPN/100 mL dan kadar Total coli 24.200 MPN/100 mL melebihi baku mutu 5000 MPN/100 mL. Beberapa parameter lainnya masih dibawah baku mutu. Untuk air kelas II, air sungai Bone bagian hilir memiliki Oksigen terlarut, DO 8.0 mg/L, masih memenuhi syarat yakni minimal 4 mg/L. BOD <2 mg/L dengan baku mutu 3 mg/L dan COD <10 mg/L dengan baku mutu 25 mg/L. Kadar merkuri, Hg <0.00005 mg/L, masih dibawah baku mutu 0,002 mg/L. Kadar ammonia 0.13 mg/L. Kadar nitrat 0,298 mg/L masih dibawah baku mutu 10 mg/L. Kadar nitrit 0,009 dibawah baku mutu 0.06 mg/L. Kadar timbal, Pb 0,001 dibawah baku mutu 0,03 mg/L. Kadar sianida 0.005 mg/L masih dibawah baku mutu 0.02 mg/L. Status Mutu Air Sungai Bone Status mutu air Sungai Bone pada bagian Hulu, Tengah, dan Hilir pada pemantauan tahun 2015 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 30. Status Mutu Air Sungai Bone

No	Lokasi Sampling	Status Mutu Air	
		Kelas 1	Kelas 2
1.	Bagian hulu	Cemar sedang	Cemar sedang
2.	Bagian tengah	Cemar sedang	Cemar sedang
3.	Bagian hilir	Cemar sedang	Cemar sedang

Sumber : DLHK Provinsi Gorontalo, (2018)

2.4.4 Persampahan

Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan saat ini bukan hanya meningkatkan cakupannya saja namun bagaimana mengolah sampah dengan mengurangi sampah dari sumbernya sehingga berpengaruh terhadap

volume timbulan sampah yang dihasilkan dan pengurangan beban kerja tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah sehingga dapat meminimalisir kebutuhan peralatan pengumpulan dan pengangkutan yang pada akhirnya juga dapat menghemat biaya operasional.

Pemerintah Kota Gorontalo saat ini telah memiliki Masterplan Persampahan, yang senantiasa direview seiring dengan perkembangan kota yang mengalami perubahan baik itu disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk maupun perkembangan fisik kota akibat pesatnya pembangunan daerah. Peningkatan jumlah penduduk Kota yang terus bertambah menyebabkan peningkatan timbulan sampah yang berpotensi menimbulkan berbagai gangguan teknis lingkungan baik berupa pencemaran akibat sampah yang berdampak pada terganggunya kenyamanan dan kesehatan masyarakat.

Sumber timbulan sampah di Kota Gorontalo berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Tim Penyusun JAKSTRADA mengambil sampel di beberapa lokasi sebagai berikut :

1. Perumahan/Kawasan pemukiman : 10 lokasi
2. Restoran : 5 lokasi
3. Pasar : 2 lokasi
4. Kawasan Perdagangan dan Jasa : 1 lokasi
5. Hotel : 2 lokasi
6. Terminal dan Pelabuhan : 2 lokasi
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan : 16 lokasi
8. Sekolah Adiwiyata : 24 lokasi

Berikut ini data timbulan sampah per kecamatan dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 31. Timbulan Sampah Per Kecamatan Tahun 2016-2018

No	Kecamatan	2016		2017		2018	
		Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Sampah (ton)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Sampah (ton)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Sampah (ton)
1	Dungingi	23.996	16,8	24.241	16,9	25.220	17,7
2	Kota Barat	22.272	15,9	22.972	16,1	23.729	16,6
3	Kota Tengah	27.480	19,2	27.455	19,2	27.469	19,2
4	Kota Utara	18.806	13,1	19.011	13,3	19.696	13,8
5	Kota Timur	27.041	18,9	27.015	18,9	27.292	19,1
6	Kota Selatan	20.663	14,5	20.682	14,5	20.834	14,6
7	Sipatana	18.886	13,2	18.906	13,2	19.352	13,5

No	Kecamatan	2016		2017		2018	
		Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Sampah (ton)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Sampah (ton)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Sampah (ton)
8	Hulonthalangi	16.648	11,6	16.634	11,6	16.897	11,8
9	Dumbo Raya	19.176	13,4	19.140	13,4	19.278	13,5

Sumber : DLH Kota Gorontalo, 2019

Secara umum untuk semua jalur layanan sampah sudah terlayani di seluruh kecamatan walaupun belum menjangkau secara keseluruhan kawasan permukiman perumahan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan layanan angkutan sampah pada tabel berikut ini:

Tabel 32. Jalur Layanan Persampahan Kota Gorontalo Tahun 2014 – 2019

No	Jalur Layanan Persampahan	2014	2015	2016	2017	2018	Rencana 2019
1.	Jumlah Jalur Layanan Umum Persampahan	124 jalur	151 jalur	155 jalur	163 jalur	168 jalur	207 jalur
2.	Jumlah jalur layanan persampahan perumahan	15 jalur	95 Jalur	95 Jalur	95 jalur	95 jalur	107 jalur
TOTAL Target 307		134	264	268	271	272	314

Sumber: DLH Kota Gorontalo, (2017)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa setiap tahun ada peningkatan jalur layanan persampahan yang diharapkan berdampak pada kebersihan kota yang ditargetkan 65% terealisasi 59,16% sehingga masih terdapat 2,84% sampah yang belum terangkut ke TPA dari target yang di rencanakan. Tidak terangkut ini disebabkan oleh adanya pereduksi timbulan sampah melalui penerapan sistem 3R berbasis pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan Bank Sampah yang terdapat di 3 kecamatan. Pengelolaan sampah dengan Sistem 3R ini juga sebagai upaya untuk menekan biaya terhadap penanganan sampah yang akan dibuang ke TPA yang saat ini menggunakan TPA regional dengan beban biaya kompensasi cukup besar.

Tabel 33. Volume Sampah Yang Terangkut Ke TPA Tahun 2014 – 2018

No.	URAIAN	2014 (ton)	2015 (ton)	2016 (ton)	2017 (ton)	2018 (ton)
1.	Volume timbulan sampah yang tertangani/terangkut ke TPA	18.703	21.927	24.402	26.819	26.474
2.	Jumlah total timbulan sampah	34.762	44.230	48.892	49.939	50.092

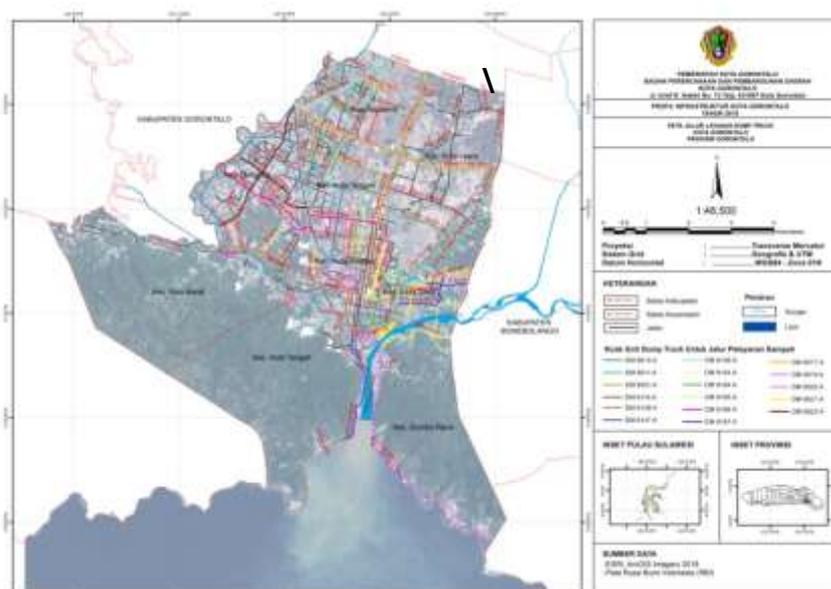
Sumber : DLH Kota Gorontalo, 2019

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa ada trend perkembangan data timbulan sampah yang tertangani setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 2000 – 3000 ton. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari total timbulan sampah pertahun, yang dapat ditangani adalah sebesar rata-rata 69,63%. Hal ini sudah melampaui target RPJMD 2014-2019.

Tabel 34. Data Jumlah Sampah yang berkurang melalui TPS 3R Tahun 2015 – 2018

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah titik lokasi pengolahan 3R	4	5	6	6
2.	Jumlah lokasi bank sampah	1	1	1	1
3.	Jumlah timbulan sampah yang dikelola 3R	±730	±1095	±1825	±2920
4.	Jumlah timbulan sampah yang dikelola Bank Sampah	±365	±730	±1095	±1460

Sumber: DLH Kota Gorontalo, 2019



Gambar 29. Peta Jalur Layanan Sampah Kota Gorontalo

Tabel 35. Data cakupan area pelayanan sampah Kota Gorontalo Tahun 2015 – 2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah total jalur layanan sampah	170	174	179	185
2.	Jumlah jalur yang terlayani gerobak/mobil sampah	70	78	93	133
3.	Luas area layanan sampah (Km/ha)	±54,79	±54,79	±54,79	±54,79

Sumber : DLH Kota Gorontalo, 2019

Tabel 36. Data jumlah sampah yang tertangani di Kota Gorontalo Tahun 2015 – 2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	60,7	67	73	74
2.	Jumlah total timbulan sampah Kota Gorontalo (ton)	134,4	136,6	137,11	140,4

Sumber : DLH Kota Gorontalo, 2019

2.4.5 Pengolahan Limbah

Kota Gorontalo memiliki satu-satunya Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Provinsi Gorontalo yang melakukan kinerja pelayanannya tidak hanya di Kota Gorontalo tetapi juga melayani kedua daerah tetangga yakni Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Sarana prasarana yang dimiliki selain gedung IPLT juga terdapat 1 unit truck sedot limbah (tinja) yang beroperasi saat ini yang kondisinya memprihatinkan.

Tabel 37. Rekapitan Tinja Per Kecamatan Tahun 2018

NO.	KECAMATAN	Rumah Tinggal	Usaha	Instansi	Jumlah
1.	Kota Utara	18		1	19
2.	Kota Barat	13	1		14
3.	Kota Timur	34	1	1	36
4.	Kota Selatan	33	2	4	39
5.	Kota Tengah	37	1		38
6.	Dungingi	37		1	38
7.	Dumbo Raya	12			12

NO.	KECAMATAN	Rumah Tinggal	Usaha	Instansi	Jumlah
8.	Sipatana	17			17
9.	Hulonthalangi	12	1		13
Jumlah penyedotan					

Sumber : DLH Kota Gorontalo, 2019

Karena mobil sedot tinja ini tidak hanya melayani Kota Gorontalo saja tetapi 2 (dua) wilayah tetangga lainnya yakni kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango maka kinerja pelayanannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 38. Data Penyedotan Tinja Kota Gorontalo Selang tahun 2014-2018

No.	Uraian	2014/2015	2016	2017	2018	Jumlah PAD (Rp)
1.	Rumah Tinggal	Belum tercover datanya	98	149	135	14.700.000
2.	Usaha	Belum tercover datanya	17	18	3	6.800.000
3.	Instansi	Belum tercover datanya	1	-	-	600.000
T O T A L P A D						24.150.000

Sumber : DLH Kota Gorontalo, 2018

Dengan kondisi mobil tinja yang saat ini sudah sangat tidak layak, maka berpengaruh pada kinerja pelayanan, dimana ada kekhawatiran bocornya tanki penampung ketika dalam perjalanan ke IPLT. Selain itu mobil tinja juga dengan terpaksa harus bolak balik mengangkut karena jumlah armada yang hanya satu-satunya. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.

2.4.6 Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota

Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi Gorontalo mengalami pertumbuhan pembangunan yang cukup pesat yang mengakibatkan kebutuhan akan lahan sebagai media untuk pembangunan menjadi cukup tinggi. Lahan-lahan perkotaan yang sebelumnya merupakan lahan kosong ataupun berupa lahan pertanian sedikit demi sedikit mulai dimanfaatkan untuk berbagai jenis bangunan. Kondisi ini tidak sepenuhnya didukung oleh ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengisyaratkan luas RTH sebesar 30%.

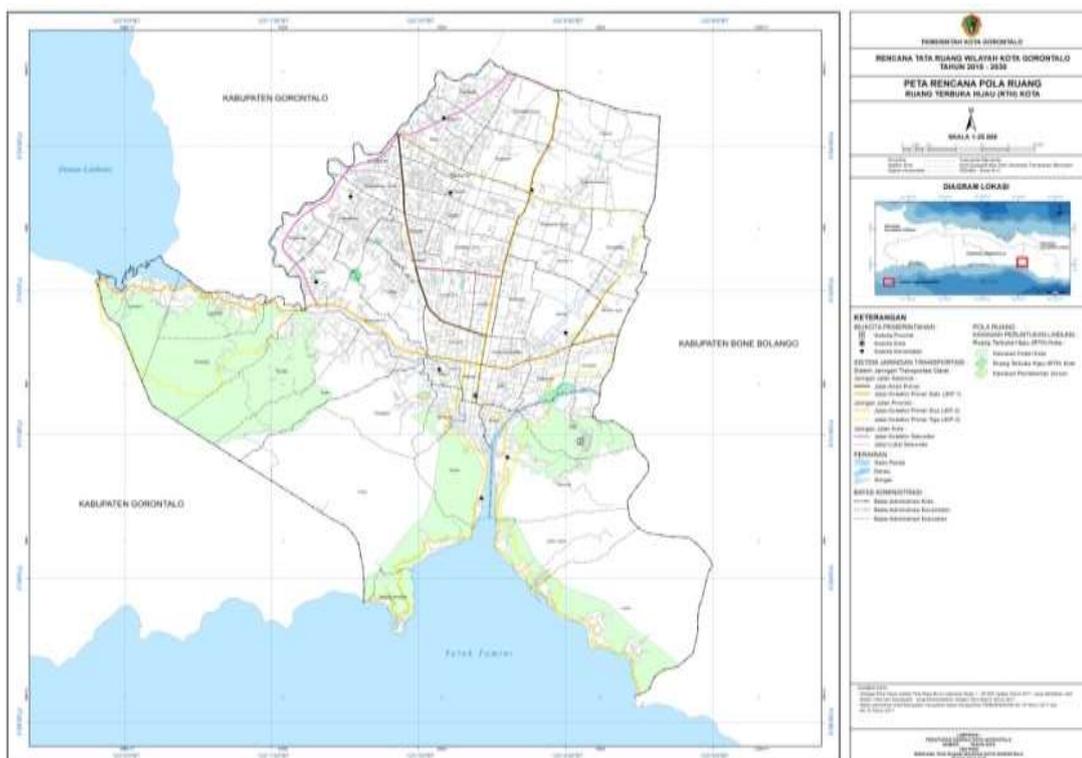
Pada tahun 2012 pemerintah Kota Gorontalo pernah menyusun Laporan Pemetaan RTH di Kota Gorontalo, dimana dalam dokumen tersebut banyak analisis yang dikaji terkait kondisi RTH di Kota Gorontalo. Pemetaan RTH ini ditujukan untuk menjadi panduan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Gorontalo dalam mendorong terwujudnya kota hijau RTH 30% tersebut. Kebijakan pemerintah kota Gorontalo tentang RTH ini juga tertuang dalam dokumen RTRW dan RDTR Kota Gorontalo.

Kondisi eksisting RTH di Kota Gorontalo dari tahun 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 39. Kondisi Eksisting RTH Kota Gorontalo

JENIS RTH	LUAS (ha)	LOKASI	KEPEMILIKAN
RTH PUBLIK			
1. RTH Obyek Wisata Bersejarah (Benteng Otanaha)	1,16	Kel. Dembe I	Pemerintah Kota Gorontalo
2. RTH Hutan Kota	996,32	Kel. Tenilo, Buliide, Pilolodaa, Lekobalo, Dembe I	Pemerintah Kota Gorontalo
3. RTH Jalur Hijau Jalan	1,96	Sepanjang jalan John Ario Katili dan Jusuf Dali	Pemerintah Kota Gorontalo
4. RTH Lapangan Olahraga	6,94		Pemerintah Kota Gorontalo
a. Lapangan Buladu	0,87	Kel. Buladu	
b. Lapangan Bulotadaa Barat	0,64	Kel. Bulotadaa Barat	
c. Lapangan Padebuolo	0,87	Kel. Padebuolo	
d. Lapangan Nani Wartabone	1,13	Kel. Limba U II	
e. Lapangan Taruna Remaja	1,65	Kel. Tenda	
f. Lapangan Liluwo	0,63	Kel. Liluwo	
5. RTH Taman Kota	2,22	Tersebar mulai dari batas kota hingga ke pusat kota	Pemerintah Kota Gorontalo
TOTAL RTH PUBLIK	1.005,23		
RTH PRIVAT			
RTH Pekarangan (rumah tinggal/perkantoran)	14,27	Taman Sekolah, Perkantoran dan Kampus UNG	Pribadi dan Institusi
TOTAL RTH EKSISTING	1.019,50		

Sumber : Ranwal RPJMD, 2019



Gambar 30. Peta Ruang Terbuka Hijau Kota Gorontalo

Berdasarkan data yang ditunjukkan peta tersebut di atas maka dikatakan bahwa kebutuhan RTH Publik telah memenuhi 63,30% luas RTH yang dibutuhkan berdasarkan Undang-undang Penataan Ruang seluas 1.580,65 ha. Untuk RTH Privat berdasarkan hasil perhitungan spasial diperoleh hanya seluas 14,27 ha atau sekitar 1,81% dari luas kebutuhan untuk RTH Privat yaitu 790,32 ha. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan akan RTH di Kota Gorontalo jika didasarkan pada persentase luas wilayah masih dibutuhkan sekitar 575,42 ha RTH Publik baru dan 776,06 ha RTH Privat baru untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Hasan, (2018) menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau di Kota Gorontalo berperan penting dalam penyerapan karbon. Penyerapan karbon melalui batang tanaman yang berada pada kawasan RTH di Kota Gorontalo menunjukkan bahwa pada RTH Taman kota memperoleh total nilai kandungan karbon 89267.53829 kg dan serapan karbon 327611.8655 kg jumlah ini tertinggi dibandingkan 2 lokasi kajian yang lain yaitu pada RTH Kota Tengah maupun pada RTH Taman Kren (Moodu).

Kemudian untuk penyerapan karbon melalui serasah daun menunjukkan bahwa lokasi kajian pada RTH Kota Tengah memperoleh total nilai kandungan karbon 2090.487323 kg dan serapan karbon 7672.088474 kg jumlah ini tertinggi dibandingkan 2 lokasi kajian yaitu pada RTH Taman Kota dan RTH Taman Kren (Moodu).

2.4.7 Perubahan Iklim

Kondisi perubahan iklim di Kota Gorontalo telah dikaji oleh Duka, (2018). Hasil kajian menunjukkan bahwa trend perubahan suhu permukaan yang terjadi di Kota Gorontalo periode 1990, 2003 dan 2017 mengalami peningkatan. Peningkatan suhu permukaan terjadi pada tutupan vegetasi yang telah mengalami perubahan luas. Kelas suhu permukaan rendah mengalami penurunan luas dari tiga tahun peliputan dan mengalami peningkatan perubahan luas penutupan pada lahan dengan kelas suhu permukaan tinggi, dengan pola distribusi suhu permukaan yang berbeda pada masing-masing wilayah yang berada di Kota Gorontalo. Hubungan antara suhu permukaan dan tutupan lahan menunjukkan bahwa vegetasi hutan memiliki suhu permukaan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan lahan terbangun, serta suhu permukaan pada setiap vegetasi berbeda bergantung pada karakteristik vegetasi yang ditunjukkan oleh hubungan nilai indeks vegetasi dan suhu permukaan yang menunjukkan korelasi negatif dengan nilai berturut-turut pada tahun 1990, 2003 dan 2017 sebesar -0.141, -0.448 dan -0.402. Perubahan suhu permukaan di Kota Gorontalo dipengaruhi oleh adanya perubahan tutupan lahan yang ditandai oleh kesamaan pola perubahan distribusi suhu permukaan dengan pola perubahan tutupan lahan.

Distribusi suhu permukaan di Kota Gorontalo Tahun 1993, Tahun 2003 dan Tahun 2017 ditunjukkan pada Tabel 40, Tabel 41 dan Tabel 42.

Tabel 40. Distribusi Suhu Berdasarkan Kecamatan di Kota Gorontalo Tahun 1990 (dalam Ha)

Kelas Suhu	KECAMATAN DI KOTA GORONTALO								
	Dumbo Raya	Dungingi	Hulond halangi	Kota Barat	Kota Selatan	Kota Tengah	Kota Timur	Kota Utara	Sipatana
< 8	7.18								
8 - 8.9	31.66								
9 - 9.9	25.43								
10 - 10.9	27.31			10.15					
11 - 11.9	28.97		1.98	172.54					
12 - 12.9	41.80	0.63	20.33	205.49		2.66		1.80	1.27
13 - 13.9	69.14	33.48	123.59	194.30		58.20		119.30	88.04
14 - 14.9	80.37	95.80	82.67	129.97		72.46	0.12	144.36	54.19
15 - 15.9	347.29	262.03	226.65	232.84	9.71	191.31	78.67	326.89	176.86
16 - 16.9	313.13	57.96	227.65	107.60	28.43	97.89	49.10	127.77	121.95
17 - 17.9	260.40	13.09	184.20	68.95	55.64	38.41	73.44	29.96	23.36
18 - 18.9	160.42	1.63	134.57	25.36	63.98	19.52	147.20	20.68	1.66
19 - 19.9	38.84		48.49	14.96	65.99	3.32	120.55	33.24	
20 >	1.23		3.57	2.42	58.03		43.91	33.83	
Jumlah	1433.18	464.62	1053.70	1164.57	281.77	483.77	513.00	837.83	467.33

Sumber : Duka, (2018)

Tabel 41. Distribusi Suhu Berdasarkan Kecamatan di Kota Gorontalo Tahun 2003 (dalam Ha)

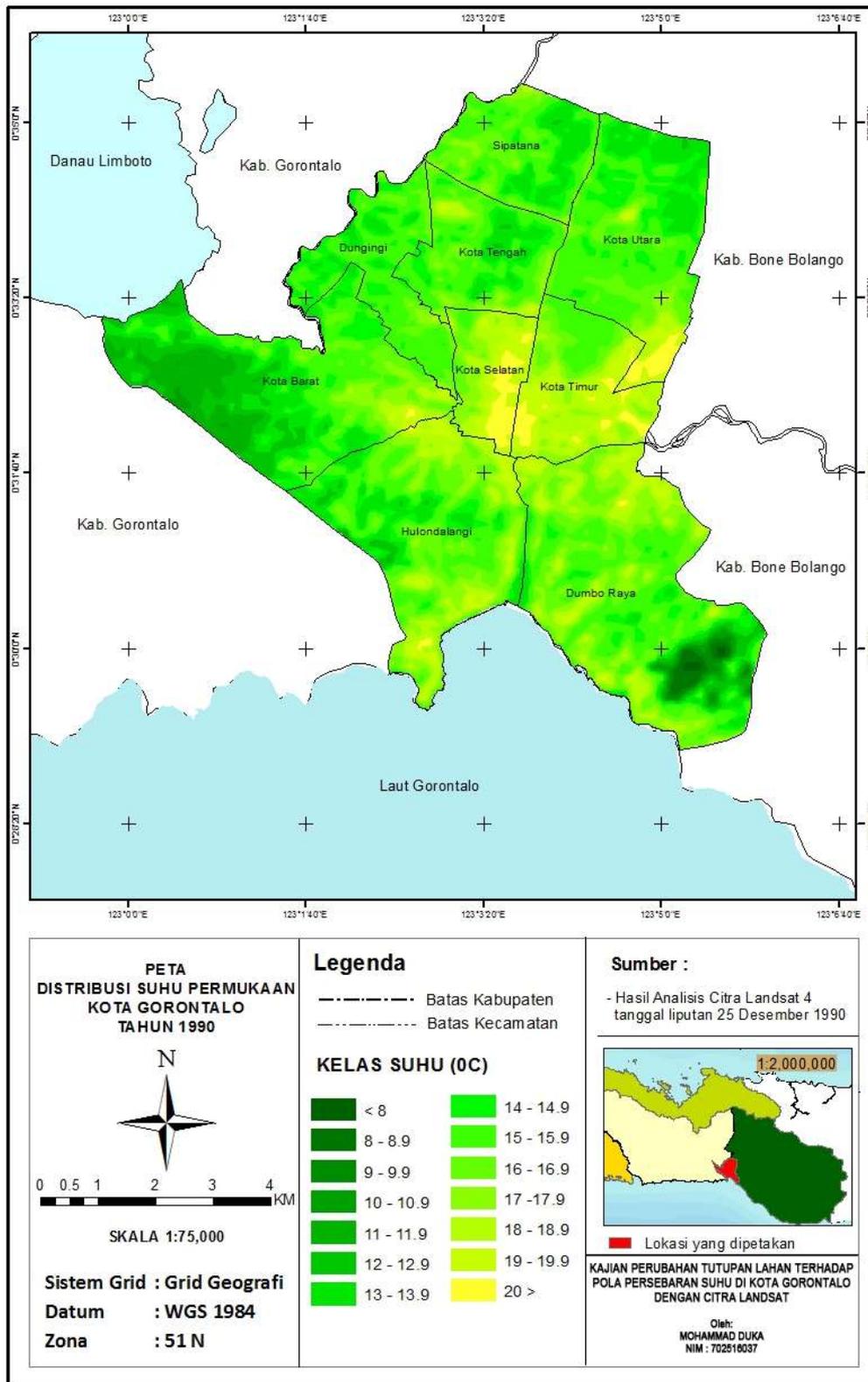
Kelas Suhu	KECAMATAN DI KOTA GORONTALO								
	Dumbo Raya	Dungingi	Hulond halangi	Kota Barat	Kota Selatan	Kota Tengah	Kota Timur	Kota Utara	Sipatana
< 12	3.86	1.25		23.49					
12 - 12.9	17.51	28.90	1.11	95.19		0.09			2.29
13 - 13.9	76.86	81.84	41.71	244.52	0.12	6.75	0.02	0.06	21.70
14 - 14.9	555.24	177.83	338.39	512.74	6.68	140.17	9.02	60.04	112.17
15 - 15.9	240.40	65.69	177.31	129.92	7.83	107.74	39.06	103.69	109.63
16 - 16.9	168.54	56.67	142.60	70.83	11.90	77.78	83.52	177.76	114.40
17 - 17.9	200.66	44.53	193.57	68.85	41.37	90.41	134.68	415.05	104.74
18 - 18.9	52.45	5.11	54.54	10.96	23.23	21.44	46.97	46.99	13.00
19 - 19.9	64.31	1.82	72.02	7.24	68.69	31.05	110.35	27.27	2.52
20 - 20.9	37.01	0.00	25.33	0.78	82.75	7.34	81.83	4.68	
21 >	8.25		3.96	0.27	39.20		7.47	2.23	
Jumlah	1425.09	463.64	1050.55	1164.80	281.77	482.77	512.92	837.78	480.45

Sumber : Duka, (2018)

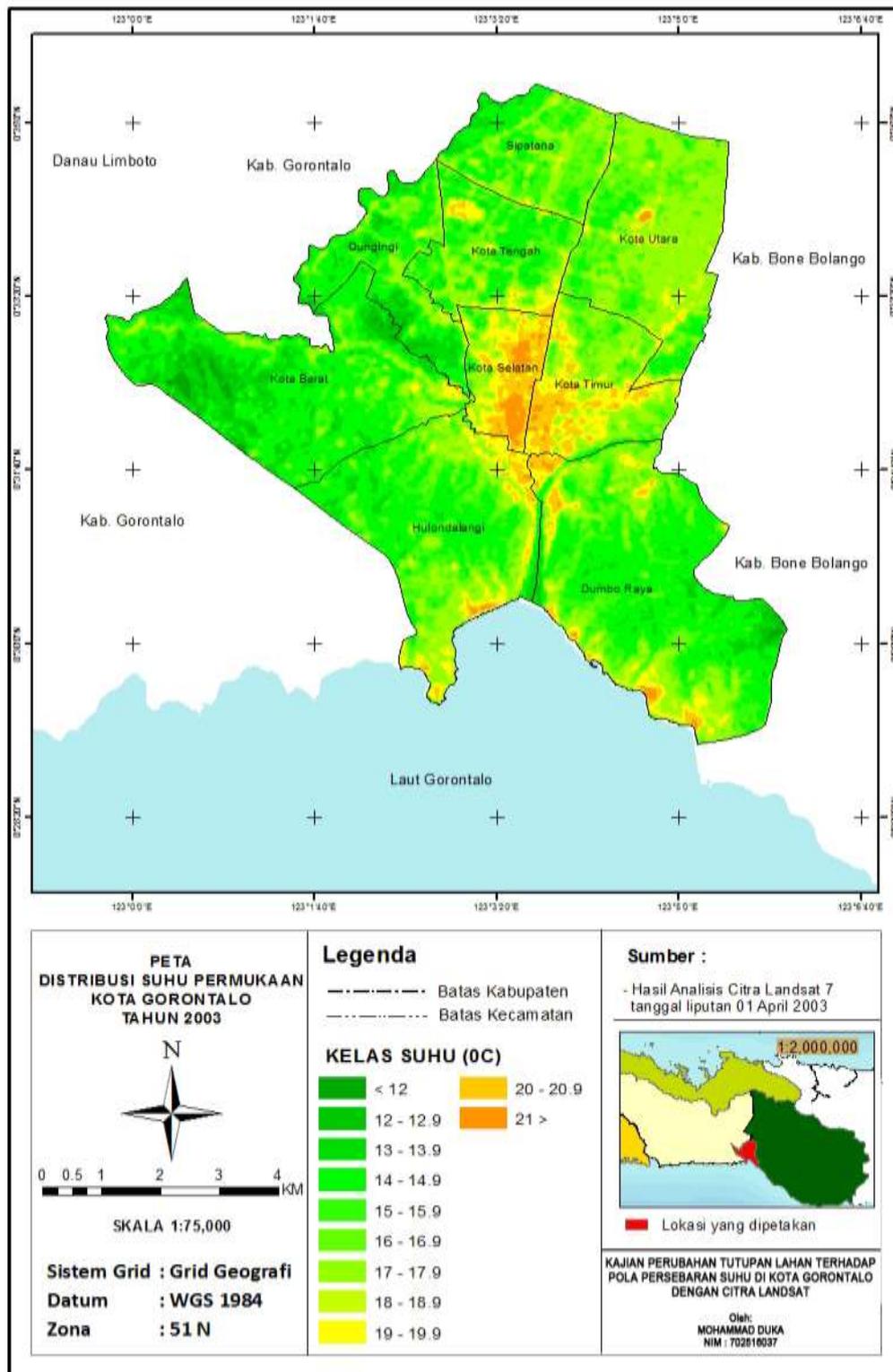
Tabel 42. Distribusi Suhu Berdasarkan Kecamatan di Kota Gorontalo Tahun 2017 (dalam Ha)

Kelas Suhu	KECAMATAN DI KOTA GORONTALO								
	Dumbo Raya	Dungingi	Hulond halangi	Kota Barat	Kota Selatan	Kota Tengah	Kota Timur	Kota Utara	Sipatana
< 12	3.86	1.25		23.49					
12 - 12.9	17.51	28.90	1.11	95.19		0.09			2.29
13 - 13.9	76.86	81.84	41.71	244.5	0.12	6.75	0.02	0.06	21.70
14 - 14.9	555.24	177.83	338.39	512.7	6.68	140.17	9.02	60.04	112.17
15 - 15.9	240.40	65.69	177.31	129.9	7.83	107.74	39.06	103.69	109.63
16 - 16.9	168.54	56.67	142.60	70.83	11.90	77.78	83.52	177.76	114.40
17 - 17.9	200.66	44.53	193.57	68.85	41.37	90.41	134.68	415.05	104.74
18 - 18.9	52.45	5.11	54.54	10.96	23.23	21.44	46.97	46.99	13.00
19 - 19.9	64.31	1.82	72.02	7.24	68.69	31.05	110.35	27.27	2.52
20 - 20.9	37.01	0.00	25.33	0.78	82.75	7.34	81.83	4.68	
21 >	8.25		3.96	0.27	39.20		7.47	2.23	

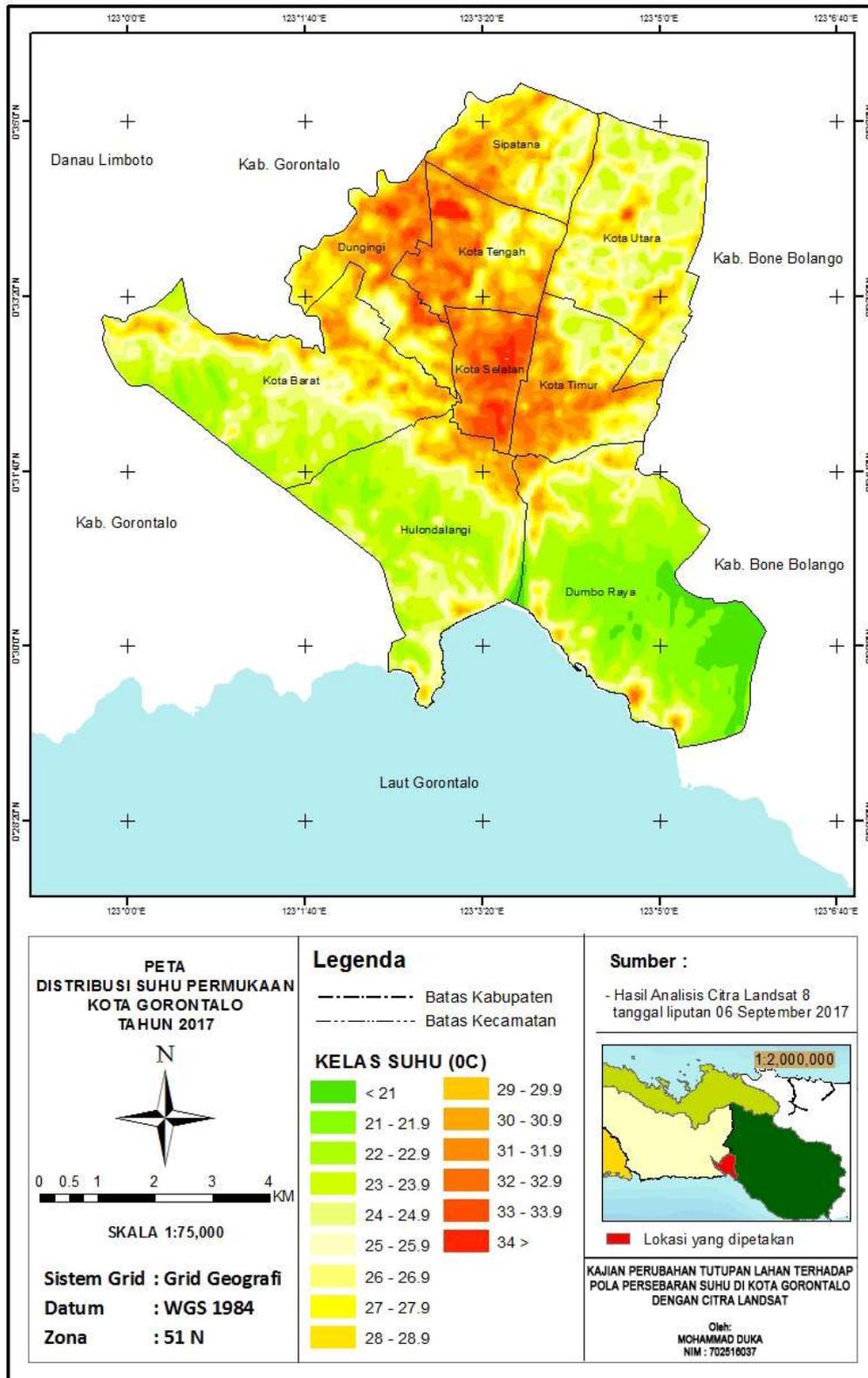
Sumber : Duka, (2018)



Gambar 31. Peta Distribusi Suhu Berdasarkan Kecamatan di Kota Gorontalo Tahun 1990



Gambar 32. Peta Distribusi Suhu Berdasarkan Kecamatan di Kota Gorontalo Tahun 2003



Gambar 33. Peta Distribusi Suhu Berdasarkan Kecamatan di Kota Gorontalo Tahun 2017

Berdasarkan Gambar 31, Gambar 32 dan Gambar 33, terlihat bahwa suhu permukaan yang relatif rendah adalah suhu permukaan $<12\text{ }^{\circ}\text{C}$ yang tersebar di Kecamatan Dumbo Raya, Kecamatan Dungingi dan Kecamatan Kota Barat. Suhu permukaan yang relatif tinggi (suhu permukaan $> 21\text{ }^{\circ}\text{C}$) tersebar pada wilayah Kecamatan Dumbo Raya, Hulondhalangi, Kota Barat, Kota Selatan, Kota Timur dan Kota Utara. Distribusi suhu permukaan di wilayah kecamatan yang terdapat di Kota Gorontalo tertinggi yaitu pada kelas suhu 14-14.9 $^{\circ}\text{C}$ dengan luas 1912,29 ha yang tersebar di wilayah Kecamatan Dumbo Raya, Dungingi, Hulondhalangi, Kota Barat, Kota Timur, Kota Selatan, Kota Utara, Kota Tengah dan Kecamatan Sipatana. Berdasarkan wilayah administrasi, distribusi kelas suhu tertinggi yaitu terdapat di wilayah Kecamatan Kota Barat dengan luas distribusi suhu permukaan sebesar 1164,80 ha. Sedangkan wilayah Kota Gorontalo dengan luas distribusi suhu permukaan rendah adalah Kecamatan Kota Tengah dengan luas sebesar 281,77 ha.

BAB III

ANALISIS PENCAPAIAN TPB

BAB III. ANALISIS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berperan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan, rencana dan program yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Terdapat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan untuk menjadi target bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam pelaksanaan pembangunan. TPB memiliki indikator untuk masing-masing tujuannya sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pencapaian target TPB yang dinilai melalui masing-masing indikatornya perlu diintegrasikan dalam perumusan KRP dengan cara menganalisis kesenjangan (gap) antara kondisi yang ada saat ini dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai oleh suatu daerah. Analisis kesenjangan antara kondisi saat ini dan target TPB yang ingin dicapai biasanya diawali melalui identifikasi isu-isu strategis. Kaitannya dengan TPB yang memiliki tiga pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial, maka identifikasi isu-isu strategis dalam perumusan KRP disesuaikan dengan tiga pilar utama dari TPB serta tata kelolanya, yang mencakup tujuan kelompok ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola; seperti yang diilustrasikan pada Gambar 34.

Gambar 34 menceritakan bahwa kondisi lingkungan (biosphere : ekosistem daratan, sumber daya kelautan, air bersih dan sanitasi yang layak, penanganan perubahan iklim) merupakan dasar dalam menopang kesejahteraan sosial dan ekonomi, dalam pencapaian kesejahteraan manusia. Ilustrasinya, kondisi lingkungan yang sehat dan bersih disertai dengan daya dukung yang baik, akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia, untuk kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat tercipta kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.



Gambar 34. Kaitan antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan dengan pencapaian TPB (Sumber: Folke, dkk., 2016)

Evaluasi terhadap TPB dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah evaluasi terhadap keselarasan antara indikator RPJMD Kota Gorontalo dengan indicator TPB/SDG's. Evaluasi keselarasan dilakukan oleh Tim UNDP Konsultan untuk Program Pelokalan SDGs Kota Gorontalo. Tahap kedua dilakukan evaluasi terhadap pencapaian TPB dalam periode Tahun 2015 hingga Tahun 2018.

3.1 Kondisi Umum Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kota Gorontalo

Berdasarkan hasil analisis terhadap 222 indikator TPB untuk kewenangan kota, diperoleh 14 indikator yang tidak sesuai dengan kondisi Kota Gorontalo. Indikator-indikator yang tidak sesuai dengan kondisi Kota Gorontalo ditunjukkan pada Tabel 43 berikut.

Tabel 43. Indikator yang tidak sesuai dengan kondisi Kota Gorontalo

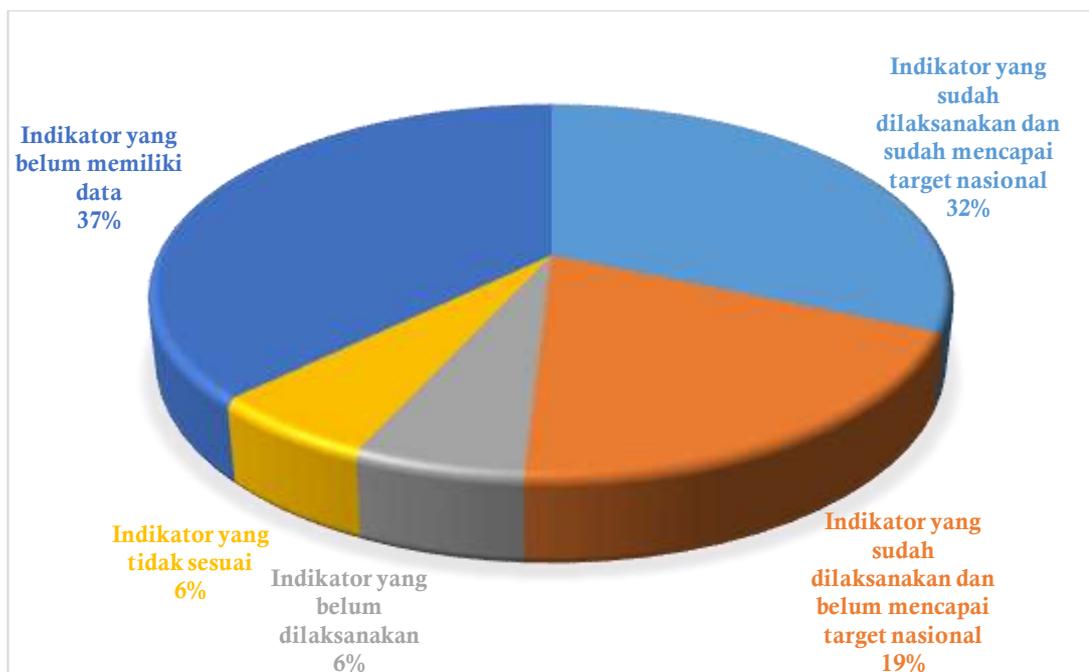
No Target	Target	Nomor Indikator	Indikator TPB
Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak			
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu

No Target	Target	Nomor Indikator	Indikator TPB
	terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.		(RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
		6.5.1 (c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.
		6.5.1 (f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.
Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau			
7.2	Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.
		7.3.1*	Intensitas energi primer.
Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur			
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.1(b)	Panjang pembangunan jalan tol.
		9.1.1 c	Panjang jalur kereta api.
Tujuan 11: Kota dan pemukiman yang berkelanjutan			
11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).
11.2	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1 (b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.
11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan	11.3.1(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.
11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan	11.3.1(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

No Target	Target	Nomor Indikator	Indikator TPB
	penanganan permukiman yang berkelanjutan		
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.
Tujuan 15: Ekosistem Daratan			
15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.

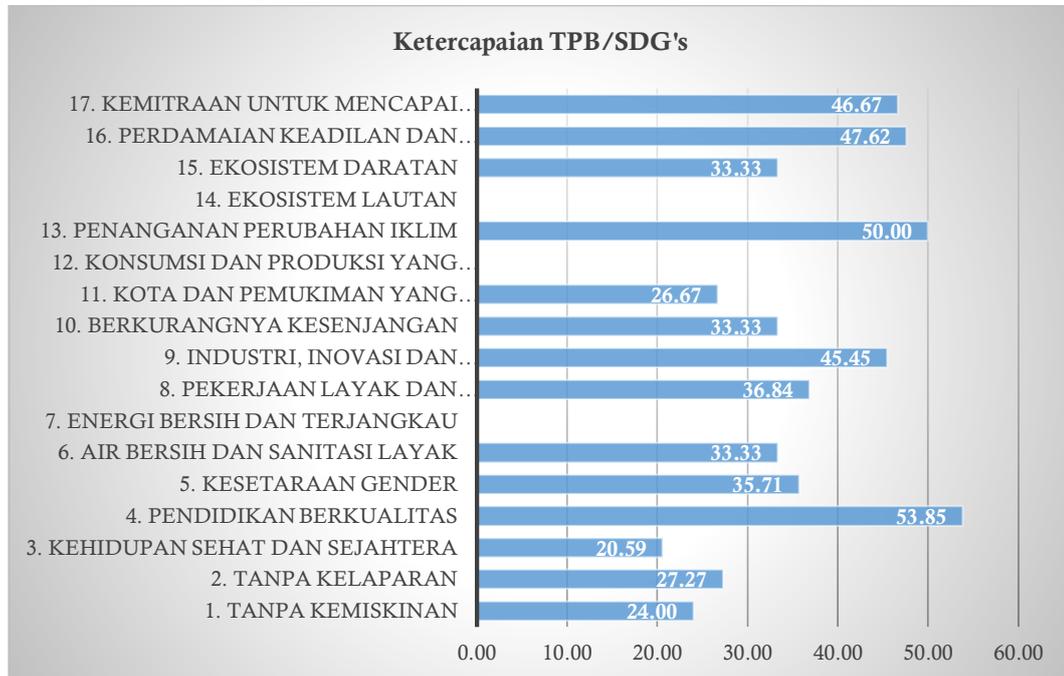
Sumber: hasil analisis tim KLHS, 2019

Jumlah TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional berjumlah 64 indikator (28,83%). Indikator yang belum mencapai target nasional sejumlah 44 indikator (19,82%). Indikator yang belum dilaksanakan sejumlah 13 indikator (5,86%) dan indikator yang belum tersedia data berjumlah 88 indikator (39,64%).



Gambar 35. Hasil evaluasi pencapaian TPB di Kota Gorontalo

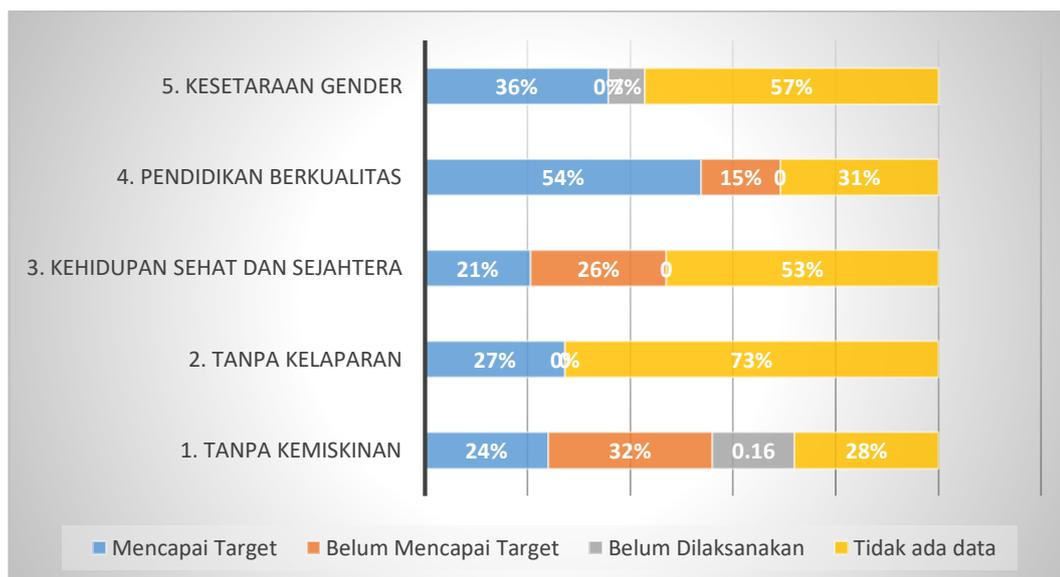
Persentase ketercapaian TPB untuk masing-masing goals ditunjukkan pada Gambar 36.



Gambar 36. Persentase ketercapaian TPB

3.2 Capaian Target TPB Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4, dan Tujuan 5. Total untuk pilar sosial adalah sebanyak 97 indikator. Jumlah indikator yang telah mencapai target nasional pada pilar social sejumlah 28 indikator (29%). Indikator yang belum mencapai target nasional sejumlah 19 indikator (32%). Indikator yang belum dilaksanakan sejumlah 5 indikator (0,16%) dan tidak ada data sejumlah 45 indikator (46%) Hasil capaian indikator TPB pada pilar sosial ditunjukkan pada Gambar 37.



Gambar 37. Capaian TPB Pilar Sosial di Kota Gorontalo

Indikator dalam pilar social yang telah mencapai target nasional ditunjukkan pada Tabel 44.

Tabel 44. Indikator dalam pilar sosial yang telah mencapai target nasional

No Target	Target	Nomor Indikator	Indikator TPB
Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan			
1.2	Mengurangi proporsi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional
1.4	Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi	1.4.1(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
		1.4.1(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.
		1.4.1 (g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.
		1.4.1 (k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.
1.5	Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.

No Target	Target	Nomor Indikator	Indikator TPB
	iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.		
Tujuan 2: Tanpa Kelaparan			
2.2	Menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
		2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.
		2.2.2(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.
Tujuan 3: Kehidupan sehat dan sejahtera			
3.1	Mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
		3.1.2(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.
3.2	Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.
		3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.
		3.2.2(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
3.7	Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR).
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.
Tujuan 4: Pendidikan berkualitas			
4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki	4.1.1(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.

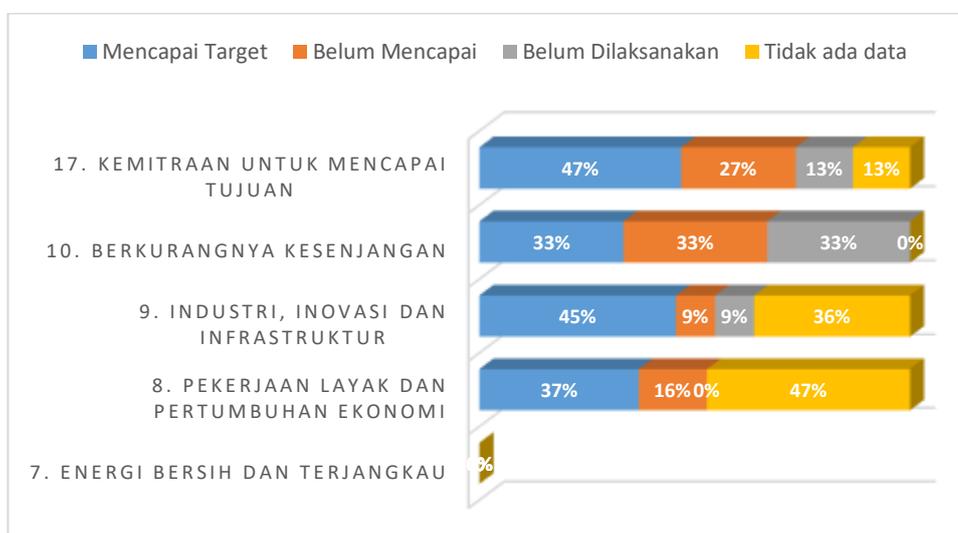
No Target	Target	Nomor Indikator	Indikator TPB
	menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.		
		4.1.1(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.
4.4	Meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
4.5	Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	APM SD, SMP, SMA, PT
4.6	Menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.
		4.6.1 (b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.
4.a	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).
Tujuan 5: Kesetaraan Gender			
5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat,

No Target	Target	Nomor Indikator	Indikator TPB
	semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.		parlemen daerah dan pemerintah daerah.
		5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.

Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2019

3.3 Capaian Target TPB Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10, dan Tujuan 17. Total untuk pilar ekonomi yang sesuai dengan kondisi Kota Gorontalo adalah sebanyak 51 indikator. Capaian TPB untuk pilar social ditunjukkan pada Gambar 36.



Gambar 38. Capaian TPB untuk pilar ekonomi di Kota Gorontalo

Hasil evaluasi TPB untuk pilar ekonomi menunjukkan bahwa capaian tertinggi berada pada tujuan ke-17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan (capaian 47%). Berikutnya adalah tujuan ke-9 yaitu industry, inovasi dan infrastruktur (capaian 45%). Tujuan ke-7 yaitu energy bersih dan terjangkau tidak ada capaian sebab tidak sesuai dengan kondisi Kota Gorontalo. Uraian indikator pilar ekonomi yang telah mencapai target nasional ditunjukkan pada Tabel 42 berikut:

Tabel 45. Indikator dalam pilar ekonomi yang telah mencapai target nasional

No Target	Target	Nomor Indikator	Indikator TPB
Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi			
8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.
		8.1.1(a)	PDB per kapita.
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal.
		8.3.1(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.
		8.5.2(a)	Tingkat setengah pengangguran.
8.6	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur			
9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk	9.1.2 (b)	Jumlah dermaga penyeberangan.

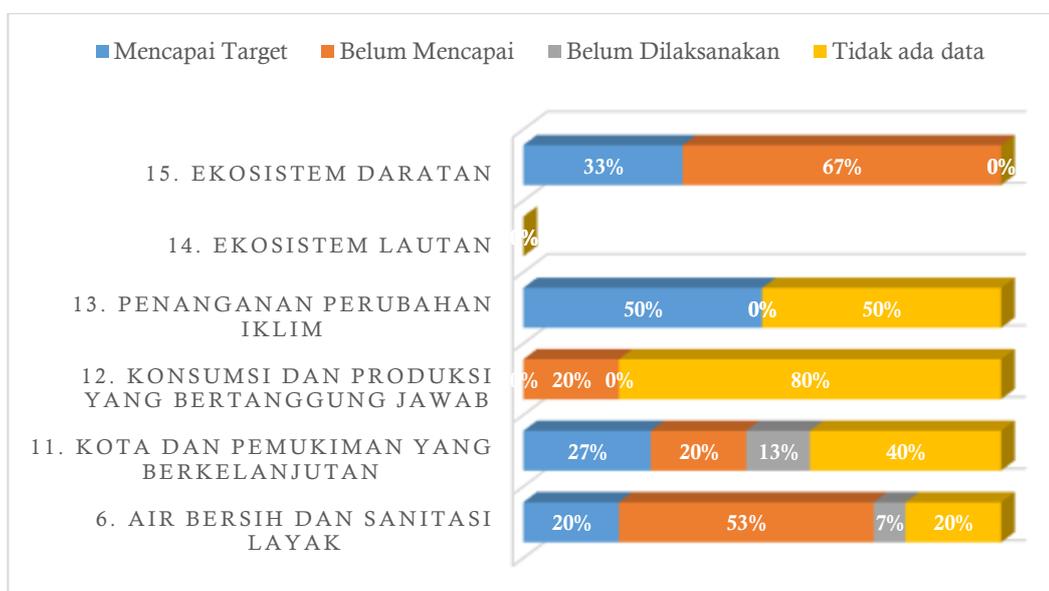
No Target	Target	Nomor Indikator	Indikator TPB
	mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.		
		9.1.2(c)	Jumlah pelabuhan strategis.
9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.
		9.c.1(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam
		9.c.1(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet
Tujuan 10: Berkurangnya kesenjangan			
10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.
		10.1.1(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
Tujuan 17: Kemitraan untuk mencapai tujuan			
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PTD), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2 (c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband
17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.
17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk	17.18.1(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.

No Target	Target	Nomor Indikator	Indikator TPB
	meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.		
17.19	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)
		17.19.2(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.
		17.19.2(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).

Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2019

3.4 Capaian Target TPB Pilar Lingkungan Hidup

Pilar lingkungan hidup terdiri dari tujuan 6, tujuan 11, tujuan 12, tujuan 12, tujuan 14 dan tujuan 15. Total indikator yang menjadi kewenangan pemerintahan kota dan sesuai dengan kondisi lokal adalah 40 indikator. Grafik ketercapaian untuk pilar lingkungan hidup ditunjukkan pada Gambar 39.



Gambar 39. Capaian TPB untuk pilar lingkungan hidup di Kota Gorontalo

Hasil evaluasi pilar lingkungan hidup menunjukkan bahwa capaian capaian tertinggi pada tujuan 13 yaitu penanganan perubahan iklim (50%). Berikutnya adalah capaian tujuan 11 yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan (27%). Capaian dengan proporsi yang sama adalah tujuan 6 (air bersih dan sanitasi layak) dan tujuan 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab) dengan capaian 20%. Uraian indikator yang telah mencapai target pada pilar lingkungan hidup ditunjukkan pada Tabel 46.

Tabel 46. Indikator dalam pilar lingkungan hidup yang telah mencapai target nasional

No Target	Target	Nomor Indikator	Indikator TPB
Tujuan 6 : Air bersih dan sanitasi yang layak			
6.2	Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1 (d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
6.5	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
Tujuan 11: Kota dan Pemukiman berkelanjutan			
11.4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.
11.7	Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.
11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.

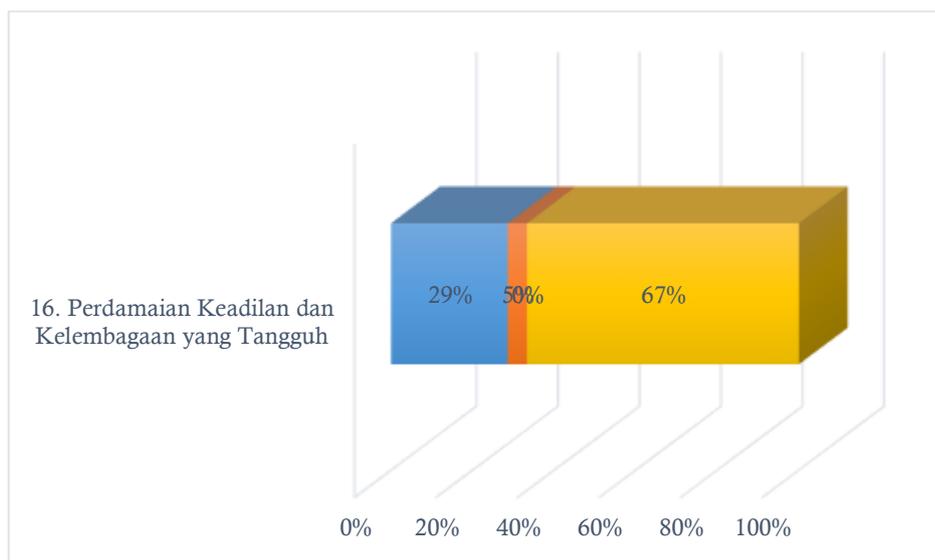
No Target	Target	Nomor Indikator	Indikator TPB
	perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.
Tujuan 13: Penanganan perubahan iklim			
13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
Tujuan 15: Ekosistem daratan			
15.6	Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.	15.6.1	ersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.

Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2019

3.5 Capaian Target TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

Pilar hukum dan tata kelola pemerintahan terdiri dari satu tujuan yaitu tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pemerintahan kota adalah 21 indikator. Jumlah indikator yang telah mencapai target nasional adalah 6 indikator (29%). Jumlah indikator yang belum mencapai target nasional adalah 1 indikator (5%). Indikator yang belum memiliki data berjumlah 14 indikator (67%). Capai pilar hukum dan tata kelola pemerintahan ditunjukkan pada Gambar 40.

Uraian indikator yang telah mencapai target pada pilar hukum dan tata kelola pemerintahan ditunjukkan pada Tabel 47.



Gambar 40. Capaian TPB untuk pilar hukum dan tata kelola pemerintahan di Kota Gorontalo

Tabel 47. Indikator dalam pilar hukum dan tata kelola pemerintahan yang telah mencapai target nasional

No Target	Target	Nomor Indikator	Indikator TPB
Tujuan 16 : Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh			
16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	16.1.1(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.
		16.1.3(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.
16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
		16.7.1(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.
		16.9.1(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.

Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2019

3.6 Peran Para Pihak Dalam Pencapaian TPB

Pembagian peran para pihak di Kota Gorontalo ditunjukkan pada Tabel 49

Tabel 48. Pembagian peran para pihak dalam pencapaian TPB

No	Nama Para Pihak	Peran	Bidang
	PERBANKAN		
1.	Bank Indonesia	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
2.	Bank SULUTGO	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
3.	Bank BNI	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
4.	Bank Mandiri	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
5.	Bank BRI	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
6.	Bank Mandiri Syariah	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
7.	Bank Muamalat	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
8.	Maybank	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
9.	Panin Bank	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
10.	Bank Tabungan Negara	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
11.	Bank BTPN	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
12.	Bank BCA	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
13.	Bank Danamon	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan

No	Nama Para Pihak	Peran	Bidang
14.	Bank Mega	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
15.	Bank Sinar Mas	Penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa CSR	Ekonomi; Lingkungan
	PERGURUAN TINGGI		
1.	Universitas Negeri Gorontalo	Peningkatan kualitas SDM	Pendidikan
2.	STMIK Ichsan	Peningkatan kualitas SDM	Pendidikan
3.	STIA Bina Taruna Gorontalo	Peningkatan kualitas SDM	Pendidikan
4.	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Peningkatan kualitas SDM	Pendidikan
	LEMBAGA/ASOSIASI/FORUM/ORMAS/LSM		
1.	Ikatan Dokter Indonesia	Pelayanan kesehatan	Kesehatan
2.	PGRI	Pelayanan pendidikan	Pendidikan
3.	Ikatan Bidan Indonesia	Pelayanan kesehatan	Kesehatan
4.	Dekranasda	Pemberdayaan UMKM	Ekonomi
5.	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Pemberdayaan nelayan	Ekonomi
6.	KADIN Gorontalo		Ekonomi
7.	HIPMI Gorontalo		Ekonomi
8.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Pemberdayaan masyarakat	
9.	Tim Penggerak PKK	Pemberdayaan masyarakat	
10	RRI Gorontalo	Sosialisasi Program	
11	TVRI Gorontalo	Sosialisasi Program	
12	MIMOZA TV	Sosialisasi Program	
13	Gorontalo TV	Sosialisasi Program	
14	PT. PLN (Persero) UP3 Gorontalo		Kelistrikan
15	Baznas Kota Gorontalo	Filan tropi	
	RUMAH SAKIT		
1.	RS ALoei Saboe	Pelayanan kesehatan	Kesehatan
2.	RS Islam	Pelayanan kesehatan	Kesehatan
3.	RS Bunda	Pelayanan kesehatan	Kesehatan
4.	RS Multazam	Pelayanan kesehatan	Kesehatan
5.	Klinik Mirah	Pelayanan kesehatan	Kesehatan
	SWASTA		

No	Nama Para Pihak	Peran	Bidang
1.	Karsa Utama	Penyedia jasa CSR	Ekonomi
2.	Hotel Grand Q	Penyedia jasa CSR	Ekonomi
3.	Hotel Maqna	Penyedia jasa CSR	Ekonomi
4.	Hotel Horison	Penyedia jasa CSR	Ekonomi
5.	Hypert Mart	Penyedia jasa CSR	Ekonomi
6.	Matahari Dept. Store	Penyedia jasa CSR	Ekonomi
7.	Makro Supermarket	Penyedia jasa CSR	Ekonomi

Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2019

BAB IV

RUMUSAN ISU STRATEGIS

BAB IV. RUMUSAN ISU STRATEGIS

4.1 Proses Identifikasi dan Perumusan Isu Strategis

Proses identifikasi isu strategis Kota Gorontalo dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 28,83% indikator TPB yang telah mencapai target. Persentase indikator TPB yang belum mencapai target sebesar 19,82%. Indikator yang belum dilaksanakan 5,86% dan yang tidak ada data sebesar 39,64%. Indikator yang tidak memiliki data, tidak dapat dilakukan analisis lebih lanjut.

Kesenjangan antara kondisi saat ini dengan target pencapaian TPB menjadi dasar dalam perumusan isu strategis.

Dalam kajian ini, proses perumusan isu strategis dilakukan melalui tahapan berikut: 1. Tahap identifikasi isu strategis, yang terdiri dari dua tahapan, yaitu:

- a. Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan melalui evaluasi pencapaian TPB di Kota Gorontalo. Evaluasi pencapaian TPB difasilitasi oleh tim UNDP dan tim pokja KLHS. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian TPB di Kota Gorontalo diperoleh isu-isu pembangunan berkelanjutan seperti ditunjukkan pada Tabel 49.

Tabel 49. Isu pembangunan berkelanjutan di Kota Gorontalo

No	Pilar	Isu PB
1	Sosial	Jaminan sosial kesehatan terutama bagi penduduk miskin
		Penggunaan kontrasepsi bagi pasangan usia subur
		Akses terhadap air minum yang layak
		Akses terhadap sanitasi yang layak
		Rumah tangga kumuh perkotaan
		Partisipasi sekolah ditingkat SMP/MTS/ sederajat
		Administrasi kependudukan
		Prevalensi HIV, TB, merokok meningkat
		Penyalahgunaan narkoba meningkat
		Pendampingan psikososial bagi korban bencana belum dilaksanakan

No	Pilar	Isu PB
2	Ekonomi	Lapangan pekerjaan informal sector non pertanian menurun
		Pengangguran meningkat
		Rendahnya kunjungan wisatawan
		Tenaga kerja sector industry manufaktur menurun
		Jaminan social ketenagakerjaan masih rendah
		Rasio penerimaan pajak terhadap PDB menurun
		Ketersediaan metadata statistic belum meningkat
3	Lingkungan Hidup	Kualitas air sungai menurun
		Kualitas air danau menurun
		Akses terhadap sumber air bersih masih rendah
		Ketersediaan IPAL komunal masih rendah
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) masih rendah
		Sampah yang tertangani masih rendah
		Jumlah kelurahan yang tangguh bencana masih rendah
4	Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan	Administrasi dan pendataan masih kurang

b. Penetapan isu strategis pembangunan berkelanjutan melalui uji publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan Pokja KLHS Kota Gorontalo dan difasilitasi oleh Tenaga Ahli. Dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2019 di ruang rapat Bappeda Kota Gorontalo.

Hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dari hasil FGD diperoleh isu-isu pembangunan berkelanjutan di Kota Gorontalo adalah:

- Pengelolaan sampah
- Pengelolaan limbah B3 di rumah sakit dengan para pelaku usaha seperti bengkel, dll.
- Banjir, galian C, limbah rumah tangga, pendangkalan danau, air bersih, sanitasi.
- Buruknya system drainase, masyarakat membuang sampah sembarangan, contoh sampah dibuang di drainase
- Pemetaan RTRW yang tepat
- Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita

- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (%)
- Penggunaan kontrasepsi
- Akses sanitasi layak
- Peningkatan layanan air bersih dan sanitasi
- Peningkatan pembukaan lapangan kerja baik negeri maupun swasta
- Peningkatan pelayanan kesehatan baik tingkat puskesmas atau rumah sakit
- Kota dan pemukiman yang berkelanjutan
- Mohon dikaji indikator yang menjadi prioritas pengembangan kota yang sinergi dengan provinsi dan daerah di sekitar Kota Gorontalo
- Sampah
- IPAL
- Kota dan permukiman berkelanjutan
- Akses terhadap air minum layak
- Kota tangguh bencana
- Perlu sosialisasi yang lebih intensif terhadap masyarakat demi tercapainya rencana pembangunan di perkotaan
- Pencemaran air

- c. Analisis berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 46 Tahun 2016, unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam perumusan isu strategis dan isu prioritas pembangunan berkelanjutan.

Hasil analisis berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS Pasal 9 ayat (1) yaitu:

1. Karakteristik wilayah
2. Tingkat pentingnya potensi dampak
3. Keterkaitan antar isu PB
4. Keterkaitan dengan materi muatan KRP
5. Muatan RPPLH
6. Hasil KLHS RPJMD hirarki di atasnya

Hasil analisis ditunjukkan pada tabel 50.

Tabel 50. Hasil analisis Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kota Gorontalo

Kelompok Isu dan Isu Terkait	Karakteristik Wilayah	Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan antar Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterkaitan antar materi muatan RPJMD Kota Gorontalo	Muatan rencana PPLH	Keterkaitan dengan RPJD Provinsi Gorontalo
Pengelolaan sampah dan limbah cair dan limbah B3	Topografi: - Kota Gorontalo pada umumnya datar (0 – 8%). - Wilayah berbukit di kecamatan Hulonthalangi, Kota Barat dan Dumbo Raya	Potensi terjadinya pencemaran pada sumber air	Faktor Penyebab: - Adanya rumah kumuh di Kota Gorontalo - Kapasitas sumber air bersih yang layak menurun Akibat: - Tingkat kesehatan menurun -	- Program pengelolaan sampah dan limbah cair		
Buruknya system drainase	Topografi: - Kota Gorontalo pada umumnya datar (0 – 8%). - Wilayah berbukit di kecamatan Hulonthalangi, Kota Barat dan Dumbo Raya	Dapat meningkatkan potensi banjir di Kota Gorontalo	Faktor penyebab: - Kurangnya kemampuan pengelolaan sampah RT - Belum optimalnya fungsi 3R dan Bank Sampah Akibat : Kualitas system drainase menurun	-		
Akses terhadap air minum layak	Topografi: - Kota Gorontalo pada umumnya datar (0 – 8%). - Wilayah berbukit di kecamatan	Berdasarkan kondisi hidrologi dan kapasitas daya dukung untuk jasa ekosistem	Faktor Penyebab: - Pencemaran sungai	- Program peningkatan saran penyediaan sumber air bersih	D3TLH jasa ekosistem penyediaan air masih surplus	

Kelompok Isu dan Isu Terkait	Karakteristik Wilayah	Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan antar Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterkaitan antar materi muatan RPJMD Kota Gorontalo	Muatan rencana PPLH	Keterkaitan dengan RPJD Provinsi Gorontalo
	<p>Hulonthalangi, Kota Barat dan Dumbo Raya</p> <p>Hidrologi: Kota Gorontalo merupakan muara dari 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Bone, Sungai Bolango dan Sungai Tamalate</p>	<p>penyediaan air bersih, maka seharusnya seluruh masyarakat Kota Gorontalo mendapatkan akses terhadap air minum. Akan tetapi data menunjukkan bahwa masih terdapat 6.64% yang belum memiliki akses terhadap air minum</p>	<p>Akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas air sungai menurun - Kapasitas sumber air bersih yang layak menurun 			
<p>Akses terhadap sanitasi layak</p>	<p>Topografi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kota Gorontalo pada umumnya datar (0 – 8%). - Wilayah berbukit di kecamatan Hulonthalangi, Kota Barat dan Dumbo Raya <p>Hidrologi: Kota Gorontalo merupakan muara dari 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Bone, Sungai Bolango dan Sungai Tamalate</p>	<p>Berdasarkan kondisi hidrologi dan kapasitas daya dukung untuk jasa ekosistem penyediaan air bersih, maka seharusnya seluruh masyarakat Kota Gorontalo mendapatkan akses terhadap air minum. Akan tetapi data menunjukkan bahwa masih terdapat 6.64%</p>	<p>Faktor Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya rumah kumuh di Kota Gorontalo - Kapasitas sumber air bersih yang layak menurun <p>Akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kesehatan menurun - 	-		

Kelompok Isu dan Isu Terkait	Karakteristik Wilayah	Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan antar Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterkaitan antar materi muatan RPJMD Kota Gorontalo	Muatan rencana PPLH	Keterkaitan dengan RPJD Provinsi Gorontalo
		yang belum memiliki akses terhadap air minum				
Rumah tangga kumuh perkotaan	<p>Topografi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kota Gorontalo pada umumnya datar (0 – 8%). - Wilayah berbukit di kecamatan Hulonthalangi, Kota Barat dan Dumbo Raya <p>Kawasan rawan banjir terletak di bagian tengah wilayah Kota Gorontalo, yaitu di Kecamatan Kota Timur, Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Barat, Duingingi, Kecamatan Kota Tengah, dan Kecamatan Dumbo Raya.</p>		<p>Faktor Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya rumah kumuh di Kota Gorontalo - Kapasitas sumber air bersih yang layak menurun - Kepdatan rumah tinggi <p>Akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kesehatan menurun - 	-		
Akses terhadap air minum	<p>Topografi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kota Gorontalo pada umumnya datar (0 – 8%). - Wilayah berbukit di kecamatan Hulonthalangi, Kota Barat dan Dumbo Raya <p>Hidrologi: Kota Gorontalo merupakan muara dari 3</p>	Berdasarkan kondisi hidrologi dan kapasitas daya dukung untuk jasa ekosistem penyediaan air bersih, maka seharusnya seluruh masyarakat Kota Gorontalo	<p>Faktor Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencemaran sungai <p>Akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas air sungai menurun 	- Program peningkatan saran penyediaan sumber air bersih	D3TLH jasa ekosistem penyediaan air masih surplus	

Kelompok Isu dan Isu Terkait	Karakteristik Wilayah	Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan antar Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterkaitan antar materi muatan RPJMD Kota Gorontalo	Muatan rencana PPLH	Keterkaitan dengan RPJD Provinsi Gorontalo
	(tiga) sungai yaitu Sungai Bone, Sungai Bolango dan Sungai Tamalate	mendapatkan akses terhadap air minum. Akan tetapi data menunjukkan bahwa masih terdapat 6.64% yang belum memiliki akses terhadap air minum	- Kapasitas sumber air bersih yang layak menurun			
Kapasitas sarana air baku	<p>Topografi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kota Gorontalo pada umumnya datar (0 – 8%). - Wilayah berbukit di kecamatan Hulonthalangi, Kota Barat dan Dumbo Raya <p>Hidrologi:</p> <p>Kota Gorontalo merupakan muara dari 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Bone, Sungai Bolango dan Sungai Tamalate</p>	Berdasarkan kondisi hidrologi dan kapasitas daya dukung untuk jasa ekosistem penyediaan air bersih, maka seharusnya seluruh masyarakat Kota Gorontalo mendapatkan akses terhadap air minum. Akan tetapi data menunjukkan bahwa masih terdapat 6.64% yang belum memiliki akses terhadap air minum	<p>Faktor Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencemaran air sungai - Deforestasi di bagian hulu DAS - Luas lahan kritis yang semakin meningkat - Erosi dan sedimentasi yang tinggi <p>Akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas air sungai menurun - Kapasitas sumber air bersih yang layak menurun 	- Program peningkatan sarana penyediaan sumber air bersih	D3TLH jasa ekosistem penyediaan air masih surplus	

Kelompok Isu dan Isu Terkait	Karakteristik Wilayah	Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan antar Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterkaitan antar materi muatan RPJMD Kota Gorontalo	Muatan rencana PPLH	Keterkaitan dengan RPJD Provinsi Gorontalo
Akses terhadap sanitasi layak	<p>Topografi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kota Gorontalo pada umumnya datar (0 – 8%). - Wilayah berbukit di kecamatan Hulonthalangi, Kota Barat dan Dumbo Raya <p>Hidrologi:</p> <p>Kota Gorontalo merupakan muara dari 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Bone, Sungai Bolango dan Sungai Tamalate</p>	Berdasarkan kondisi hidrologi dan kapasitas daya dukung untuk jasa ekosistem penyediaan air bersih, maka seharusnya seluruh masyarakat Kota Gorontalo mendapatkan akses terhadap air minum. Akan tetapi data menunjukkan bahwa masih terdapat 6.64% yang belum memiliki akses terhadap air minum	<p>Faktor Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya rumah kumuh di Kota Gorontalo - Kapasitas sumber air bersih yang layak menurun <p>Akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kesehatan menurun - 	-		
Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	<p>Topografi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kota Gorontalo pada umumnya datar (0 – 8%). - Wilayah berbukit di kecamatan Hulonthalangi, Kota Barat dan Dumbo Raya - Lokasi Kota Gorontalo berada di muara DAS Bone dan Bolango 	Berdasarkan kondisi hidrologi dan kapasitas daya dukung untuk jasa ekosistem penyediaan air bersih, maka seharusnya seluruh masyarakat Kota Gorontalo mendapatkan	<p>Faktor Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya rumah kumuh di Kota Gorontalo - Kapasitas sumber air bersih yang layak menurun <p>Akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kesehatan menurun - 	-		

Kelompok Isu dan Isu Terkait	Karakteristik Wilayah	Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan antar Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterkaitan antar materi muatan RPJMD Kota Gorontalo	Muatan rencana PPLH	Keterkaitan dengan RPJD Provinsi Gorontalo
	Hidrologi: Kota Gorontalo merupakan muara dari 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Bone, Sungai Bolango dan Sungai Tamalate	akses terhadap air minum.				
Kualitas air danau	Topografi: - Kota Gorontalo pada umumnya datar (0 – 8%). - Wilayah berbukit di kecamatan Hulonthalangi, Kota Barat dan Dumbo Raya - Lokasi Kota Gorontalo berada di muara DAS Bone dan Bolango Hidrologi: Kota Gorontalo merupakan muara dari 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Bone, Sungai Bolango dan Sungai Tamalate	- Danau sebagai sumber mata pencaharian masyarakat - Fungsi ekologia danau sebagai penopang ekosisten air tawar	Faktor Penyebab: - Adanya rumah kumuh di bantaran danau Limboto Akibat: - Danau menjadi penampung limbah domestik	-		
Kualitas air sungai	Topografi: - Kota Gorontalo pada umumnya datar (0 – 8%). - Wilayah berbukit di kecamatan Hulonthalangi, Kota Barat dan Dumbo Raya	Sungai sebagai sumber air olahan PDAM bagi masyarakat Kota Gorontalo	Faktor Penyebab: - Adanya rumah kumuh di bantaran sungai Bone Akibat: - Sungai menjadi penampung limbah domestik			

Kelompok Isu dan Isu Terkait	Karakteristik Wilayah	Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan antar Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterkaitan antar materi muatan RPJMD Kota Gorontalo	Muatan rencana PPLH	Keterkaitan dengan RPJD Provinsi Gorontalo
	<p>Lokasi Kota Gorontalo berada di muara DAS Bone dan Bolango</p> <p>Hidrologi: Kota Gorontalo merupakan muara dari 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Bone, Sungai Bolango dan Sungai Tamalate</p>					
Akses terhadap hunian layak	<p>Topografi: Kota Gorontalo pada umumnya datar (0 – 8%).</p> <p>Wilayah berbukit di kecamatan Hulonthalangi, Kota Barat dan Dumbo Raya</p> <p>Lokasi Kota Gorontalo berada di muara DAS Bone dan Bolango</p>		<p>Faktor Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan lahan untuk hunian layak <p>Akibat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya akses terhadap hunian layak 			
Kota tangguh bencana	<p>Topografi: Kota Gorontalo pada umumnya datar (0 – 8%).</p> <p>Wilayah berbukit di kecamatan Hulonthalangi, Kota Barat dan Dumbo Raya</p> <p>Lokasi Kota Gorontalo berada di muara DAS Bone dan Bolango</p>	<p>Kawasan rawan banjir terletak di bagian tengah wilayah Kota Gorontalo, yaitu di Kecamatan Kota Timur, Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Barat, Duingingi, Kecamatan Kota Tengah, dan</p>	<p>Faktor Penyebab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas hutan yang kurang - Kondisi lahan kritis - Dari aspek topografi, Kota Gorontalo berada di muara DAS Bone dan DAS Bolango - Penataan drainase kota yang belum baik 			

Kelompok Isu dan Isu Terkait	Karakteristik Wilayah	Tingkat Pentingnya Potensi Dampak	Keterkaitan antar Isu Pembangunan Berkelanjutan	Keterkaitan antar materi muatan RPJMD Kota Gorontalo	Muatan rencana PPLH	Keterkaitan dengan RPJD Provinsi Gorontalo
	Hidrologi: Kota Gorontalo merupakan muara dari 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Bone, Sungai Bolango dan Sungai Tamalate	Kecamatan Dumbo Raya.	Akibat: <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi rawan bencana banjir meningkat - Kapasitas sumber air bersih yang layak menurun 			

Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2019

4.2 Analisis Gap Kebijakan RPJMD Terhadap Pencapaian TPB

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi gap atau kesenjangan TPB yang belum diakomodasi oleh kebijakan dan strategi pada RPJMD Kota Gorontalo. Dalam hal ini, RPJMD yang dianalisis merupakan Rancangan Teknokratis RPJMD yang disusun oleh Bappeda Kota Gorontalo sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2019 – 2024.

4.2.1 Gap Pencapaian TPB dalam Pilar Sosial

Indikator dalam pilar sosial yang belum mencapai target nasional ditunjukkan pada Tabel 51.

Tabel 51. Indikator dalam pilar sosial yang belum mencapai target nasional

No Target	Target	Nomor Indikator	Indikator TPB	Gap
Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan				
1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	27%
1.4	Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi	1.4.1(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	24,14%
		1.4.1(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	6,64%
		1.4.1(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	3,34%
		1.4.1(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	4,62%

No Target	Target	Nomor Indikator	Indikator TPB	Gap
		1.4.1(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	10,56%
		1.4.1(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	4,23
1.5	Membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	36 kelurahan
Tujuan 3: Kehidupan sehat dan sejahtera				
3.1	Mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Meningkat
3.3	Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Meningkat
		3.3.2(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	325 kasus
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	19,47
3.5	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	28,98
3.7	Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	25,14

No Target	Target	Nomor Indikator	Indikator TPB	Gap
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	6.22
3.a	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	Meningkat
3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Menurun
Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas				
4.1	Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1e	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	25,1
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	42,95

Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2019

4.2.2 Gap Pencapaian TPB dalam Pilar Lingkungan Hidup

Indikator dalam pilar lingkungan hidup yang belum mencapai target nasional ditunjukkan pada **Tabel 52**.

Tabel 52. Indikator dalam pilar lingkungan hidup yang belum mencapai target nasional

No Target	Target	Nomor Indikator	Indikator TPB	Gap
Tujuan 6 : Air bersih dan sanitasi yang layak				
6.1	Mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	65,28%
		6.1.1 (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	118,262 m3/detik
		6.1.1 (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	65.28%
6.2	Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	15%
		6.2.1 (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	36 kelurahan
		6.2.1 (e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Belum ada
6.3	Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia	6.3.2 (a)	Kualitas air danau.	Cemar ringan
		6.3.2 (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Cemar sedang
Tujuan 11: Kota dan Pemukiman berkelanjutan				
11.1	Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	29,39
11.5	Mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	36 kelurahan

No Target	Target	Nomor Indikator	Indikator TPB	Gap
11.6	Mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1 (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	27,15
Tujuan 12: Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab				
12.5	Mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1 (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	8 ton/hari
Tujuan 15: Ekosistem Daratan				
15.1	Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya,	15.1.1(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Tetap
15.3	Menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis,	15.3.1(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Tetap

Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2019

4.2.3 Gap Pencapaian TPB dalam Pilar Ekonomi

Indikator dalam pilar ekonomi yang belum mencapai target nasional ditunjukkan pada Tabel 53.

Tabel 53. Indikator dalam pilar ekonomi yang belum mencapai target nasional

No Target	Target	Nomor Indikator	Indikator TPB	Gap
Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi				
8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Menurun
8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan	Meningkat

No Target	Target	Nomor Indikator	Indikator TPB	Gap
	yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.		jenis kelamin dan kelompok umur.	
8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Menurun
Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur				
9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Menurun
Tujuan 10: Berkurangnya kesenjangan				
10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Meningkat
10.4	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Menurun
Tujuan 17: Kemitraan untuk mencapai tujuan				
17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	5,42

No Target	Target	Nomor Indikator	Indikator TPB	Gap
17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.18.1(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Menurun
		17.18.1(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Tetap
		17.18.1(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Tetap

Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2019

4.2.4 Gap Pencapaian TPB dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

Indikator dalam pilar hukum dan tata kelola yang belum mencapai target nasional ditunjukkan pada Tabel 54.

Tabel 54. Indikator dalam pilar hukum dan tata kelola pemerintahan yang belum mencapai target nasional

No Target	Target	Nomor Indikator	Indikator TPB	Gap
Tujuan 16 : Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh				
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	42,8

Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2019

4.3 Isu Strategis dan Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan

Isu-isu strategis tersebut kemudian dipilih isu yang paling prioritas. Analisis isu prioritas dilakukan melalui pemberian skor terhadap isu-isu strategis dengan mengacu pada parameter yang ditetapkan dalam PP Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 9 ayat (2) yaitu :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

2. Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup
3. Kinerja layanan dan jasa ekosistem
4. Intensitas dan cakupan wilayah bencana
5. Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam
6. Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
7. Kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim
8. Tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat
9. Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat
10. Ancaman terhadap perlindungan kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan masyarakat dan masyarakat 115okum adat

Skor isu prioritas adalah :

- Skor 1 : Sangat tidak berpengaruh
Skor 2 : Tidak berpengaruh
Skor 3 : Sedang
Skor 4 : Berpengaruh
Skor 5 : Sangat berpengaruh

Hasil penskoran ditunjukkan pada Lampiran 5.

Berdasarkan hasil skor terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan, maka ditetapkan isu prioritas pembangunan berkelanjutan yaitu :

1. Akses terhadap air minum layak
2. Akses terhadap sanitasi layak
3. Rumah tangga kumuh perkotaan
4. Pengelolaan sampah
5. Pengelolaan limbah cair
6. Pencemaran air

BAB V

SKENARIO KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAN PENCAPAIAN TPB

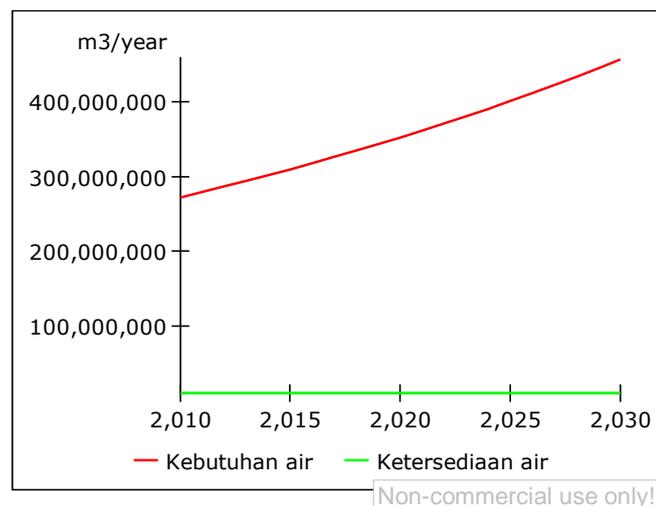
BAB V. SKENARIO KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

5.1 Skenario Kondisi Lingkungan Hidup

5.1.1 Skenario Pencapaian Ketersediaan Air Bersih

Daya Dukung Air Bersih di Kota Gorontalo

Daya dukung air bersih adalah membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan air bersih di Kota Gorontalo. Berdasarkan kondisi eksisting sumber daya air wilayah Kota Gorontalo memiliki sumber air permukaan. Untuk Air minum Kota Gorontalo disediakan oleh PDAM dengan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) yang terdiri atas IPA Kabila dengan kualitas 270 liter/detik, IPA Bulotadaa dengan kualitas 70 liter/detik, IPA Botu kualitas 20 liter/detik, IPA Duingingi kualitas 20 liter/detik, dan IPA Pilolodaa kualitas 10 liter/detik. IPA Kabila produksinya sebesar 218 liter/detik. Hasil proyeksi daya dukung air bersih di Kota Gorontalo ditunjukkan pada Gambar 39.



Gambar 41. Prediksi daya dukung air bersih di Kota Gorontalo Tahun 2010 - 2030

Hasil proyeksi daya dukung menunjukkan bahwa kondisi daya dukung air bersih di Kota Gorontalo masih defisit.

Kondisi D3TLH untuk jasa ekosistem penyediaan air bersih, Kota Gorontalo menunjukkan bahwa nilai optimal D3TLH sebesar 10,37% (tidak baik).

Arahan Program Pencapaian Tujuan Tersedianya Air Bersih

Arahan program untuk pencapaian tujuan tersedianya air bersih ditunjukkan pada Tabel 55.

Tabel 55. Arahan program dalam mewujudkan pencapaian tujuan tersedianya air

Outcomes	Para Pihak	Arahan Program
Terlayannya kebutuhan masyarakat akan air bersih	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman - Dinas PU dan Penataan ruang - Dinas Lingkungan Hidup - Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akses terhadap air bersih dengan meningkatkan kapasitas IPA. - Inventarisasi dan perlindungan ketersediaan sumber air baku - Pengelolaan air permukaan dan air hujan sebagai air baku; - Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan air; - Pengembangan infrastruktur jaringan air bersih; - Revitalisasi atau pengembangan BUMD yang menangani pengelolaan air bersih;

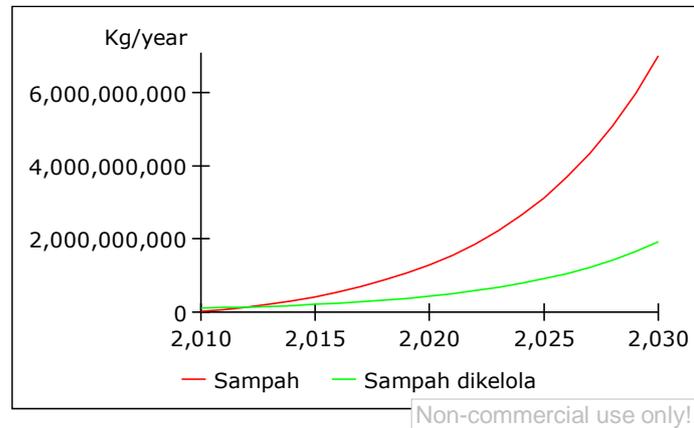
5.1.2 Skenario Pencapaian Pengelolaan Sampah dan Limbah Cair

Skenario Pengelolaan Sampah

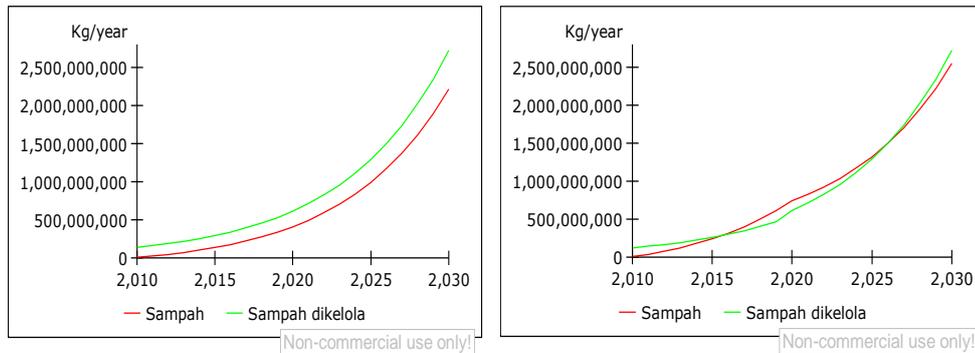
Sampah dan limbah cair merupakan permasalahan yang dihadapi oleh wilayah perkotaan. Demikian pula dengan Kota Gorontalo. Indikator persentase sampah kota yang tertangani masih ada gap 27% dengan target

pencapaian. Jumlah timbunan sampah masih ada gap 8 ton/hari dari target nasional.

Skenario pengelolaan sampah di Kota Gorontalo ditunjukkan pada **Gambar 40**.



Gambar 42. Grafik perbandingan timbunan sampah dan sampah yang dikelola di Kota Gorontalo, Tahun 2010 - 2030



(a) 3R = 15%; BS = 20%

(b) 3R = 20%; Bank Sampah 15%

Gambar 43. Grafik Skenario pengelolaan sampah melalui peningkatan kemampuan 3R dan Bank Sampah

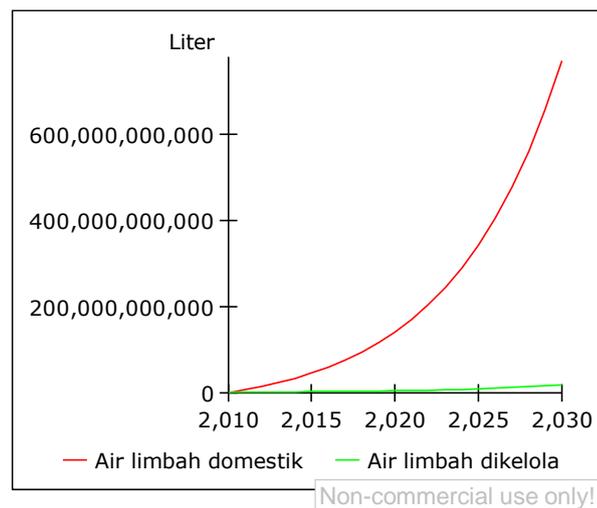
Gambar 43 (a) menggambarkan suatu skenario penerapan kebijakan pada tahun 2020 dengan meningkatkan pengelolaan 3R sebesar 15% dan Bank Sampah ditingkatkan sebesar 20%. Hasilnya menunjukkan terjadi penurunan yg signifikan pada jumlah sampah yang tidak terkelola.

Gambar 43 (b) menggambarkan suatu skenario penerapan kebijakan dengan menaikkan 3R sebesar 20% dan Bank Sampah 15%. Hasilnya menunjukkan pada Tahun 2027 seluruh sampah yg dihasilkan akan terkelola.

Skenario Pengelolaan Limbah Cair

Pengelolaan limbah cair merupakan salah satu permasalahan di Kota Gorontalo. Kota Gorontalo memiliki satu fasilitas IPLT dan 23 IPAL Komunal. Akan tetapi system pengolahannya belum efektif, sehingga system pengolahan limbah cair masih merupakan isu prioritas di Kota Gorontalo.

Skenario pengelolaan limbah cair di Kota Gorontalo ditunjukkan pada **Gambar 44**. Gambar 44 menunjukkan bahwa proporsi limbah domestik yang terkelola masih sangat rendah, disisi lain, peningkatan jumlah limbah domestic meningkat tajam mulai pada Tahun 2015. Hal ini disebabkan IPLT dan IPAL komunal di Kota Gorontalo belum berfungsi secara optimal dan efektif. Kondisi pada Gambar 44, dengan efektifitas dan kapasitas IPAL 2% dan IPLT 10%.

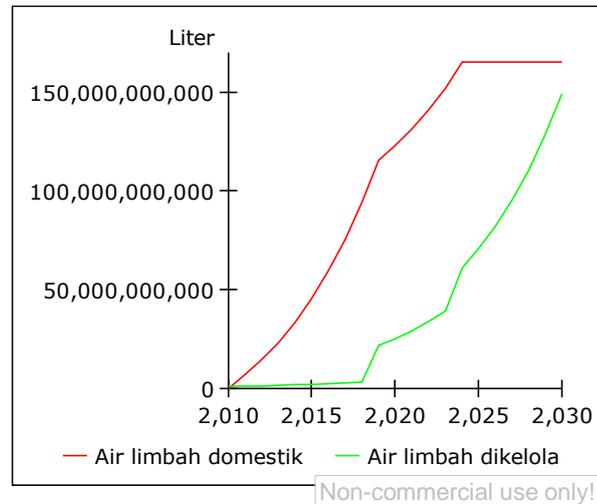


Gambar 44. Grafik perbandingan produksi limbah domestik dan limbah yang terkelola di Kota Gorontalo Tahun 2010 – 2030

(Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2019)

Jika diterapkan kebijakan Pemerintah Kota Gorotalo, pada Tahun 2020 meningkatkan kapasitas dan efektifitas IPAL sebesar 25% dan IPLT menjadi

50% dan pada Tahun 2025 kapasitas dinaikkan 50%, maka kondisi limbah domestic yang terkelola ditunjukkan pada Gambar 45.



Gambar 45. Skenario penerapan kebijakan peningkatan kapasitas IPAL Komunal 50% dan IPLT 50%

Arahan Program Pencapaian Tujuan Pengelolaan Sampah dan Limbah Cair

Berdasarkan hasil analisis dengan berbagai scenario kebijakan, maka rekomendasi yang dapat diusulkan ditunjukkan pada Tabel 56.

Tabel 56. Arahan program dalam mewujudkan pencapaian tentang pengelolaan sampah dan limbah cair

Outcomes	Para Pihak	Arahan Program
Mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan pengelolaan limbah domestik	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman - Dinas PU dan Penataan ruang - Dinas Lingkungan Hidup - Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penanganan sampah mulai dari sumber sampah (rumah tangga dan industry) melalui 3R hingga diatas 20%. - Peningkatan penanganan sampah mulai dari sumber sampah (rumah tangga dan industry) melalui bank sampah hingga diatas 20%. - Pengembangan kerja sama pengelolaan sampah - Pengembangan infrastruktur persampahan yang ramah lingkungan dan

Outcomes	Para Pihak	Arahan Program
		<p>aman terhadap risiko bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pendidikan Swasta - Lembaga Swadaya Masyarakat - Organisasi pemuda dan organisasi social lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan dalam kurikulum pendidikan usia dini dan pendidikan dasar tentang pengelolaan sampah skala rumah tangga - Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan sampah - Sosialisasi Kebersihan, Sanitasi dan Penataan Lingkungan Sehat, Aman dan Bersih Sebagai Kegiatan Preventif - Peningkatan kemampuan aparat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah domestik
Meningkatkan pengelolaan limbah cair	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman - Dinas PU dan Penataan ruang - Dinas Lingkungan Hidup - Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> - Mempercepat peningkatan kapasitas dan efektifitas IPAL komunal dan IPLT hingga 50%, khususnya di wilayah-wilayah padat penduduk - Peningkatan pengawasan terhadap pihak industry/swasta dalam penataan pengelolaan limbah cair.
Meningkatkan akses terhadap sanitasi layak	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman - Dinas PU dan Penataan ruang - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan - Filan Tropi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Kebersihan, Sanitasi dan Penataan Lingkungan Sehat, Aman dan Bersih Sebagai Kegiatan Preventif - Meningkatkan jumlah kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Outcomes	Para Pihak	Arahan Program
		- Memanfaatkan program CSR dari pihak swasta untuk pembangunan sarana sanitasi layak

Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2019

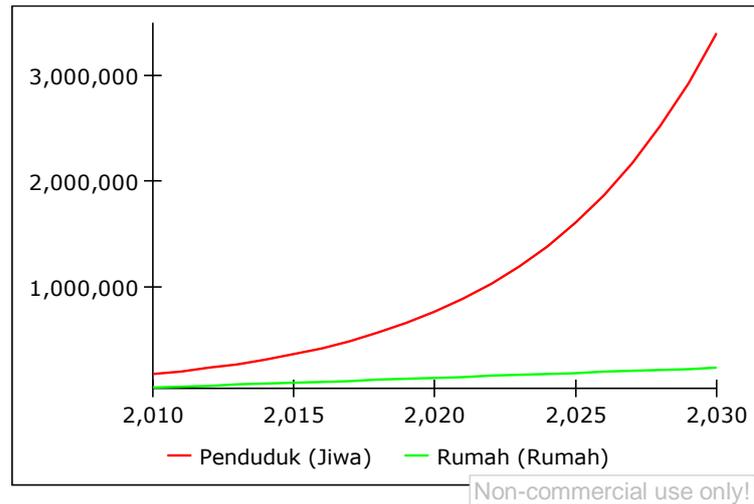
5.1.3 Skenario Pencapaian Hunian Layak

Permasalahan pemukiman di perkotaan merupakan permasalahan yang serius. Masalah pemukiman dapat mengakibatkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan dan kawasan kumuh di wilayah perkotaan. Demikian halnya dengan kondisi Kota Gorontalo. Hasil evaluasi menunjukkan, terjadi peningkatan persentase rumah tangga kumuh di Kota Gorontalo. Pada Tahun 2015 sebesar 12,78%, Tahun 2016 sebesar 13,97%, Tahun 2017 meningkat menjadi 17,86%. Oleh sebab itu, pencapaian TPB terhadap hunian layak menjadi prioritas.

Daya Dukung Lahan Pemukiman di Kota Gorontalo

Daya dukung wilayah untuk permukiman, dapat diartikan sebagai kemampuan wilayah dalam menyediakan lahan permukiman guna menampung jumlah penduduk tertentu untuk bertempat tinggal secara layak (Muta'ali, 2015). Metode perhitungan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan lahan untuk pemukiman berdasarkan RTRW Kota Gorontalo Tahun 2019 – 2039 dan kebutuhan lahan minimal untuk setiap penduduk. Kebutuhan lahan minimal untuk pemukiman sebesar 0,01 Ha (BSN, 2004). Tingkat pertumbuhan pembangunan rumah di Kota Gorontalo sebesar 7%/tahun.

Ketersediaan lahan untuk pemukiman di Kota Gorontalo sebesar 2080,42 Ha (BAPPEDA Kota Gorontalo, 2019). Angka pertumbuhan rumah di Kota Gorontalo sebesar 4.5%. Perbandingan antara kebutuhan rumah dan jumlah penduduk di Kota Gorontalo ditunjukkan pada Gambar 46.

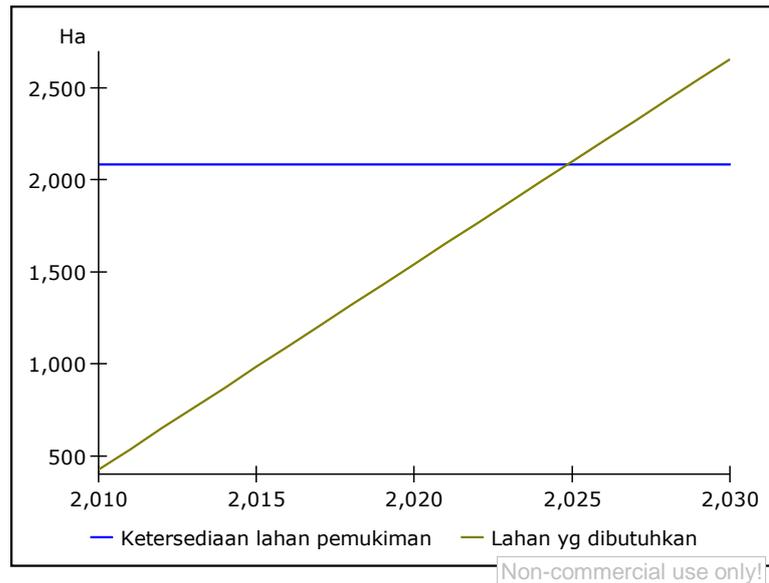


Gambar 46. Grafik hubungan antara pertumbuhan penduduk dan kebutuhan rumah di Kota Gorontalo Tahun 2010 - 2030

Tabel 57. Kondisi Daya Dukung Lahan Pemukiman di Kota Gorontalo Tahun 2010 - 2030

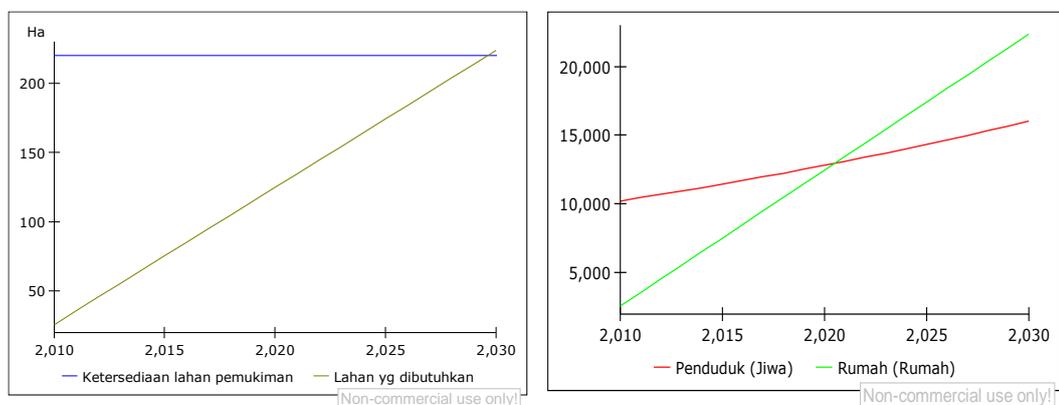
No	Tahun	Ketersediaan Lahan (Ha)	Kebutuhan Lahan (Ha)	Status	Keterangan
1	2010	2080.42	425.32	Sl > Dl	Surplus
2	2011	2080.42	518.94	Sl > Dl	Surplus
3	2012	2080.42	612.56	Sl > Dl	Surplus
4	2013	2080.42	706.17	Sl > Dl	Surplus
5	2014	2080.42	799.79	Sl > Dl	Surplus
6	2015	2080.42	893.41	Sl > Dl	Surplus
7	2016	2080.42	987.03	Sl > Dl	Surplus
8	2017	2080.42	1080.65	Sl > Dl	Surplus
9	2018	2080.42	1174.27	Sl > Dl	Surplus
10	2019	2080.42	1267.89	Sl > Dl	Surplus
11	2020	2080.42	1361.51	Sl > Dl	Surplus
12	2021	2080.42	1455.13	Sl > Dl	Surplus
13	2022	2080.42	1548.74	Sl > Dl	Surplus
14	2023	2080.42	1642.36	Sl > Dl	Surplus
15	2024	2080.42	1735.98	Sl > Dl	Surplus
16	2025	2080.42	1829.6	Sl > Dl	Surplus
17	2026	2080.42	1923.22	Sl > Dl	Surplus
18	2027	2080.42	2016.84	Sl > Dl	Surplus
19	2028	2080.42	2110.46	Sl < Dl	Defisit
20	2029	2080.42	2204.08	Sl < Dl	Defisit
21	2030	2080.42	2297.7	Sl < Dl	Defisit

Sumber : Hasil analisis Tim KLHS, 2019

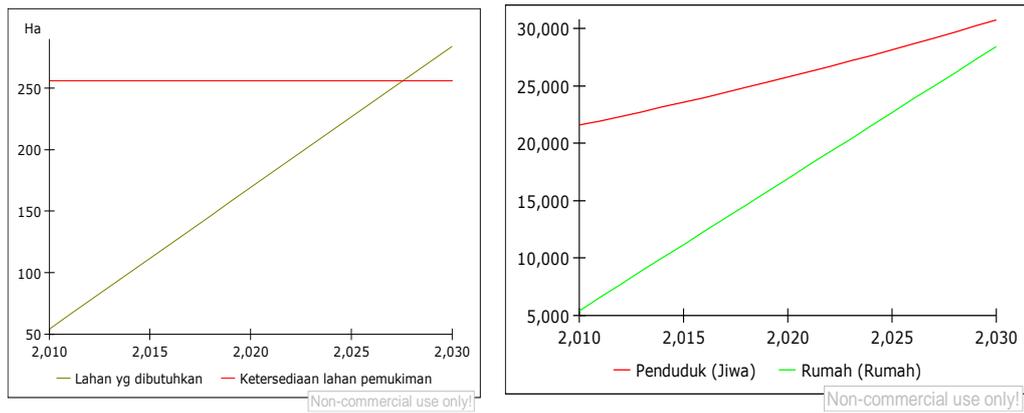


Gambar 47. Grafik daya dukung lahan pemukiman di Kota Gorontalo Tahun 2010 – 2030
(Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2019)

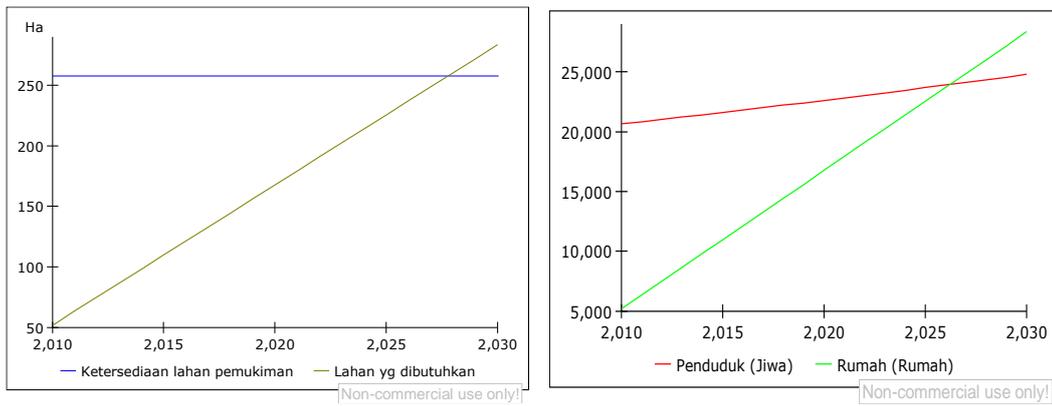
Hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Gorontalo akan mengalami defisit lahan untuk pemukiman pada Tahun 2028. Kondisi per kecamatan menunjukkan bahwa kecamatan yang akan cepat mengalami deficit lahan pemukiman adalah Kecamatan Dumbo Raya dan Kecamatan Hulonthalangi. Sebagian besar kecamatan akan mengalami deficit pada Tahun 2027 – 2028. Kondisi ini jika tidak ditindaklanjuti dari sekarang, maka kondisi deficit akan semakin dipercepat.



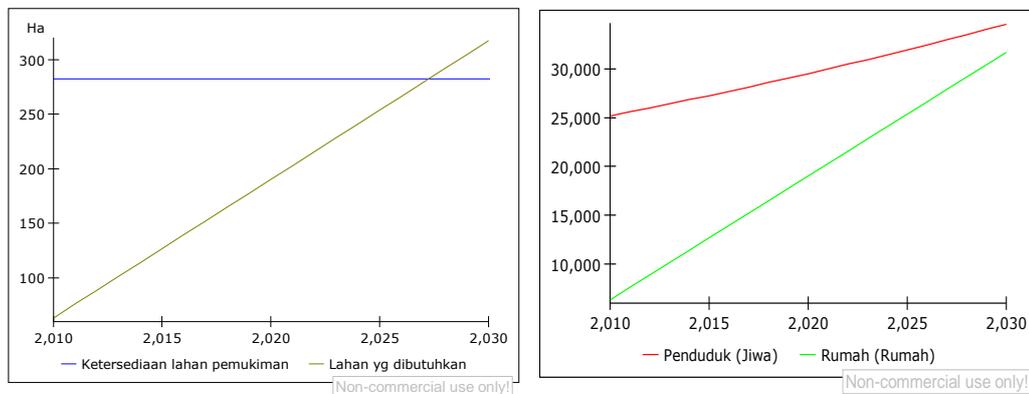
Gambar 48. Grafik daya dukung lahan pemukiman dan kebutuhan rumah di Kecamatan Kota Barat Tahun 2010 – 2030
(Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2019)



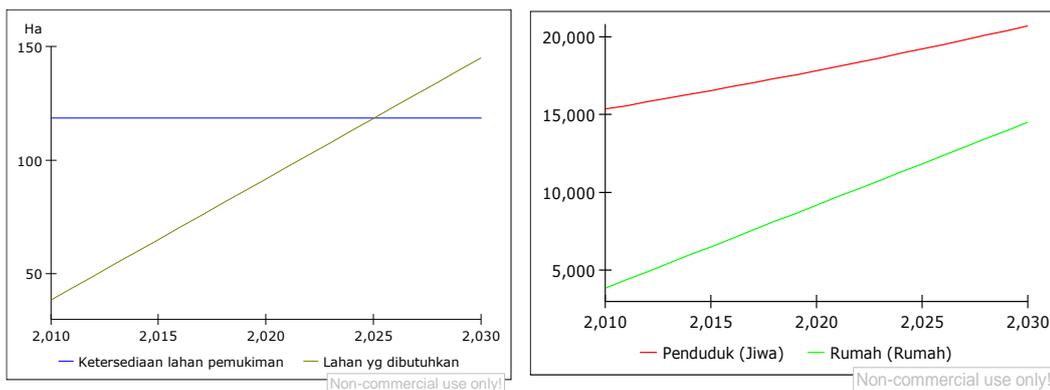
Gambar 49. Grafik daya dukung lahan pemukiman dan kebutuhan rumah di Kecamatan Duingi Tahun 2010 – 2030
(Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2019)



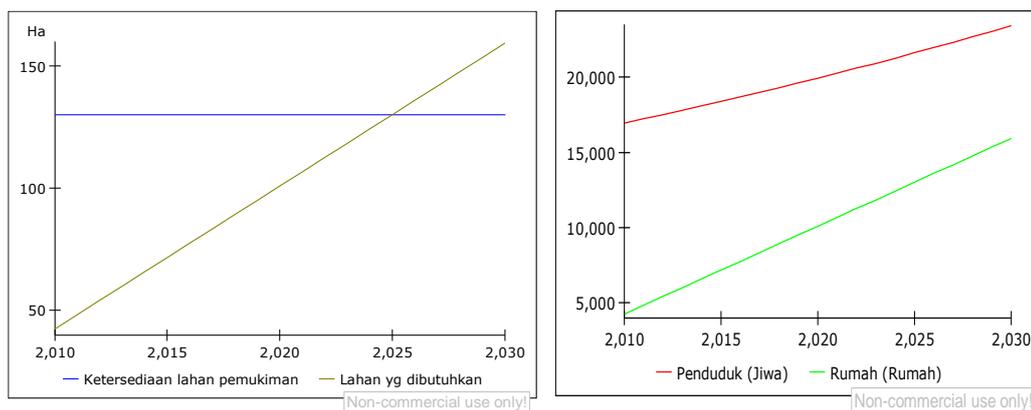
Gambar 50. Grafik daya dukung lahan pemukiman dan kebutuhan rumah di Kecamatan Kota Selatan Tahun 2010 – 2030
(Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2019)



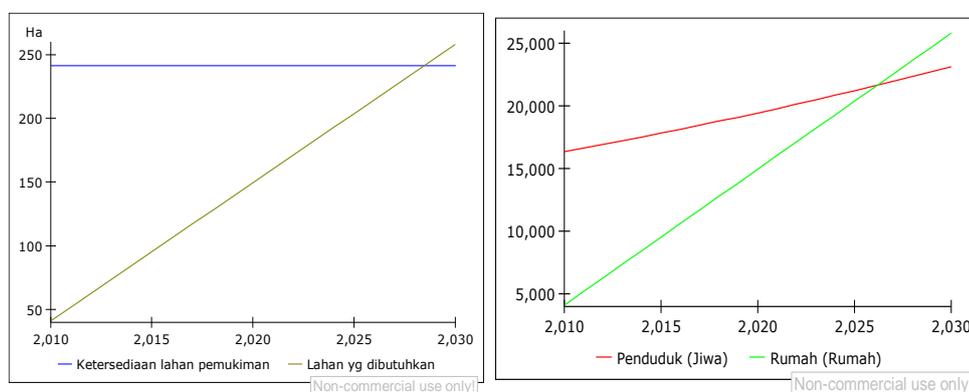
Gambar 51. Grafik daya dukung lahan pemukiman dan kebutuhan rumah di Kecamatan Kota Timur Tahun 2010 – 2030
(Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2019)



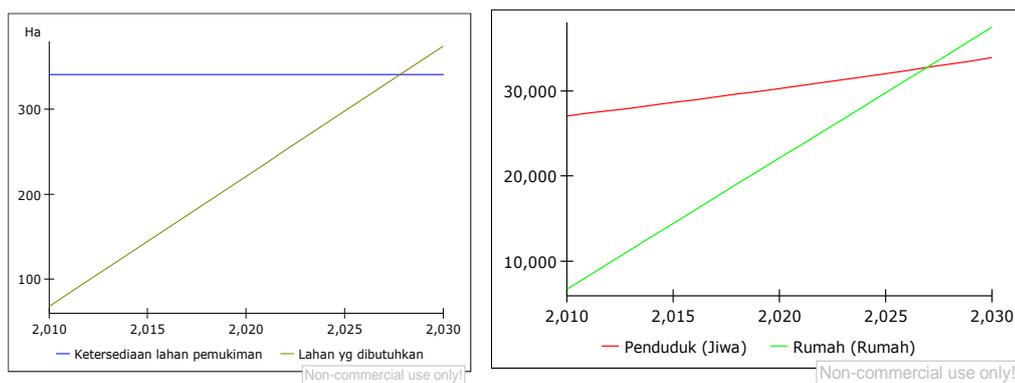
Gambar 52. Grafik daya dukung lahan pemukiman dan kebutuhan rumah di Kecamatan Hulonthalangi Tahun 2010 – 2030
(Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2019)



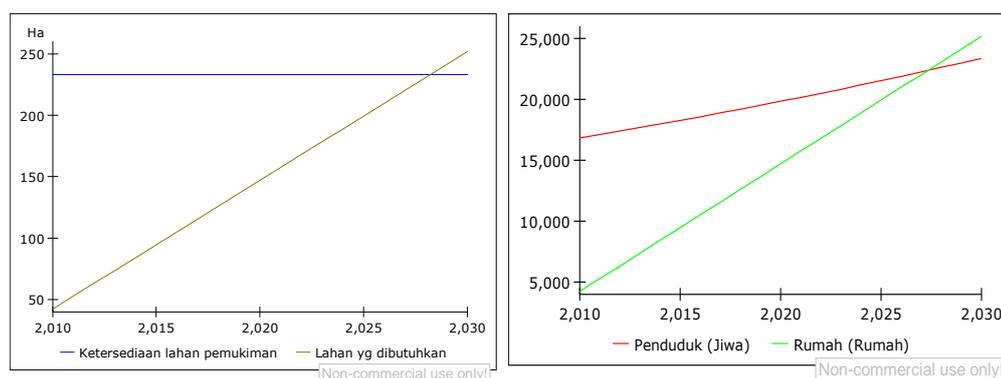
Gambar 53. Grafik daya dukung lahan pemukiman dan kebutuhan rumah di Kecamatan Dumbo Raya Tahun 2010 – 2030
(Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2019)



Gambar 54. Grafik daya dukung lahan pemukiman dan kebutuhan rumah di Kecamatan Kota Utara Tahun 2010 – 2030
(Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2019)



Gambar 55. Grafik daya dukung lahan pemukiman dan kebutuhan rumah di Kecamatan Kota Tengah Tahun 2010 – 2030
(Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2019)



Gambar 56. Grafik daya dukung lahan pemukiman dan kebutuhan rumah di Kecamatan Sibatana Tahun 2010 – 2030
(Sumber : hasil analisis tim KLHS, 2019)

Arahan Program Pencapaian Tujuan Hunian Layak

Penduduk dan pemukiman merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Pertumbuhan penduduk akan diiringi oleh kebutuhan akan rumah, sehingga kebutuhan lahan untuk pemukiman akan semakin meningkat. Kecenderungan perubahan tutupan lahan dan pemanfaatan lahan permukiman untuk kegiatan selain pemukiman dapat memicu percepatan deficit lahan untuk pemukiman.

Tabel 58. Arahan program dalam pencapaian tentang hunian layak

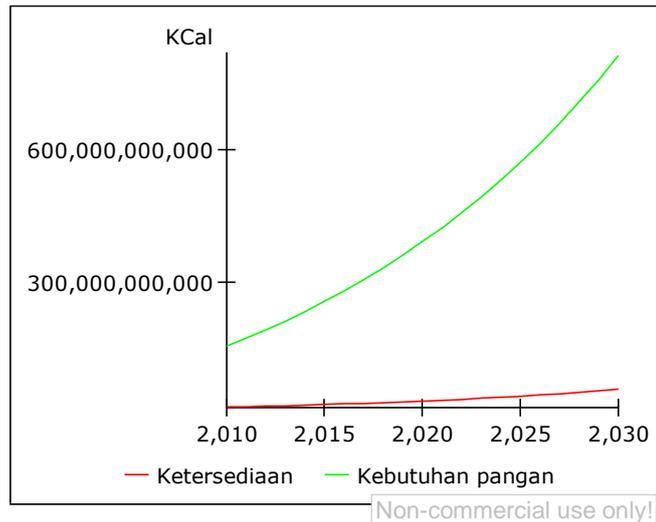
Outcomes	Para Pihak	Rekomendasi
Mencegah terjadinya peningkatan	- Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman	- Mengendalikan kegiatan pembangunan di Kota Gorontalo melalui

Outcomes	Para Pihak	Rekomendasi
luasan kawasan kumuh perkotaan	- Dinas PU dan Penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> penetapan KDB dan KDH yg sesuai dengan fungsi kawasan di atasnya - Penataan permukiman khususnya di Kecamatan Hulonthalangi dan Kecamatan Dumbo Raya
Mencegah konversi lahan untuk pemukiman	- Dinas PU dan Penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan lahan sawah pertanian irigasi yang berada di Kecamatan Utara, Kota Timur dan Sipatana - Dukungan kebijakan penerapan pajak progresif pada kegiatan pembangunan permukiman di lahan produktif
Kota Tangguh Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - BPBD Kota Gorontalo - Dinas Sosial 	- Meningkatkan jumlah kelurahan tangguh bencana

5.1.4 Skenario Pencapaian Ketersediaan Pangan

Kondisi daya dukung dan daya tampung untuk jasa ekosistem penyediaan pangan di Kota Gorontalo menunjukkan berada dalam kondisi baik dengan nilai optimal 56% (DLH Kota Gorontalo, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Gorontalo memiliki potensi penyediaan pangan yang baik. Akan tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, maka potensi tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik.

Skenario pencapaian kebutuhan pangan di Kota Gorontalo dianalisis berdasarkan kebutuhan kalori penduduk dan ketersediaan sumber kalori yang berasal dari ternak sapi, kambing dan ayam. Sumber kalori utama yang dianalisis adalah beras. Skenario daya dukung pangan di Kota Gorontalo ditunjukkan pada Gambar 57.



Gambar 57. Skenario daya dukung pangan di Kota Gorontalo Tahun 2010 – 2030

Gambar 57 menunjukkan bahwa pada kebutuhan pangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sedangkan ketersediaan sumber pangan mengalami peningkatan yg sangat lambat. Hal ini disebabkan karena ketersediaan lahan untuk pangan di Kota Gorontalo yg sangat minim.

Tabel 59. Arah program dalam mewujudkan pencapaian ketahanan pangan

Outcomes	Para Pihak	Rekomendasi
Terciptanya ketahanan pangan di Kota Gorontalo	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pangan - Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian - Bulog - Lembaga masyarakat bidang pertanian, peternakan dan perikanan - Lembaga jasa keuangan atau koperasi - Perguruan Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan ketersediaan, distribusi dan akses pangan masyarakat - Peningkatkan akses terhadap pemasukan bahan pangan dari daerah di sekitar Kota Gorontalo untuk menopang ketersediaan bahan pangan - Pemantauan stabilitas harga bahan pangan - Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan - Intensifikasi pertanian melalui peningkatan teknologi urban farming - Perlindungan lahan pertanian pangan melalui

Outcomes	Para Pihak	Rekomendasi
		penetapan lahan LP2B dan pelindungannya (Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Sipatana dan Kota Timur)

5.2 Skenario Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam pencapaian TPB di Kota Gorontalo hingga Tahun 2024, diperlukan upaya tambahan. Upaya tambahan dilaksanakan untuk permasalahan air, persampahan, limbah cair, hunian layak dan pangan dengan melihat pada kondisi eksisting dan target, serta kondisi daya dukung lingkungan hidup. Skenario pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan muatan daya dukung pangan dan penyediaan air, serta masalah persampahan.

Tabel 60. Skenario pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan muatan daya dukung air, hunian layak, masalah persampahan dan pangan

Muatan	Daya Dukung		Target TPB			Rekomendasi	
	Eksisting	Proyeksi	Indikator	Eksisting 2018	2020		2030
Air bersih dan sanitasi layak	Melampaui	Melampaui	6.1.1(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	34,72%	32.19%	Meningkat menjadi 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlayannya kebutuhan masyarakat akan air bersih: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, merata dan terjangkau; - Pengelolaan air Hujan sebagai air baku; - Pengelolaan air Sungai Bone, Sungai Bolango sebagai sumber air - Pengelolaan pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih - Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan air bagi industri dan pertanian; - Pemberdayaan lembaga swadaya masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air untuk irigasi pertanian; 2. Terciptanya lingkungan Kota Gorontalo yang bersih dan sehat: <ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi dan perlindungan ketersediaan sumber air baku - Revitalisasi PDAM - Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dan pengolahan limbah yang ramah lingkungan - Pembangunan fasilitas pengelolaan limbah terpadu
			6.1.1(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	0.338 m ³ /detik	0.468 m ³ /detik	118,6 m ³ /detik	
			6.1.1(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	34.72%		Meningkat menjadi 100%	
			6.2.1(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	85	85	Meningkat menjadi 100%	
			6.2.1(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	4	10	Meningkat	
			6.2.1(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala	Ada		Meningkat	

Muatan	Daya Dukung		Target TPB			Rekomendasi	
	Eksisting	Proyeksi	Indikator	Eksisting 2018	2020		2030
			kota, kawasan dan komunal.				<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas dan efektivitas IPLT dan IPAL komunal menjadi 50% - Meningkatkan pengawasan pengelolaan limbah cair
			6.3.2(a) Kualitas air danau	Cemar ringan	Cemar ringan	Kualitas air meningkat	
			6.3.2(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Cemar sedang	Cemar Ringan	Kualitas air meningkat	
Kota dan Pemukiman berkelanjutan	Melampaui	Melampaui	11.1.1(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	70,61%	75.22	Meningkat menjadi 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pengelolaan sampah terpadu: <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dan pengolahan sampah yang ramah lingkungan - Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah terpadu - Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat salah satunya mengenai pengelolaan sampah dan limbah secara benar dan ramah lingkungan - Meningkatkan kapasitas dan efektivitas 3R dan Bank Sampah 2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Kebersihan, Sanitasi dan Penataan Lingkungan Sehat, Aman dan Bersih Sebagai Kegiatan Preventif - Sosialisasi Pengelolaan Sampah pada skala rumah tangga dan lingkungan - Pendidikan dini pengelolaan Sampah pada skala rumah tangga dan lingkungan di sekolah dan pesantren - Peningkatan kemampuan aparat dan partisipasi
			11.6.1(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani	52,85%		Menjadi 80%	
			12.5.1(a) Jumlah timbulan sampah yg didaur ulang	12 ton/hari		Menjadi 20 ton/hari	

Muatan	Daya Dukung		Target TPB			Rekomendasi
	Eksisting	Proyeksi	Indikator	Eksisting 2018	2020	
						<p>masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah domestic</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelibatan generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman dan bersih <p>3. Terwujudnya pemukiman yang layak, aman dan bersih:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan infrastruktur penanganan sampah dan sanitasi di kawasan kumuh - Penanganan sampah dan sanitasi di kawasan kumuh - Memfasilitasi jaminan hak bermukim pada lahan dan akses untuk kontrol atas tanah dan property - Pengadaan kawasan perumahan yang layak huni dan aman

BAB VI

ALTERNATIF REKOMENDASI KLHS UNTUK RPJMD KOTA GORONTALO

BAB VI. ALTERNATIF REKOMENDASI KLHS UNTUK RPJMD KOTA GORONTALO

Alternatif adalah usulan-usulan pengganti KRP untuk menghilangkan, meminimalkan atau mengurangi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul dari hasil kajian untuk penajaman rumusan RPJMD.

Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2016, perumusan alternatif kebijakan rencana, program RPJMD Provinsi Gorontalo 2018 – 2022 berupa:

- a. Perubahan tujuan atau target;
- b. Perubahan strategi pencapaian target;
- c. Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;
- d. Perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;
- e. Penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan;
- f. Pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau
- g. Pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup

6.1 Arah Kebijakan Kota Gorontalo

6.1.1 Proses Penyusunan RPJMD Kota Gorontalo

Penyusunan RPJMD Kota Gorontalo mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2027. Dalam proses penyusunan RPJMD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan dan dilakukan melalui pendekatan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- 1) Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2) Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 3) Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- 4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Tingkat Kota, Tingkat Provinsi, hingga nasional.

Penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024 dilakukan menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja (performance budgeting) yang berorientasi pada hasil (money follow program), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu :

- 1) Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- 2) Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
- 3) Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Selain pendekatan-pendekatan tersebut, penyusunan RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2020 – 2024 juga disinergikan dengan agenda global yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor

59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres SDGs). Sinergitas SDGs kedalam dokumen RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2019 – 2024 bertujuan menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Oleh karenanya, dalam penyusunan RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2019-2024, dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, serta isu-isu global.

Penyusunan RPJMD dilakukan berbasis pada penerapan e-planning melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 disusun secara berkesinambungan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Persiapan Penyusunan RPJMD

Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim penyusun yang terdiri dari kelompok perumus dan kelompok pembahas, menyusun jadwal/agenda pelaksanaan, dan menetapkan narasumber dan tim ahli untuk membantu dalam penyusunan RPJMD.

- 2) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap-tahap penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program OPD dan lintas OPD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif.

3) Penyusunan Rancangan RPJMD

Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi seluruh Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

4) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMD Kota Gorontalo. Tujuan Musrenbang RPJMD adalah untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD Kota Gorontalo menjadi rancangan akhir RPJMD Kota Gorontalo.

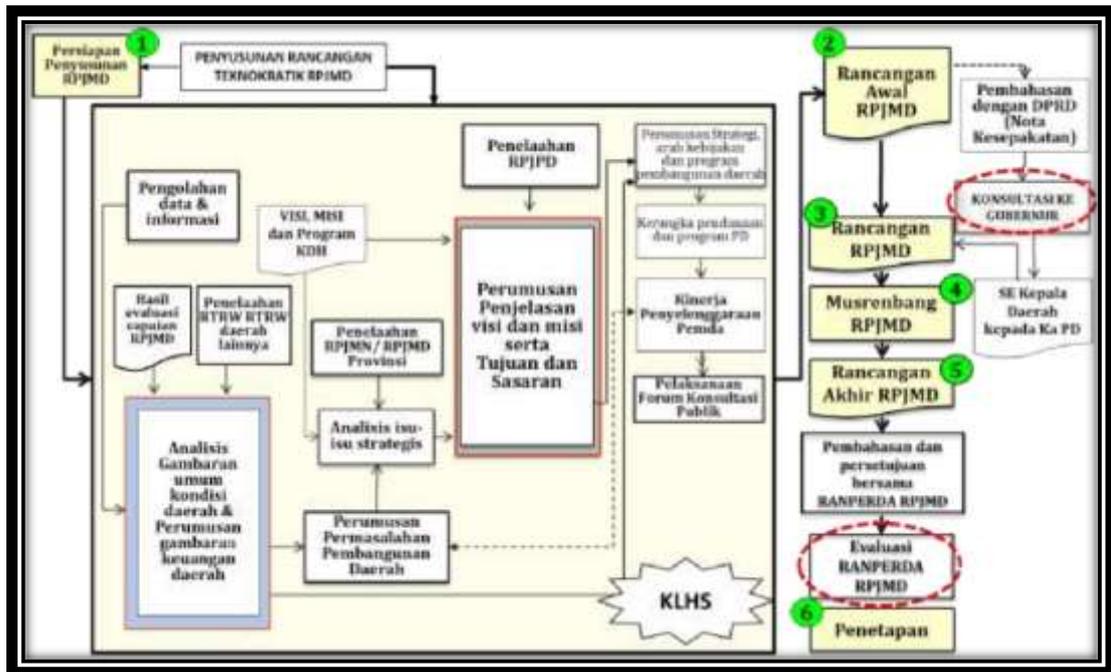
5) Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala PD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil Musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD Kota Gorontalo diajukan dan dikonsultasikan kepada Gubernur Gorontalo.

6) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

Tahapan ini meliputi proses penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Kota Gorontalo 2019-2024 dalam Sidang Paripurna

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi peraturan daerah.



Gambar 58. Proses penyusunan RPJMD Kota Gorontalo
(Sumber : Ranwal RPJMD Kota Gorontalo)

6.1.2 Visi, Misi Pembangunan Kota Gorontalo

Visi pembangunan daerah Kota Gorontalo untuk periode RPJMD Tahun 2019-2024 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

**“KOTA GORONTALO SEJAHTERA, MAJU, AKTIF, RELIGIUS,
TERDIDIK”
(KOTA SMART)**

Mendalami visi pembangunan tersebut serta mencermati perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud harus dapat memperjelas posisi dan peran Kota Gorontalo dalam perubahan yang terjadi baik di lingkup regional, nasional, maupun global. Perwujudan dari visi

pembangunan tersebut kemudian diterjemahkan kedalam pilar-pilar visi yang pengertiannya sebagai berikut :

Tabel 61. Perwujudan Visi RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2019-2024

Visi	Pilar-Pilar Visi	Penjelasan Pilar-Pilar Visi
KOTA SMART	Sejahtera	Adalah mewujudkan Kota yang memiliki <i>Human Development Index (HDI)</i> atau Indeks Pembangunan Manusia yang baik, dimana indikator dan ukuran keberhasilannya dinilai dari aspek Pendidikan, Kesehatan, dan Pendapatan Ekonomi Masyarakat.
	Maju	Adalah kondisi dimana pembangunan Kota Gorontalo menjadi lebih maju dan menjadi lebih baik. Hal ini ditandai dengan semakin baiknya infrastruktur pembangunan daerah dan semakin baiknya tingkat perekonomian serta daya saing daerah.
	Aktif	Adalah keadaan dimana pemerintah dan Masyarakat Kota Gorontalo lebih aktif dan giat dalam bekerja dan berusaha. Hal ini ditandai dengan adanya tingkat produktivitas masyarakat dan kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public menunjukkan dinamika yang semakin tinggi
	Religius	Adalah kondisi dimana pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo memiliki ketaatan yang tinggi kepada agama dan adat istiadat setempat. Hal ini dibuktikan dengan adanya penghayatan dan pengamalan ajaran agama oleh pemeluknya secara konsisten dan konsekwen serta perilaku pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo semakin baik dalam menghargai adat istiadat dan kebudayaan Gorontalo; semakin baik dalam hal etika dan sopan santun; dan semakin baik dalam hal toleransi antar sesama.
	Terdidik	Adalah keadaan dimana pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo memiliki wawasan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan/keterampilan hidup, baik dalam bentuk life skill maupun dalam bentuk soft skill, melalui pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal maupun pendidikan informal, sehingga mampu menciptakan aparatur pemerintahan dan masyarakat yang benar-benar terampil.

Perwujudan atas Visi serta pilar-pilar penjelasannya tersebut diatas kemudian dirumuskan orientasi pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 kedalam rumusan-rumusan misi operasional untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Untuk mempertegas perwujudan visi pembangunan tersebut maka rumusan Misi Pembangunan Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesetaraan bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan public lainnya yang terjangkau dan berkualitas;
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal disemua sector publik;
3. Penguatan kapasitas Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM), Koperasi dan pengembangan sector perekonomian primer lainnya;
4. Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas organisasi pemerintah, dan kualitas sumberdaya aparatur;
5. Mengembangkan kualitas hidup masyarakat yang religious dan berbudaya;
6. Penguatan daya saing kota sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Teluk Tomini.

Dalam upaya menyamakan persepsi terhadap Misi serta mengurangi potensi multi tafsir dalam memahami butir-butir Misi, maka penjabaran Misi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi *“Mewujudkan kesetaraan bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan public lainnya yang terjangkau dan berkualitas”*

Difokuskan pada upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia melalui variable pembentuknya yang meliputi luasnya jangkauan akses pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan layanan public lainnya yang berkualitas.

Misi *“Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal disemua sector public”*

Difokuskan pada peningkatan ketersediaan infrastruktur perkotaan pada kawasan-kawasan tertentu yang dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan daya tarik kota.

Misi *“Penguatan kapasitas Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM), Koperasi dan pengembangan sector perekonomian primer lainnya”*

Difokuskan pada penguatan serta pengembangan koperasi dan usaha mikro (KUM) dalam meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, termasuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa. Keberadaan UMK dan koperasi sebagai salah satu upaya penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi angka pengangguran.

Misi *“Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas organisasi pemerintah, dan kualitas sumberdaya aparatur”*

Difokuskan pada Pemerintahan yang dibentuk berlandaskan prinsip *“Good Governance”* dan *“Clean Government”* tercermin melalui kinerja aparatur pemerintah yang profesional dalam melayani kebutuhan masyarakat yang semakin variatif, serta meningkatnya akuntabilitas dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah.

Misi *“Mengembangkan kualitas hidup masyarakat yang religius dan berbudaya”*

Difokuskan pada pengembangan kualitas hidup masyarakat yang religius dan berbudaya tercermin melalui perwujudan ketentraman hidup antar umat beragama dan pelestarian adat dan budaya daerah yang berpedoman pada falsafah dasar yaitu *“Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah”*.

Misi *“Penguatan daya saing kota sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Teluk Tomini”*

Difokuskan pada peningkatan kualitas daya saing Kota Gorontalo sebagai kota terdepan disektor perdagangan dan jasa di Kawasan Teluk Tomini melalui pengembangan inovasi dan teknologi serta menciptakan iklim investasi yang kondusif

6.2 Rumusan Alternatif Berdasarkan Visi dan Misi RPJMD Kota Gorontalo 2019 – 2024

Subbab ini berisi rumusan pilihan atau alternatif yang dapat ditempuh untuk mengatasi gap dan/atau kesenjangan KRP pada kebijakan dan strategi RPJMD yang telah diidentifikasi pada subbab sebelumnya. Rumusan alternatif dan rekomendasi pada subbab ini merupakan hasil kegiatan diskusi antara kelompok kerja KLHS dan OPD terkait yang dilaksanakan pada tanggal 2

September 2019 di Manado. Pemberian rumusan alternatif dan rekomendasi ditujukan pada pencapaian sasaran dan target TPB yang akan dicapai dan/atau diprioritaskan untuk dicapai; hal tersebut disajikan pada Tabel 62

Tabel 62. Rumusan alternatif rekomendasi berdasarkan visi dan misi RPJMD 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Gap/Kekurangan	Alternatif rekomendasi	Rekomendasi
Misi 1: Mewujudkan kesetaraan bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan public lainnya yang terjangkau dan berkualitas				
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Publik Lainnya	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kesadaran untuk menempuh pendidikan usia dini (PAUD) - Tingginya biaya pendidikan di tingkat PAUD - Masih rendahnya angka partisipasi sekolah di tingkat SMP 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan fasilitas pendidikan usia dini yang terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan di bawah rata-rata - Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan dasar untuk semua kalangan 	Meningkatkan kualitas pengajar dan mutu pendidikan, perbaikan dan pengoptimalan penggunaan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan akses pendidikan yang inklusif dan merata, pelaksanaan program wajib pendidikan dasar Sembilan tahun, serta tersosialisasinya arahan mengenai pentingnya pendidikan
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan - Masih rendahnya prevalensi penggunaan metode kontrasepsi - Tingginya prevalensi penyalahgunaan narkoba - Tingginya prevalensi merokok pada remaja - Terjadi peningkatan prevalensi HIV - Terjadi peningkatan angka kematian ibu (AKI) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya - Pelayanan kefarmasian - Peningkatan pengawasan obat – makanan, keamanan pangan dan bahan berbahaya - Pemerataan distribusi tenaga kesehatan di seluruh wilayah Kota Gorontalo 	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memberikan sosialisasi untuk meningkatnya kesadaran menjaga kesehatan, dan meningkatkan fasilitas layanan kesehatan seksual dan reproduksi
	Meningkatnya layanan publik yang mendorong pendapatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi/review terhadap efektifitas pelaksanaan dokumen perjanjian kemitraan/ kerja sama yang sudah ada 	Revitalisasi/review terhadap efektifitas pelaksanaan dokumen perjanjian kemitraan/ kerja sama yang sudah ada

Tujuan	Sasaran	Gap/Kekurangan	Alternatif rekomendasi	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal 		
Misi 2: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal disemua sektor publik				
Meningkatnya jumlah Kawasan ekonomi, pemerintahan, dan permukiman yang memiliki infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya jumlah Kawasan ekonomi, pemerintahan, dan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya RDTR di Kota Gorontalo - Masih terdapat permukiman kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> - Segera menyelesaikan proses penetapan RDTR 	<ul style="list-style-type: none"> - Menata pemukiman kumuh dan menyediakan kawasan perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan dilengkapi dengan fasilitas pelayanan dasar terhadap sanitasi, kebersihan, dan keamanan lingkungan pemukiman yang memadai dan merata - Meningkatkan ruang terbuka hijau pada wilayah pemukiman untuk tetap menjaga kualitas udara lingkungan. - Mengadakan dan meningkatkan akses air minum bersih secara merata yang disertai dengan pengelolaan air limbah dan efisiensi penggunaan air secara terpadu di semua sektor. - Menambah kapasitas layanan angkut sampah dan pengelolaan air limbah secara optimal untuk menjamin akses berkelanjutan terhadap air minum bersih, sanitasi, dan kebersihan yang memadai bagi semua kalangan
	Meningkatnya capaian penilaian kualitas lingkungan hidup perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya infrastruktur kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan - Belum tersedia infrastuktur yang aman untuk penyandang difabilitas - Rendahnya infrastruktur pengelolaan sampah - Kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah cair - Belum optimalnya infrastruktur pengolahan limbah cair yang tersedia - Kurangnya daya dukung ketersediaan air bagi masyarakat - Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah berbasis rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan dalam kurikulum pendidikan usia dini dan pendidikan dasar tentang pengelolaan sampah skala rumah tangga - Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan sampah - Sosialisasi Kebersihan, Sanitasi dan Penataan Lingkungan Sehat, Aman dan Bersih Sebagai Kegiatan Preventif - Peningkatan kemampuan aparat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah domestik 	

Tujuan	Sasaran	Gap/Kekurangan	Alternatif rekomendasi	Rekomendasi
Misi 3 : Penguatan kapasitas Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM), Koperasi dan pengembangan sector perekonomian primer lainnya				
Menurunnya presentase kemiskinan serta tingkat Pengangguran	Meningkatnya daya beli masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya daya jual dan daya saing produk unggulan lokal dalam pasar regional /nasional /global - Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka dan belum memadainya infrastruktur pendukung perlindungan hak penyandang difabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akses jasa keuangan/ permodalan, teknologi dan pemasaran - Melakukan revitalisasi pusat perdagangan di Kota Gorontalo sebagai wadah untuk pedagang kaki lima dan UMKM - Menjaga stabilitas harga jual barang - Peningkatan penggunaan produk lokal dalam berbagai kegiatan - Peningkatan standar upah tenaga kerja untuk meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat - Pembuatan kebijakan yang mengatur pengendalian harga bahan pokok dan bahan strategis lainnya - Melaksanakan operasi pasar secara rutin 	<p>Meningkatkan iklim usaha/investasi dengan menghilangkan semua jenis hambatan/kendala perijinan dan pengelolaan usaha dengan selalu memperhatikan daya dukung potensi wilayah, menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta mengutamakan keberpihakan terhadap upaya penumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar.</p> <p>Meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas UMKM untuk menambah nilai jual dan daya saing komoditas lokal, melalui pembuatan kebijakan pembangunan yang mendukung kemudahan akses UMKM pada jasa keuangan, teknologi informasi dan perdagangan</p>
	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Penyerapan tenaga kerja di sector industry manufaktur masih rendah - Meningkatnya pengangguran 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian pelatihan dan pendidikan ketrampilan bagi kaum pemuda - Penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan ketrampilan kaum pemuda terutama berkaitan dengan keterampilan praktis 	
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya peran koperasi dan usaha mikro untuk mengatasi masalah 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akses jasa keuangan/ permodalan, teknologi dan pemasaran 	

Tujuan	Sasaran	Gap/Kekurangan	Alternatif rekomendasi	Rekomendasi
		pengangguran dan ekonomi masyarakat	- Revitalisasi/review terhadap efektifitas pelaksanaan dokumen perjanjian kemitraan/kerja sama yang sudah ada	
Misi 4 : Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas organisasi pemerintah, dan kualitas sumberdaya aparatur				
Terwujudnya birokrasi yang bersih, professional, dan akuntabel	Meningkatnya kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan pemerintahan	- Masih tingginya pelanggaran terhadap peraturan daerah -	- Meningkatkan sosialisasi peraturan daerah kepada seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah untuk terwujudnya birokrasi bersih, transparan dan akuntabel dengan memaksimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, profesionalisme dan manajemen pemerintahan	- Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitas - Akses terhadap data masih kurang - Belum optimalnya partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat	- Peningkatan Pelaksanaan reformasi birokrasi - Peningkatan sinergitas dan koordinasi pemerintah daerah di setiap tingkatan - Peningkatan partisipasi publik dalam berbagai kegiatan pembangunan, dari perencanaan hingga pengawasan	
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintahan	- Belum optimalnya sistem akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah di setiap tingkatan		
Misi 5 : Mengembangkan kualitas hidup masyarakat yang religius dan berbudaya				
Terwujudnya Kota Gorontalo sebagai Kota Qur'ani sesuai falsafah "Adat bersendikan Syara', Syara' bersendikan Kitabullah"	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama sesuai pemahaman dan pengetahuan al-quran	- Masih rendahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya yang pada usia sekolah baik anak perempuan dan laki laki yang mengarah pada memilih pendidikan keagamaan dalam mencapai pendidikan yang berbasis Iptek dan Imtaq	- Penerapan kurikulum yang berbasis budaya lokal	Melestarikan dan mengembangkan nilai kebudayaan lokal dalam sistem pendidikan dan berbagai kegiatan masyarakat, mempromosikan budaya dan produk lokal baik di dalam maupun di luar Kota Gorontalo, mengembangkan pengelolaan kekayaan budaya; dan

Tujuan	Sasaran	Gap/Kekurangan	Alternatif rekomendasi	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pembangunan dan peningkatan fasilitas pendidikan keagamaan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua 		menggalakan pemakaian produk lokal dalam berbagai kegiatan
	Meningkatnya kelestarian adat dan budaya daerah yang bernuansa religious	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurang tersosialisasi budaya dan adat daerah sebagai daya tarik wisata - Kurang terpeliharanya situs-situs budaya daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan promosi budaya lokal sebagai daya tarik wisata 	
Misi 6 : Penguatan daya saing kota sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Teluk Tomini				
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya Nilai Investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi di daerah masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kemudahan perijinan usaha/investasi dan peningkatan jaminan keamanan social dan lingkungan serta peningkatan kepastian hukum dalam pengelolaan usaha - Peningkatan akses jasa keuangan/ permodalan, teknologi dan pemasaran 	Meningkatkan iklim usaha/investasi dengan menghilangkan semua jenis hambatan/kendala perijinan dan pengelolaan usaha dengan selalu memperhatikan daya dukung potensi wilayah, menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta mengutamakan keberpihakan terhadap upaya penumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio penerimaan pajak terhadap PDB masih belum mencapai target 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sumber penerimaan PAD - Sistem informasi dan data PAD - Perbaikan sistem pemungutan PAD (non tunai/online) - Pengawasan dan pengendalian pemungutan PAD untuk menekan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional melalui pengembangan sumber penerimaan PAD, perbaikan sistem, pengawasan, dan pengendalian pemungutan. - Meningkatkan system perdagangan yang

Tujuan	Sasaran	Gap/Kekurangan	Alternatif rekomendasi	Rekomendasi
			potensi kehilangan/kebocoran	memberikan perlindungan perekonomian masyarakat melalui pembuatan kebijakan yang mengatur pengendalian harga dan keadilan pemberian upah bagi semua.

6.3 Integrasi Rekomendasi KLHS ke dalam RPJMD Kota Gorontalo 2019 – 2024

Integrasi rekomendasi KLHS ke dalam RPJMD Kota Gorontalo 2019 – 2024 dimaksudkan untuk memastikan termuatnya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kota Gorontalo tahun 2019 – 2024, sekaligus sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, penyusunan RPJMD harus dilengkapi dengan proses penyusunan KLHS. Oleh karena itu, isu strategis yang telah diidentifikasi oleh Tim Penyusun melalui proses pelaksanaan KLHS akan ditindaklanjuti dengan mengintegrasikannya ke dalam RPJMD. Pada penyusunan RPJMD Kota Gorontalo periode 2019-2024, KLHS dilakukan terhadap dokumen utama Rancangan Awal RPJMD Kota Gorontalo dengan dilengkapi analisis atas Visi, Misi dan Program Walikota Terpilih 2019-2024 yang telah dijabarkan menjadi rumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, dan program pembangunan.

Rekomendasi KLHS menjadi bahan pertimbangan bagi walikota dan seluruh perangkat daerah dalam menyusun kebijakan, rencana, dan program. Rekomendasi yang disetujui akan diinstruksikan kepada Perangkat Daerah terkait untuk diintegrasikan sebagai perbaikan terhadap rancangan dokumen perencanaan yang sudah ada. Secara khusus tindak lanjut dalam pelaksanaan rekomendasi yang sudah dirumuskan pada **Bab 6** ini adalah sebagai berikut:

1. Revisi dan/atau penyempurnaan kebijakan dalam RPJMD berdasarkan rekomendasi KLHS yang dirumuskan pada subbab 6.2 oleh Perangkat Daerah terkait. Hal ini diantaranya dapat dilakukan dengan memastikan arahan kebijakan, sasaran pokok dan indikator kinerja dalam pencapaian sasaran RPJMD memuat rekomendasi KLHS
2. Penjabaran RPJMD ke dalam KRP dengan berpedoman pada rekomendasi KLHS yang dirumuskan pada **subbab 6.2** dan **6.3** oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait. Hal ini diantaranya dapat

dilakukan dengan memastikan sasaran, kegiatan dan indikator kinerja memuat rekomendasi KLHS

Matriks penelaahan integrasi KLHS dan RPJMD, yang menunjukkan tindak lanjut penyempurnaan kebijakan, ditampilkan pada Tabel 63 KLHS RPJMD Kota Gorontalo tahun 2019 – 2024 diintegrasikan oleh BAPPEDA Kota Gorontalo dengan menjadikannya pertimbangan penyusunan RPJMD Kota Gorontalo tahun 2019 – 2024 terutama dalam penyusunan sasaran pokok dan arah kebijakan pada setiap misi. Integrasi dimuat dalam Lampiran RPJMD dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kota Gorontalo tahun 2019 – 2024. Bagian yang diadaptasi dari KLHS meliputi:

1. Permasalahan di Kota Gorontalo yang sudah selaras dengan arah kebijakan dan sasaran RPJMD namun belum menjadi fokus dalam RPJMD.
2. Rumusan alternatif yang dapat ditempuh untuk mengatasi gap atau kesenjangan pada kebijakan pembangunan RPJMD.
3. Gambaran tujuan pembangunan berkelanjutan yang sudah selaras dan diakomodasi dalam visi dan misi RPJMD Kota Gorontalo tahun 2019 – 2024

Tabel 63. Matriks penelaahan integrasi KLHS dalam RPJMD

Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
Tujuan 1: Mengakhir segala bentuk kemiskinan	1.4.1(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan akses terhadap air bersih dengan meningkatkan kapasitas IPA. - Inventarisasi dan perlindungan ketersediaan sumber air baku - Pengelolaan air permukaan dan air hujan sebagai air baku; - Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan air; - Pengembangan infrastruktur jaringan air bersih; - Revitalisasi atau pengembangan BUMD yang menagani pengelolaan air bersih; 	Kondisi persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan air minum layak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2015 sebesar 42,26% meningkat menjadi 93,36% pada Tahun 2018..	Masih terdapat gap sebesar 6,64%.	<p>Tujuan: Meningkatnya jumlah Kawasan ekonomi, pemerintahan, dan permukiman yang memiliki infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan</p> <p>Sasaran: Meningkatnya capaian penilaian kualitas lingkungan hidup perkotaan</p>	<p>Strategi: Meningkatkan akses terhadap air bersih, inventarisasi dan perlindungan sumber air baku</p> <p>Arah kebijakan: Peningkatan kapasitas IPA</p>	Program pengelolaan sumber daya air
	1.4.1(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Kebersihan, Sanitasi dan Penataan Lingkungan Sehat, Aman dan 	Terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi	Masih ada gap sebesar 3,34%	<p>Tujuan: Meningkatnya jumlah Kawasan ekonomi, pemerintahan, dan permukiman</p>	<p>Strategi: Meningkatkan kualitas infrastruktur kawasan permukiman dalam rangka pengurangan luasan kawasan kumuh,</p>	Program pengembangan lingkungan sehat

Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
		<ul style="list-style-type: none"> - Bersih Sebagai Kegiatan Preventif - Meningkatkan jumlah kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) - Memanfaatkan program CSR dari pihak swasta untuk pembangunan sarana sanitasi layak 	layak dan berkelanjutan. Kondisi pada Tahun 2015 sebesar 82,94% dan pada tahun 2018 sebesar 96,66%.		<p>yang memiliki infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan</p> <p>Sasaran: Meningkatnya capaian penilaian kualitas lingkungan hidup perkotaan</p>	<p>mewujudkan permukiman yang layak huni dan menambah estetika kota</p> <p>Arah kebijakan: Penanganan Kawasan kumuh secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan</p>	
	1.4.1(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengendalikan kegiatan pembangunan di Kota Gorontalo melalui penetapan KDB dan KDH yg sesuai dengan fungsi kawasan di atasnya - Penataan permukiman khususnya di Kecamatan Hulonthalangi dan Kecamatan Dumbo Raya 	Di Kota Gorontalo masih terdapat 13,98% rumah tangga kumuh. Angka ini mengalami peningkatan dari Tahun 2015 (12,78%)	Terjadi peningkatan rumah tangga kumuh di Kota Gorontalo	<p>Tujuan: Meningkatnya jumlah Kawasan ekonomi, pemerintahan, dan permukiman yang memiliki infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan</p> <p>Sasaran: Meningkatnya capaian penilaian kualitas lingkungan hidup perkotaan</p>	<p>Strategi: Meningkatkan kualitas infrastruktur kawasan permukiman dalam rangka pengurangan luasan kawasan kumuh, mewujudkan permukiman yang layak huni dan menambah estetika kota</p> <p>Arah kebijakan: Penanganan Kawasan kumuh secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan</p>	Program pengembangan lingkungan sehat
Tujuan 3 : Kehidupan sehat dan sejahtera	3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).		Angka kematian ibu dan prevalensi	Masih tingginya prevalensi penyakit	Tujuan:	Strategi:	- Program pencegahan dan

Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
	3.3.1(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan kesehatan - Pemerataan distribusi tenaga kesehatan - Peningkatan pengawasan terhadap obat dan makanan - Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya 	penyakit menular cenderung meningkat.	menular (HIV, TB)	<p>Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Publik Lainnya</p> <p>Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan kesehatan</p>	<p>Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat</p> <p>Arah kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada fasilitas Kesehatan dasar dan rujukan - Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular - Standarisasi Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan - Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan - Peningkatan Ketersediaan sumberdaya Kesehatan yang berkualitas dalam aspek sumberdaya manusia (SDM) kesehatan, aspek pembiayaan, aspek perbekalan 	<ul style="list-style-type: none"> - penanggulangan penyakit menular - Program standarisasi pelayanan kesehatan - Program pelayanan kesehatan penduduk miskin - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
	3.3.2(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.						
	3.4.1(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.						
	3.5.1(e)Prevalensi penyalahgunaan narkoba.						
	3.7.1(a)Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.						
	3.8.1 (a)Unmet need pelayanan kesehatan.						
	3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.						
	3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.						

Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
						kesehatan dan farmasi serta aspek pemenuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan sesuai dengan standar - Penyediaan pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi	
Tujuan 4: Pendidikan berkualitas	4.1.1e Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat. 4.2.2a Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkatkan kualitas pengajar dan mutu pendidikan, perbaikan dan pengoptimalan penggunaan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan akses pendidikan yang inklusif dan merata, pelaksanaan program wajib pendidikan dasar Sembilan tahun, serta tersosialisasinya arahan mengenai pentingnya pendidikan	Angka partisipasi kasar tingkat SMP sebesar 81,93%	Masih adanya anak usia 12-15 tahun yang belum bersekolah	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Publik Lainnya Sasaran: Meningkatkan kualitas layanan pendidikan	Strategi: Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di setiap jenjang Pendidikan formal dan non formal Arah kebijakan: Memberikan bantuan beasiswa kepada siswa miskin	- Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini - Program Pengelolaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Tujuan 6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang	6.1.1(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	1. Terlayannya kebutuhan masyarakat akan air bersih: - Peningkatan akses terhadap air bersih	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak tidak	Masih terdapat 65,28% rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap air minum layak.	Tujuan: Meningkatkan jumlah Kawasan ekonomi, pemerintahan, dan	Strategi: Meningkatkan kualitas infrastruktur kawasan permukiman dalam rangka pengurangan luasan	-

Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
berkelanjutan untuk semua	6.1.1(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. 6.1.1(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> - dan sanitasi yang layak, merata dan terjangkau; - Pengelolaan air Hujan sebagai air baku; - Pengelolaan air Sungai Bone, Sungai Bolango sebagai sumber air - Pengelolaan pemanfaatan air tanah sebagai sumber air bersih - Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan air bagi industri dan pertanian; - Pemberdayaan lembaga swadaya masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air untuk irigasi pertanian; - Terciptanya lingkungan Kota Gorontalo yang bersih dan sehat: - Inventarisasi dan perlindungan ketersediaan sumber air baku - Revitalisasi PDAM 	mengalami peningkatan. Kondisi di Tahun 2015 sebesar 42,24%, Tahun 2016 menurun 34,78%, Tahun 2017 menurun lagi menjadi 26,69 dan Tahun 2018 meningkat lagi menjadi 34,72%.		<p>permukiman yang memiliki infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan</p> <p>Sasaran: Meningkatnya capaian penilaian kualitas lingkungan hidup perkotaan</p>	<p>kawasan kumuh, mewujudkan permukiman yang layak huni dan menambah estetika kota</p> <p>Arah Kebijakan: Pembangunan dan Peningkatan kualitas sarana prasarana perumahan permukiman yang menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan</p>	

Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dan pengolahan limbah yang ramah lingkungan - Pembangunan fasilitas pengelolaan limbah terpadu - Meningkatkan kapasitas dan efektivitas IPLT dan IPAL komunal menjadi 50% - Meningkatkan pengawasan pengelolaan limbah cair 					
	<p>6.2.1(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.</p> <p>6.2.1(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Kebersihan, Sanitasi dan Penataan Lingkungan Sehat, Aman dan Bersih Sebagai Kegiatan Preventif - Meningkatkan jumlah kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) - Memanfaatkan program CSR dari pihak swasta 	Kondisi di Kota Gorontalo menunjukkan akses terhadap sanitasi layak baru mencapai 85%.	Masih terdapat 15% yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak	<p>Tujuan: Meningkatnya jumlah Kawasan ekonomi, pemerintahan, dan permukiman yang memiliki infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan</p> <p>Sasaran: Meningkatnya capaian penilaian kualitas</p>	<p>Strategi: Meningkatkan kualitas infrastruktur kawasan permukiman dalam rangka pengurangan luasan kawasan kumuh, mewujudkan permukiman yang layak huni dan menambah estetika kota</p> <p>Arah kebijakan: Penanganan Kawasan kumuh secara</p>	Program pengembangan lingkungan sehat

Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
		untuk pembangunan sarana sanitasi layak			lingkungan hidup perkotaan	menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan	
	6.2.1(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. 6.3.2(a) Kualitas air danau 6.3.2(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	<ul style="list-style-type: none"> - Mempercepat peningkatan kapasitas dan efektifitas IPAL komunal dan IPLT hingga 50%, khususnya di wilayah-wilayah padat penduduk - Peningkatan pengawasan terhadap pihak industri/swasta dalam penataan pengelolaan limbah cair. 	Kota Gorontalo memiliki 23 IPAL Komunal dan 1 (satu) IPLT.	IPAL komunal dan IPLT belum efektif dalam melakukan pengolahan limbah.	<p>Tujuan: Meningkatnya jumlah Kawasan ekonomi, pemerintahan, dan permukiman yang memiliki infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan</p> <p>Sasaran: Meningkatnya capaian penilaian kualitas lingkungan hidup perkotaan</p>	<p>Strategi: Meningkatkan kualitas infrastruktur kawasan permukiman dalam rangka pengurangan luasan kawasan kumuh, mewujudkan permukiman yang layak huni dan menambah estetika kota</p> <p>Arah kebijakan: Penanganan Kawasan kumuh secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan</p>	Program pengembangan lingkungan sehat
Tujuan 8: Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Meningkatkan iklim usaha/investasi dengan menghilangkan semua jenis hambatan/kendala perijinan dan pengelolaan usaha dengan selalu memperhatikan daya dukung potensi wilayah, menjaga keseimbangan dan	Proporsi lapangan kerja sector informal sector non pertanian mengalami penurunan	Tingkat pengangguran masih tinggi	<p>Tujuan: Menurunnya presentase kemiskinan serta tingkat pengangguran</p> <p>Sasaran: Meningkatnya partisipasi angkatan kerja</p>	<p>Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan informasi tenaga kerja serta fasilitas pelatihan dan ketrampilan <p>Arah Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Kesempatan Kerja - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
	8.9.1(b) Jumlah kunjungan wisatawan	kelestarian lingkungan serta mengutamakan keberpihakan terhadap upaya penumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktivitas UMKM untuk menambah nilai jual dan daya saing komoditas lokal, melalui pembuatan kebijakan pembangunan yang mendukung kemudahan akses UMKM pada jasa keuangan, teknologi informasi dan perdagangan Revitalisasi lokasi pariwisata di Kota Gorontalo				Angkatan Kerja yang berorientasi pada penguasaan ketrampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar - Perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	
Tujuan 11: Kota dan Pemukiman berkelanjutan	11.1.1(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Menata pemukiman kumuh dan menyediakan kawasan perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan dilengkapi dengan fasilitas pelayanan dasar terhadap sanitasi, kebersihan, dan keamanan lingkungan	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak sebesar 70,61%. Meningkat dari Tahun 2015 sebesar 60,12%.	Masih terdapat 29,39% rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap hunian layak.	Tujuan: Meningkatkan jumlah Kawasan ekonomi, pemerintahan, dan pemukiman yang memiliki infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Strategi: Meningkatkan kualitas infrastruktur kawasan permukiman dalam rangka pengurangan luasan kawasan kumuh, mewujudkan permukiman yang layak huni dan menambah estetika kota	- Program Pencegahan, Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh - Program Pengembangan Perumahan

Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
		<p>pemukiman yang memadai dan merata</p> <p>Meningkatkan ruang terbuka hijau pada wilayah pemukiman untuk tetap menjaga kualitas udara lingkungan.</p> <p>Mengadakan dan meningkatkan akses air minum bersih secara merata yang disertai dengan pengelolaan air limbah dan efisiensi penggunaan air secara terpadu di semua sektor.</p> <p>Menambah kapasitas layanan angkut sampah dan pengelolaan air limbah secara optimal untuk menjamin akses berkelanjutan terhadap air minum bersih, sanitasi, dan kebersihan yang memadai bagi semua kalangan</p>			<p>Sasaran: Meningkatnya capaian penilaian kualitas lingkungan hidup perkotaan</p>	<p>Arah Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan Kawasan kumuh secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan - Penyediaan dan Rehabilitasi rumah tidak layak huni 	
	11.5.1(b)Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Meningkatkan jumlah kelurahan tangguh bencana	Kota Gorontalo memiliki wilayah rawan bencana banjir tinggi sebesar 35,78%.	Kondisi drainase yang tidak berfungsi dengan baik	Tujuan: Meningkatnya jumlah Kawasan ekonomi, pemerintahan, dan	Strategi: Meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi, penanggulangan banjir dan infrastruktur	Program pengelolaan sumber daya air

Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
					permukiman yang memiliki infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan Sasaran: Meningkatnya capaian penilaian kualitas lingkungan hidup perkotaan	dasar lainnya yang disertai penataan manajemen lalu lintas pada kawasan pusat perdagangan dan jasa Arah kebijakan: Menata sistem drainase yang lebih memadai dan terintegrasi untuk mencegah dan mengurangi terjadinya banjir	
	11.6.1(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penangan sampah mulai dari sumber sampah (rumah tangga dan industry) melalui 3R hingga diatas 20%. - Peningkatan penangan sampah mulai dari sumber sampah (rumah tangga dan industry) melalui bank sampah hingga diatas 20%. - Pengembangan kerja sama pengelolaan sampah - Pengembangan infrastruktur persampahan yang ramah lingkungan 	Persentase sampah yang tertangani di Kota Gorontalo sebesar 52,85%	<p>Kesadaran akan pengelolaan sampah rumah tangga masih rendah</p> <p>Belum efektifnya program 3R dan bank sampah.</p>	<p>Tujuan: Meningkatnya jumlah Kawasan ekonomi, pemerintahan, dan permukiman yang memiliki infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan</p> <p>Sasaran: Meningkatnya capaian penilaian kualitas lingkungan hidup perkotaan</p>	<p>Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan ruang-ruang terbuka hijau, system pengolahan sampah yang terpadu, dan meminimalisir tingakt pencemaran udara pada kawasan-kawasan yang dikembangkan infrastrukturnya <p>Arah kebijakan:</p>	Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan

Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
		<p>dan aman terhadap risiko bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan. - Menerapkan dalam kurikulum pendidikan usia dini dan pendidikan dasar tentang pengelolaan sampah skala rumah tangga - Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan sampah - Sosialisai Kebersihan, Sanitasi dan Penataan Lingkungan Sehat, Aman dan Bersih Sebagai Kegiatan Preventif - Peningkatan kemampuan aparat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah domestik 					

Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Kondisi Daerah	Gap	Tujuan dan Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
Tujuan 12 Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	12.5.1(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penanganan sampah mulai dari sumber sampah (rumah tangga dan industry) melalui 3R hingga diatas 20%. - Peningkatan penanganan sampah mulai dari sumber sampah (rumah tangga dan industry) melalui bank sampah hingga diatas 20%. 					

BAB VII
PENUTUP

BAB VII. PENUTUP

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2019 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang ditujukan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan di Kota Gorontalo, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. KLHS ini disusun berdasarkan hasil analisis permasalahan isu pembangunan berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terhadap KRP. KLHS ini disusun dengan sasaran untuk:

1. Tersedianya analisis mengenai pengaruh kebijakan, rencana dan program dalam RPJMD Kota Gorontalo terhadap kondisi dan keberlangsungan ekosistem dan lingkungan di Kota Gorontalo.
2. Tersedianya rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan program dalam RPJMD Kota Gorontalo.
3. Tersedianya rekomendasi perbaikan dan/atau revisi kebijakan, rencana, dan program dalam RPJMD Kota Gorontalo.
4. Tersedianya analisis dan alternatif rekomendasi untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dapat dijadikan rujukan dan diadopsi dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. KLHS untuk RPJMD Kota Gorontalo 2019 – 2024 ini merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan yang penyelenggaraannya memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, penyelenggaraan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan ini memerlukan keterlibatan aktif dan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan ini sangat penting dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan tindak lanjut KLHS. Dalam penyelenggaraan Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup diwajibkan untuk melaksanakan

KLHS KRP atau melaksanakan AMDAL atau UKL UPL sesuai dengan skala KRP dan potensi risiko yang diakibatkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apandi, T. d. (1997). *Peta Geologi Lembar Kotamobagu, Sulawesi, skala 1:250000*. Bandung: P3G.
- Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. (2016). *Status Lingkungan Hidup Daerah Bone Bolango Tahun 2016*. Suwawa: BLH Kabupaten Bone Bolango.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Kota Gorontalo dalam Angka Tahun 2017*. 2017: BPS Kota Gorontalo.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Kota Gorontalo dalam Angka Tahun 2019*. Gorontalo: BPS Kota Gorontalo.
- Badan Standarisasi Nasional Indonesia. (2004). *SNI SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di Perkotaan*. Jakarta: BSN.
- BAPPEDA Kota Gorontalo. (2012). *Dokumen Master Plan Kota Hijau*. Gorontalo: BAPPEDA Kota Gorontalo.
- BAPPEDA Kota Gorontalo. (2019). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2019 - 2038*. Gorontalo: BAPPEDA .
- BPS Kota Gorontalo. (2017). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Gorontalo Tahun 2017*. Gorontalo: BPS .
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo. (2018). *Laporan Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo*. Kota Gorontalo: DLH .
- DLH Kota Gorontalo. (2017). *Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017*. Gorontalo: DLH Kota Gorontalo.
- DLHK Provinsi Gorontalo. (2018). *Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Gorontalo*. Gorontalo: DLHK Provinsi Gorontalo.
- Duka, M. (2018). *Kajian Perubahan Tutupan Lahan terhadap Pola Persebaran Suhu di Kota Gorontalo*. Gorontalo: Program Studi KLH, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo.
- Hasal, Z. (2018). *Analisis Manfaat Ruang Terbuka Hijau (Rth) Bagi Penyerapan Karbon Pada Serasah (Daun) Di Kota Gorontalo*. Gorontalo: Program Studi KLH, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Muta'ali. (2015). *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM.

Nusantara. (2012, April 28). *Tiga Desa di Bone Bolango diterjang Banjir Bandang*. Diambil kembali dari Info Publik Portal Berita Info Publik: <http://infopublik.id>

Solihin, P. A. (2016, Mei 10). *124 Rumah di Bone Bolango terendam banjir*. Diambil kembali dari AnatarNews. Com: m.antaranews.com



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA GORONTALO
Jl. Arief Rahman Hakim No. 73 Telp. 0435-828071

Gorontalo, 12 Juli 2019

Nomor : 050/Bappeda-Infrawil/
Lamp : 1 (satu) expl.
Hal : Usulan SK Walikota

K e p a d a Yth,
Bapak Walikota Gorontalo
Cq.Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Gorontalo
Di -
Gorontalo

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) buah Draft SK tentang Pembentukan Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024 Kota Gorontalo dengan ketentuan sebagai berikut :

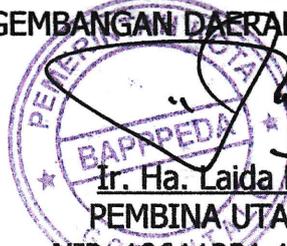
Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

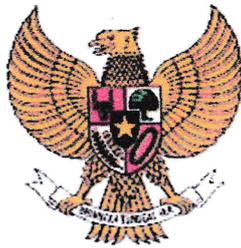
Maksud dan Tujuan : Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah perlu dilakukan analisis secara komprehensif melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis sehingga menghasilkan perencanaan pembangunan yang matang serta sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk dilakukan penelitian oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Gorontalo, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA GORONTALO



Ir. Ha. Laida M. Ali MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611231 198903 2 014



WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR : 225 / 2 / VI / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2019-2024
KOTA GORONTALO

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah perlu dilakukan analisis secara komprehensif melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis sehingga menghasilkan perencanaan pembangunan yang matang serta sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa agar analisis melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis terlaksana dengan baik dan terintegrasi dengan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Gorontalo tentang Pembentukan Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024 Kota Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2027 (Lembar Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 102 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024 Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Koordinator
mengkoordinir dan mengarahkan pelaksanaan penyusunan KLHS RPJMD 2019-2024 Kota Gorontalo.
2. Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Tenaga Ahli melaksanakan tugas :
 - a. melakukan pengkajian pembangunan berkelanjutan Kota Gorontalo terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan pemerintah pusat.
 - b. melakukan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 - c. merumuskan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis daerah.

d. melaksanakan penyusunan laporan KLHS RPJMD 2019-2024 Kota Gorontalo.

e. bertanggung jawab terhadap semua tahapan penyusunan KLHS RPJMD 2019-2024 Kota Gorontalo.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Walikota Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya diberikan insentif.
- KELIMA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT hanya diberikan kepada Tenaga Ahli.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 20 Juni 2019

WALIKOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Gorontalo.
2. Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
---------------------	----------------	---------	-------

16	KEPALA SUB. BIDANG INFRASTRUKTUR PADA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA GORONTALO	ANGGOTA	-	
17	KEPALA SUB. BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP PADA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA GORONTALO	ANGGOTA	-	
18	KEPALA SUB. BIDANG PARIWISATA DAN INFOKOM PADA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA GORONTALO	ANGGOTA	-	
19	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA GORONTALO	ANGGOTA	-	
20	KEPALA BIDANG DATA DAN LITBANG PADA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA GORONTALO	ANGGOTA	-	
21	MUSTAKIM MOKOGINTA, SH	ANGGOTA	-	
22	EKA YULIANA KADIR, SE	ANGGOTA	-	
23	SITI NURAINUN HIANGGIO, SE	ANGGOTA	-	
24	YULAN HANUN	ANGGOTA	-	
25	ABDUL HALIM MOHI	ANGGOTA	-	
26	SRI WULAN LAINTA	ANGGOTA	-	

WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR : 225 / 2 / VI / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
2019-2024 KOTA GORONTALO

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	INSENTIF	KET
1	SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO	KOORDINATOR/ PENGARAH	-	
2	KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA GORONTALO	KETUA	-	
3	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GORONTALO	WAKIL KETUA	-	
4	KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA GORONTALO	SEKRETARIS	-	
5	KEPALA BIDANG PERENCANAAN MAKRO PADA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA GORONTALO	ANGGOTA	-	
6	KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA PADA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA GORONTALO	ANGGOTA	-	

7	KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO	ANGGOTA		
8	KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GORONTALO	ANGGOTA		
9	KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI GORONTALO	ANGGOTA		
10	KEPALA SUB. BIDANG PERENCANAAN PADA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA GORONTALO	ANGGOTA		
11	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GORONTALO	ANGGOTA		
12	KEPALA SUB. BIDANG SUMBER DAYA AIR, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO	ANGGOTA		
13	Dr. FITRYANE LIHAWA, M.Si (TENAGA AHLI LINGKUNGAN HIDUP)	TENAGA AHLI	Rp. 25.000.000	5 BULAN
14	Dr. ENG. SRI MARYATI, S.Si (TENAGA AHLI GIS/PEMETAAN)	TENAGA AHLI	Rp. 7.000.000	2 BULAN
15	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA	ANGGOTA		